Dr. Abubakar Madani, M.Ag.

KONSEP ELITE POLITIK

Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Dr. Abubakar Madani, M.Ag.

KONSEP ELITE POLITIK

Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah

PRAKATA

Percaturan politik umat Islam di Indonesia di samping dimainkan oleh partai politik, juga sering diperankan oleh kalangan intelektual muslim serta organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terutama tatkala partai-partai Islam termarginalkan perannya. Kedua organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia ini telah menunjukkan kemampuan mempertahankan gerakan dan perananya dalam era sejarahnya yang panjang. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan (jam'iyyah diniyah) mendasarkan gerak perjuangannya pada paham keagamaan yang berakar pada tradisi pemikiran *ahlusunnah wal jama'ah*.

Berpangkal pada tradisi keberagaman yang dipilihnya, dikembangkan pemikiran politik yang pada tingkat tertentu tecermin dalam sikap dan kultur politiknya sehingga Nahdlatul Ulama sering menampilkan maneuver-manuver politik yang berbeda bahkan sering berseberangan dengan kelompok Islam lain, yang mereka identifikasikan sebagai kelompok modern. Digelarnya pemilihan kepala daerah langsung membawa dampak terhadap dinamika politik elite Nahdlatul Ulama di tingkat lokal. Para elite Nahdlatul Ulama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jama'ah dan charisma yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat khususnya warga Nahdlatul Ulama di daerahnya.

Terima kasih juga kepada para guru dan sahabat-sahabat saya yang telah banyak membantu di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Akhirnya, saya memohon kepada Allah SWT semoga selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua pihak dan semoga kita dijadikan insan

yang bisa mengambil manfaat atas semua yang telah dikaruniakan-Nya kepada kita dan dapat mempergunakannya sesuai perintah-Nya. Amin.

Samarinda, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata iii

BAGIAN I
Pengantar Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah 1

BAGIAN II
Konsep Elite Politik & Kekuasaan 21
Kekuasaan yang Terlihat (*Visible Power*) 31
Kekuasaan yang Tersembunyi (*Hidden Power*) 32
Kekuasaan yang Tidak Terlihat (*Invisible Power*) 33

BAGIAN III
Politik dan Nahdlatul Ulama 35
Partisipasi Poltik 35
Politik Perspektif Nahdlatul Ulama 43

BAGIAN IV

Mengenal Sistem Pemilihan 47

Konsep Pemilihan Umum 47

Konsep Pemilihan Kepala Daerah 50

BAGIAN V

Teori-Teori Sosial 53

Teori Strukturasi 53

Teori Pertukaran Sosial 58

Teori Pilihan Rasional 61

Teori Tindakan Sosial 63

Teori Perilaku Sosial 68

BAGIAN VI

Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama pada Pilkada Kota Samarinda 75

Keputusan dalam Pilihan Politik 75

Tindakan dalam Perilaku Politik 79

Sikap dalam Berpolitik Praktis 83

BAGIAN VII

Menelisik Faktor-Faktor Perilaku Politik Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Samarinda 87

Pertimbangan Rasional 88

Menguatnya Pragmatisme 91

Terlibat dalam *Power Sharing* 94

BAGIAN I

Pengantar Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah

Sejarah percaturan politik umat Islam di Indonesia sejak awal abad ke-20 menunjukkan pertumbuhan yang dinamis, seirama dengan dinamika pasang surut perjuangan yang dilalui. Pasang surut perpolitikan umat Islam tersebut dapat disimak antara lain dari perilaku dan berbagai perubahan sikap dalam merespon problem sosial-politik dan kemasyarakatan yang dihadapi sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan pada zamannya.

Percaturan politik umat Islam di Indonesia di samping dimainkan oleh partai politik, juga sering diperankan oleh kalangan intelektual muslim serta organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terutama tatkala partai-partai Islam termarginalkan perannya. Kedua organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia ini telah menunjukkan kemampuan mempertahankan gerakan dan peranannya dalam era sejarahnya yang panjang.

Nahdlatul Ulama yang dikenal dan diidentifikasikan sebagai organisasi sayap tradisional Islam dengan berbasis masyarakat pesantren dan pedesaan telah memberikan sumbangan pada perkembangan budaya dan peradaban Islam Indonesia yang memberikan nuansa tersendiri pada kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Meskipun pada awal berdirinya bukan merupakan organisasi politik, akan tetapi tampaknya Nahdlatul Ulama tidak bisa melepaskan diri dari percaturan politik dalam perjalanan gerakannya (Daman, 2001: 7).

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyyah diniyah*) mendasarkan gerak perjuangannya pada paham keagamaan yang berakar pada tradisi pemikiran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Berpangkal pada tradisi keberagaman yang dipilihnya, dikembangkan pemikiran politik yang pada tingkat tertentu tecermin dalam sikap dan kultur politiknya sehingga Nahdlatul Ulama sering menampilkan manuver-manuver politik yang berbeda bahkan sering berseberangan dengan kelompok Islam lain, yang mereka identifikasikan sebagai kelompok modern.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan merupakan bagian penting dari golongan ulama, kiai, pesantren dan kaum tradisional dalam menjawab berbagai persoalan baik mengenai persoalan sosial, keagamaan, budaya, ekonomi maupun persoalan politik. Implementasi kebijakan dari seluruh respons dari Nahdlatul Ulama terhadap berbagai persoalan keumatan memiliki variasi bentuk aktivitas di lapangan. Begitu pula menyangkut soal respons politik, Nahdlatul Ulama punya cukup pengalaman mulai dari beroposisi dengan negara sampai menjadi bagian penting dari negara (Khoiro Ummatin, 2002: 45).

Keterlibatan Nahdlatul Ulama secara organisatoris dalam pentas politik sering dinyatakan berawal pada tahun 1952 (Berdasarkan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang), saat Nahdlatul Ulama menyatakan keluar dari Masyumi dan menegaskan dirinya sebagai partai politik. Mulai saat itu sebutan "Partai Nahdlatul Ulama" lebih populer karena keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan-kegiatan dan proses-proses politik, di samping masih tetap melakukan kegiatan keagamaan. Menurut Laode Ida (2004: ix) sejak itu, Nahdlatul Ulama menjadi dua kekuatan yang berjalan bersamaan, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan dan sebagai partai politik.

Keadaan demikian berlangsung sampai dengan tahun 1973, saat terjadi fusi partai-partai politik Islam menjadi satu partai, yaitu Partai

Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, secara riil peran Nahdlatul Ulama di pentas politik masih berlangsung terus sampai dengan tahun 1984, tatkala Nahdlatul Ulama secara organisatoris resmi menanggalkan aktivitas politiknya lewat Partai Persatuan Pembangunan. Pada periode 1952-1984 para ulama dan politisi Nahdlatul Ulama mempunyai peran berlebih-terutama para ulamanya, di samping sebagai pelaku politik juga sebagai pembimbing umat sehingga perilaku politiknya merupakan refleksi dan paham keagamaan yang bersumber dari tradisi keberagamaannya, dan sebaliknya perilaku keagamaannya bernuansa politik. Sehubungan dengan itu, berbagai perubahan dan pergeseran dalam politik Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari "Dimensi kepentingan ideologis dan politis", yakni kepentingan mempertahankan dan mengembangkan paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan kepentingan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan. Oleh karena itu, secara nyata Nahdlatul Ulama menampakkan sikap politiknya, baik dalam percaturan politik di antara sesama tokoh-tokoh Islam (kalangan modernis) yang sering menampakkan adanya ketegangannya dengan pemerintah (Dhofier, 2011).

Pada Pemilu 1971 Nahdlatul Ulama menampakkan sikap kritisnya dan memengaruhi perilaku dan sikap politik Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi persoalan penting, seperti Rancangan-rancangan Ketetapan (Rantap) yang dibahas dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1973 dan kebijakan floating massa yang dipandang merugikan, mengingat massa pendukungnya banyak berada di pedesaan. Hal yang sangat menarik pada awal berdirinya Partai Persatuan Pembangunan adalah mengenai Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 31 Juli 1973 (kurang lebih tujuh bulan setelah Partai Persatuan Pembangunan didirikan). Karena Rancangan Undang-Undang ini dinilai bertentangan dengan ajaran Islam maka Partai Persatuan Pembangunan mengadakan reaksi keras dan menolak Rancangan Undang-Undang tersebut, yang kemudian didukung oleh demonstrasi pelajar dan mahasiswa Islam ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Yang akhirnya pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, dan Rancangan Undang-Undang itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sujuthi, 2001 :101).

Pengalaman berpolitik selama kurang lebih lima puluh tahun bersama Masyumi merupakan pelajaran berharga bagi Nahdlatul Ulama dalam memasuki babak baru percaturan politiknya, setelah menyatakan

diri sebagai partai politik pada tahun 1952. Para ulama akan terlibat secara langsung di dalam permainan politik, di samping tetap harus mengurus pesantren sehingga era ini menandai perpolitikan pesantren karena Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dan berbasis dari pesantren. Kekurangan kader politisi yang matang dan mapan dari kalangan pesantren menyebabkan Nahdlatul Ulama harus merekrut tenaga-tenaga muda yang berpendidikan sebab tidak semua ulama atau kiai pesantren berkesempatan dan tertarik mengurus partai dan terjun langsung dalam percaturan politik (Andree, 2008: 46).

Pemilihan Umum bagi Nahdlatul Ulama mempunyai makna yang sangat penting dan strategis. Lewat Pemilihan Umum ini, Nahdlatul Ulama mempunyai perwakilan dengan mendudukkan orang-orangnya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante yang merupakan arena pembuktian bagi kemampuan bermain di pentas politik, sekaligus berfungsi sebagai sarana dalam rangka pencarian legitimasi kekuasaan politiknya berdasar dukungan dari pengikutnya yang selama ini diragukan oleh Masyumi. Tetapi karena pelaksanaannya yang relatif dekat dan mendesak, menjadikan persiapan Nahdlatul Ulama relatif kurang sebab waktu yang ada lebih banyak digunakan untuk menata dan membenahi intern organisasi (konsolidasi), terutama pembentukan pengurus partai ke daerah-daerah (wilayah dan cabang) sampai desa-desa (ranting), dengan memanfaatkan pengurus Jam'iyyah Nahdlatul Ulama yang sudah ada.

Oleh karena itu, pada Muktamar ke-20 di Surabaya (September 1954), di samping dibicarakan *masalah diniyah* yang menjadi garapan pokok Nahdlatul Ulama, juga dibahas masalah *strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka menghadapi Pemilu 1955* (Andree, 2008). Untuk melapangkan jalan dalam percaturan politik, pada dasarnya sikap politik Nahdlatul Ulama bersifat *akomodasionis* luwes di bidang politik dan lebih suka mengambil bagian dalam pemerintahan. Di antara langkah-langkah penting yang menunjukkan sikap akomodasionis Nahdlatul Ulama adalah: mengadakan pendekatan dan koalisi dengan partai-partai yang seirama dalam tradisi politiknya dan dekat dengan pusat kekuasaan; ikut serta dalam percaturan memperoleh kedudukan dalam kabinet, dan melakukan pendekatan dengan pusat kekuasaan (presiden). Sehubungan dengan itu, Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan juga Masyumi membentuk sebuah federasi dan ajakan tersebut mendapat tanggapan positif, kecuali dari Masyumi sehingga pada Agustus 1952 *Liga Muslimin Indonesia* sebagai badan federasi antara Partai Syarikat Islam

Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Indonesia terbentuk. Di sisi lain dalam banyak hal politisi Nahdlatul Ulama lebih dekat dengan kaum nasionalis sekuler (Partai Nasional Indonesia) daripada dengan elite Masyumi yang berpendidikan Barat karena itu Nahdlatul Ulama sebagaimana juga Partai Nasional Indonesia, berbasis kuat di Jawa (Karim, 1995: 122) dan diliputi nilai-nilai tradisi Jawa. Kedua partai ini lebih berorientasi ke dalam daripada keluar dan lebih menghargai gaya kepemimpinan tradisional daripada cita-cita demokrasi Barat (van Bruinessen, 2004: 70). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dalam polarisasi hubungan antarpartai, kemudian Nahdlatul Ulama menjadi lebih dekat dengan Partai Syarikat Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (kelompok tradisional Islam) serta Partai Nasional Indonesia (kelompok nasionalis-sekuler), dan menjadi makin dekat dengan Soekarno. Sebaliknya, Masyumi lebih menunjukkan sikap oposisi dan semakin menjadi penentang Soekarno. Akibatnya, dalam berbagai hal Nahdlatul Ulama sering bersilang pandangan dengan Masyumi dalam merespon perkembangan politik.

Dalam menghadapi kekuasaan Soekarno yang semakin kuat walaupun sebagai kepala negara dalam sistem parlementer dan semakin populer di mata rakyat, diawali keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam Kabinet Ali I. Dengan semakin renggangnya Soekarno dan Masyumi yang menjadi oposisi, ternyata membawa semakin dekatnya Nahdlatul Ulama dengan Soekarno (Andree : 47). Terutama setelah Presiden merasa mendapat kehormatan dan pengukuhan sebagai *Waliyy-al-Amri al-Dharuri bi al Syaukah*. Penetapan ini semula merupakan hasil keputusan Konferensi Besar Alim Ulama pada 12-13 Mei 1952 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Departemen Agama masa Menteri Agama Fagih Usman dari Masyumi (Muhammadiyah), dalam rangka mencari dasar hukum (dari segi agama) bagi pembenaran pengangkatan wali hakim dalam pernikahan apabila tidak ada wali nasab. Hasil pertemuan tersebut kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1952 untuk memperoleh kekuatan hukum. Sementara itu, Peraturan Menteri Agama ini mendapat tanggapan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (Sirajuddin Abbas dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah) sehingga pada 4-5 Mei 1953 (masa Faqih Usman) dibicarakan lagi dalam Forum Ulama yang sama dan dengan hasil yang tidak berubah. Selanjutnya, setelah Menteri agama diganti oleh KH. Masykur (Nahdlatul Ulama), masalah ini semakin ramai dibicarakan sehingga diadakan lagi Konferensi Alim Ulama yang lebih luas di Tugu Bogor (2-7 Maret 1954), yang hasilnya membenarkan

putusan terdahulu dengan sedikit perubahan kata *dzu Syaukah* diganti *bi al Syaukah*. Dalam forum DPR KH. Wahab Hasbullah (Nahdlatul Ulama), membenarkan keputusan itu, sedangkan Masyumi menganggap kurang tepat sehingga persoalan berubah menjadi masalah politis (Andree, 2008).

Memang sebagai konsekuensi pengangkatan tersebut kekuasaan presiden menjadi sah sebagai kepala negara yang wajib ditaati. Sebenarnya yang diangkat berdasarkan keputusan tersebut tidak hanya presiden sebagai kepala negara, tetapi juga alat perlengkapan negara yang lain, yaitu Kabinet dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti dimaksud pasal 44 Undang-Undang Dasar Sementara. Namun, apa pun maksud dan keputusan tersebut, Presiden Soekarno dapat dengan cepat memanfaatkannya dan mengemukakan di depan umum, sebagai pengakuan terhadap keabsahan pemerintahannya dan kewenangan pribadinya (van Bruinessen, 2004: 73). Dengan keputusan tersebut, secara politis menguntungkan kepentingan politik Nahdlatul Ulama dan secara implisit mendelegitimasikan pemberontakan Darul Islam yang pada saat itu masih sangat kuat, dengan pengangkatan SM Kartosuwiryo sebagai *Imam* Negara Islam Indonesia (van Bruinessen, 2004). Meskipun Nahdlatul Ulama mulai dekat dengan presiden, namun adakalanya bersikap kritis dan keras, terutama dalam hal sikap Soekarno terhadap Negara Islam, dan dalam hal keikutsertaan kaum komunis dalam pemerintahan.

Dengan pola hubungan akomodasionis ini mengantarkan Nahdlatul Ulama semakin berperan dalam percaturan politik nasional selama era kepemimpinan Presiden Soekarno, dan sebaliknya Masyumi semakin terpuruk sampai akhirnya harus bubar pada tahun 1960. Keberhasilan ini antara lain ditandai oleh: *Pertama*, perolehan suara yang diraih Nahdlatul Ulama dalam Pemilu pertama (1955) yang menempati *urutan ketiga dari 28 partai* yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. *Kedua*, tidak pernah absen dalam pemerintahan (kabinet) sejak awal kehadirannya sebagai partai politik, bahkan pada masa krisis menjelang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, sampai dengan akhir dekade 1960-an keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam pemerintahan masih bisa dipertahankan.

Sementara itu, perubahan politik setelah Pemilu berkembang dengan cepat seiring dengan semakin kokohnya posisi Presiden Soekarno dan semakin kuatnya keinginan untuk melaksanakan "Demokrasi Terpimpin" karena Demokrasi Liberal dipandang tidak cocok. Penyusunan kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956) menggambarkan betapa kuatnya perebutan

pengaruh antar poros partai politik yang masih menghendaki pelaksanaan Demokrasi Liberal, dan poros presiden yang menginginkan segera diakhirinya praktik demokrasi Liberal dan segera dilaksanakan Demokrasi Terpimpin. Susunan yang dicapai merupakan usaha maksimal dari pergulatan tersebut. Dalam masa peralihan ini, seringkali menimbulkan ketegangan tersendiri antara Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu Nahdlatul Ulama lebih banyak bertindak sebagai penengah (Haidar, 1994: 153-157). Kabinet terbentuk, kemudian dengan formatur presiden sendiri dengan tidak mengikutsertakan partai politik dalam penyusunannya dan tidak mempertimbangkan kekuatan partai yang ada di parlemen (Kabinet ekstra-parlementer) menunjukkan betapa kuatnya keinginan Soekarno untuk segera mengakhiri sistem demokrasi Liberal. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir dalam pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer dan awal dari pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, meskipun secara resmi baru dimulai setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Adapun kekuatan partai politik tidak lagi menjadi kekuatan utama, dengan menghidupkan kelompok fungsional menjadi kekuatan politik yang menyaingi partai politik (Daman: 48). Bahkan, Soekarno menginginkan kelompok fungsional menjadi penopang sistem politik Indonesia sehingga secara sistematis kekuasaan politik sepenuhnya beralih ke tangan Presiden Soekarno.

Sementara itu, dalam merespon kekuatan politik Presiden Soekarno, partai-partai politik Islam yang semula dapat menggalang persatuan, khususnya dalam usaha memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di Konstituante dan menolak Demokrasi Terpimpin, tetapi setelah mengalami kegagalan, mulai bersimpang jalan. Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang tergabung dalam Liga Muslimin mulai mengendorkan sikap politiknya dengan menerima ide Demokrasi Terpimpin dan menerima kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta (Ma'arif, 1996: 54) sehingga ketiga partai tersebut diizinkan tetap eksis. Sebaliknya, Masyumi yang sudah semakin terpencil tetap meneruskan perlawanan terhadap gagasan dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sehingga sering mengalami perlakuan tidak wajar, dikucilkan dalam percaturan politik, dan akhirnya dibubarkan.

Sebenarnya sejak dikeluarkannya Dekret Presiden telah tampak ketidakberdayaan partai-partai politik berhadapan dengan kekuasaan

Soekarno. Menyadari akan kekuatan yang dimiliki dengan landasan tradisi pemikiran politiknya, yang bersumber pada pemikiran *Figh*, Nahdlatul Ulama berhasil melakukan pengendalian internal organisasinya. Pada saat pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1955 (5 Maret 1960), Nahdlatul Ulama mengkhawatirkan akan timbul kevacuman yang dapat membahayakan demokrasi. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama mendukung Pertemuan Tampak Siring (yang diwakili partai PNI-PKI, NU, dan DPAS) dalam rangka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rakyat, yang susunan anggotanya akan disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan Nahdlatul Ulama masih tetap menuntut agar pada saatnya tetap diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. Keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam pertemuan tersebut dipandang kalangan Masyumi sebagai sikap politik yang oportunis. Sementara Nahdlatul Ulama memandang keputusan itu sebagai keputusan pilihan yang paling mungkin yang bisa dilakukan (sebab tidak ada wakil partai Islam yang lain). Secara politis pilihan lain akan berdampak negatif yang lebih besar sebab tidak mungkin melawan keputusan presiden yang mendapat dukungan kuat dari partai lain dan militer (Haidar: 160-164).

Dengan pendekatan politik yang menggunakan dalil kaidah *fiqh*, memperlihatkan pragmatisme sikap politik Nahdlatul Ulama bisa berkelit menghadapi penyelesaian masalah secara fragmentaris namun tetap berpijak pada ideologi politik yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Karena tidak semua orang mengerti cara pendekatan politik Nahdlatul Ulama sehingga Nahdlatul Ulama sering dipahami sebagai oportunis. Namun, sebenarnya sikap politik tersebut merupakan akibat logis dari fargmentarisme figh yang memberi kemungkinan ragam pemecahan masalah dari sudut pendekatan dalil-dalil yang beragam (Haidar, 1994).

Demikian pula mengenai sikap Nahdlatul Ulama dalam penerimaan keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang pengangkatannya berdasarkan penunjukan presiden, meskipun semula terdapat perbedaan sikap, pada akhirnya Nahdlatul Ulama menerima keanggotaannya, meski dari segi jumlah berkurang (dirugikan). Proses penerimaan ini lebih banyak ditentukan oleh sikap dan karisma KH. Wahab Hasbullah, di mana dalam perdebatan beliau mengemukakan:

> “Kita putuskan sekarang ini saja karena waktunya sangat mendesak. Menunggu berlangsungnya musyawarah wilayah bisa ketinggalan

> kereta api. Kita putuskan sekarang ini saja, kita masuk saja dahulu dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Setelah itu, kita minta penegasan musyawarah antar wilayah. Kalau musyawarah antarwilayah memutuskan kita harus masuk kita sudah berada di dalam. Tetapi, jika musyawarah memutuskan menolak Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, apa sulitnya kita keluar dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Akan tetapi, kalau sekarang ini kita menolak duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong lalu musyawarah wilayah memutuskan kita harus masuk ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, kita sudah terlambat, pintu masuk sudah tertutup" (Ma'arif,1996: 86).

Kemudian, dengan dibubarkannya Masyumi (Agustus 1960) maka Nahdlatul Ulama menjadi parpol Islam terbesar dan bersama-sama Partai Syarikat Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah menjadi tumpuan kekuatan Islam. Sikap politiknya menjadi panutan partai politik Islam yang lain. Sikap politik akomodasionis Nahdlatul Ulama lebih ditujukan pada pusat kekuasaan (Presiden Soekarno), sebagai sikap defensif untuk kepentingan mempertahankan hidup organisasi dan kehidupan umatnya. Pada masa itu, Nahdlatul Ulama menghadapi masalah politik sekaligus menyangkut masalah keagamaan yang barangkali paling sulit dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, yaitu kebijaksanaan Soekarno dengan gagasan penyatuan kekuatan politik dalam *Nasakom* (Anam, 1985). Apabila Nahdlatul Ulama berdiam diri berarti membiarkan Partai Komunis Indonesia bertindak lebih leluasa, sebaliknya apabila Nahdlatul Ulama menentang, kemungkinan nasib yang telah menimpa Masyumi dapat saja terjadi pada Nahdlatul Ulama. Dalam keadaan yang sulit itu, Nahdlatul Ulama lebih cenderung memilih sikap fleksibel agar mampu bertahan hidup. Bertahan hidup akan lebih memberi harapan daripada keras, tetapi dengan risiko kematian. Pada saat yang sulit ini, KH. Wahab Hasbullah memberikan ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sikap menghadapi Nasakom dengan mengemukakan:

> "Jadilah ikan yang hidup! Ikan itu selagi masih hidup, masih mempunyai ruh atau nyawa, biar ia seratus tahun hidup di laut yang mengandung garam, dia tetap saja tawar dagingnya, tidak menjadi asin. Sebabnya ia mempunyai ruh karena ia hidup dengan seluruh jiwa. Sebaliknya, kalau ikan itu sudah mati sudah tidak mempunyai nyawa tiga menit saja taruh dia dalam kuali yang beragam, maka ia akan menjadi asin rasanya" (Anam, 1985).

Sikap akomodatif Nahdlatul Ulama yang menurut Deliar Noer sebagai "politik penyesuaian diri" dalam bidang politik praktis, berbanding terbalik bila bersinggungan dengan keyakinan agama. Oleh karena itu, menurut Fachry Ali dan Bachatir Effendy, keikutsertaan Nahdlatul Ulama hanya strategi, bukan berarti idealismenya bergeser (Thaba, 1996: 180-181). Seperti diketahui sejak ide Nasakom digulirkan, Partai Komunis Indonesia merasa mendapat dukungan yang besar dan semenjak saat itu tindakan-tindakan ofensif-revolusioner dikembangkan oleh Partai Komunis Indonesia, terutama setelah tahun 1962 dan mencapai puncaknya pada tahun 1964-1965. Sementara itu, ketegangan Partai Komunis Indonesia dengan militer terus berkembang sejak A.H. Nasution digantikan Ahmad Yani dan adanya usaha Partai Komunis Indonesia untuk menyusup dan mendapatkan sekutu dan memperluas pengaruhnya di kalangan militer, bahkan meng-isukan akan adanya kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal lewat isu dokumen Gilcluits. Partai Komunis Indonesia secara legal menuntut "Nasakomisasi" di berbagai organisasi dan kelembagaan negara maupun lembaga dan kegiatan kemasyarakatan. Di samping itu, berbagai aksi sepihak banyak dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, dan gerakan-gerakan lain yang makin nekat dan buas, seolah-olah sudah tidak ada tandingan (Anam, 1985).

Menghadapi kenyataan ini umat Islam melakukan penggalangan kekuatan, baik bersifat nasional maupun internasional. Pada Maret 1965 Nahdlatul Ulama bersama organisasi Islam lain membuat pernyataan yang menegaskan bahwa setiap perongrongan terhadap segolongan dan sebagian umat Islam, dianggap sebagai perongrongan terhadap umat Islam secara keseluruhan dan karenanya harus dihadapi secara konsekuen dengan persatuan Islam yang bulat. Termasuk di dalamnya penggalangan kekuatan pemuda dan mahasiswa dari semua unsur kekuatan umat Islam.

Dengan demikian, Nahdlatul Ulama bersikap akomodasionis terhadap Soekarno dalam rangka mempertahankan kepentingan politiknya dan mengimbangi kedekatan Partai Komunis Indonesia-Soekarno sebagai pusat pemegang kekuasaan politik. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama berani bertindak reaktif-kritis terhadap Partai Komunis karena tuntutan perjuangan ideologinya. Sikap yang demikian ternyata menyulitkan Partai Komunis Indonesia karena posisinya yang dekat dengan Presiden Soekarno.

Kolaborasi yang kuat antara Nahdlatul Ulama dengan Soekarno sejak awal kiprah politiknya (1952), menurut A. Syafii Maarif banyak ditentukan oleh adanya kesamaan budaya politik dari aliansi antara dua subkultur politik "paternalistik" yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dan Soekarno (Maarif, 1996: 88-90). Konsep politik paternalistik dalam struktur Jawa tentang hubungan "bapak-anak". Dalam pandangan Soekarno, bapak dipandang sebagai seorang tetua, yang bijak, tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Demikian pula tidak jauh berbeda dalam substruktur pesantren yang paternalistik, di mana posisi seorang kiai dipandang begitu agung secara spiritual. Dalam merangkul Nahdlatul Ulama, Soekarno cukup merangkul sejumlah tokoh sepuh (seperti Kiai Wahab Hasbullah, Idham Chalid), dan bagi Nahdlatul Ulama untuk mencapai tujuan dan kepentingan politiknya cukup merangkul Soekarno.

Pola hubungan Nahdlatul Ulama-Soekarno, memudar setelah peristiwa Kudeta (yang gagal) yang dilakukan oleh Gerakan 30 September dengan melibatkan Partai Komunis Indonesia. Ketika peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia meletus, Nahdlatul Ulama segera mengambil langkah-langkah perlawanan dan sikap politik yang tegas terhadap Partai Komunis Indonesia, dengan masih tetap menghormati Soekarno sebagai presiden, terutama di kalangan tokoh-tokoh seniornya. Adapun dari kelompok muda menunjukkan sikap kerasnya terhadap Soekarno. Sikap kalangan muda Nahdlatul Ulama ini sangat berperan bagi lahirnya rezim baru. Tragedi Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia ini, kemudian membawa perubahan besar dalam percaturan politik di Indonesia. Presiden Soekarno yang tidak memenuhi tuntutan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan tidak bisa mengatasi keadaan, kehilangan pengaruh politiknya, bersamaan dengan kehancuran Partai Komunis Indonesia, meski sempat memimpin 3 kabinet sampai saat diberhentikan oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat sementara pada 11 Oktober 1967. Tiga poros kekuatan politik utama pada masa Demokrasi Terpimpin dengan hilangnya kekuasaan Soekarno dan Partai Komunis Indonesia maka tinggal militer yang memegang kunci kekuasaan Politik Pasca Soekarno. Seperti dikemukakan oleh Yuwono Sudarsono, bahwa: "Setelah 1 Oktober 1965, berkembanglah suatu semangat baru yang juga merupakan reaksi terhadap sistem politik sebelumnya para pelaku dan pemikir politik mulai mencari-cari perumusan baru yang akan memurnikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan praktik politik. Kali ini kehidupan politik ditandai oleh besarnya peranan

angkatan bersenjata, terutama Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat", yang merupakan sumbu utama kehidupan berpolitik Indonesia selama rezim Soeharto. Berdasarkan konsensus nasional, pemerintah baru bertekad akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen, yang mewarnai kebijaksanaan politik dalam pembangunan nasional sepanjang era kekuasaan politik Soeharto. Sebagai strategi awal pemerintah baru (militer), melakukan langkah-langkah politik utamanya melalui empat tahapan, yaitu *Pertama*, penghancuran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi massanya serta larangan penyebarluasan ajarannya (TAP.MPRS. No.XXV/MPRS/1966). *Kedua*, Konsolidasi dan pembersihan lembaga pemerintahan dari unsur Partai Komunis Indonesia dan pendukung Soekarno, disertai penataan kelembagaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka melaksanakan Demokrasi Pancasila. *Ketiga*, menghapuskan dualisme kepemimpinan nasional dengan berhasil memberhentikan Soekarno dan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (Periksa TAP.MPRS.No.IX/1966, No.XXXIII/1967 dan XLIV/1968). *Keempat*, mengembalikan stabilitas politik dan merencanakan.

Berangkat dari sikap optimistis terhadap pemerintahan baru, kalangan umat Islam berusaha memainkan peran politiknya masing-masing mengingat jasa-jasa mereka bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam penumpasan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia dan melahirkan kekuasaan baru. Dalam suasana demikian, romantisme kebangkitan politik Islam menguat dan mencuat kembali. Kalangan modernis berjuang keras untuk memperoleh pengakuan eksistensinya dengan keinginan menghidupkan kembali Masyumi. Namun, keinginan ini tidak bisa terpenuhi sepenuhnya, dan pemerintah mengizinkan Parmusi sebagai partai Islam baru.

Oleh karena itu, menghadapi kenyataan format politik baru, Nahdlatul Ulama yang awal Orde Baru memiliki posisi yang kuat, namun kemudian tergeser dari jabatan-jabatan eksekutif, bahkan jabatan Menteri Agama yang hampir selalu diberikan kepada Nahdlatul Ulama sejak tahun 1971 sudah tidak lagi dipegangnya. Tindakan pemerintah meminggirkan Nahdlatul Ulama barangkali karena pada awal Orde Baru dianggap sebagai kelompok kritis yang bisa mengancam mulusnya gagasan politik pembangunan. Pada sisi lain, kondisi internal Nahdlatul Ulama yang kurang mendukung karena sumber daya manusianya dianggap kurang memiliki keunggulan kompetitif, baik di bidang politik, apalagi di bidang

ekonomi dan teknologi. Keadaan ini memaksa Nahdlatul Ulama dan partai lain memusatkan perhatian pada lembaga legislatif sebagai penyalur kepentingan dan interaksi politiknya sehingga kedudukan di legislatif menjadi sangat berarti. Dengan menyadari betapa kuatnya kepentingan politik masing-masing partai yang berfusi maka masalah krusial yang segera mendapatkan langkah antisipatif Partai Persatuan Pembangunan adalah "Pertimbangan kedudukan dalam kepengurusan partai, dan pembagian kursi legislatif".

Diilhami oleh pengalaman traumatis masa lampau, pada waktu bergabung dengan Masyumi, yang diharapkan sebagai satu-satunya partai politik umat Islam, tetapi kemudian pecah karena rebutan kursi. Sementara munculnya keinginan untuk mendirikan partai politik merupakan dampak dari kekecewaan para elite Nahdlatul Ulama selama berada di dalam Masyumi, dan pada saat yang sama tentu didasarkan pada suatu kesadaran bahwa mereka memiliki massa pendukung (konstituen) yang nyata. Hal itu terbukti dalam pemilu 1955, Nahdlatul Ulama masuk sebagai peraih suara tiga besar setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi. Posisi ketiga memang belum memberikan kepuasan para elite Nahdlatul Ulama karena sebagian warga Nahdlatul Ulama melakukan semacam "pembangkangan" dengan tetap menjadikan Masyumi sebagai penyaluran aspirasi politik mereka.

Namun, pada proses selanjutnya terjadi sebuah perubahan mengejutkan di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1980-an dan 1990-an organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia menjadi perhatian media massa dan sering menjadi bahan kajian akademis ialah proses "kembali ke Khittah 1926". Nahdlatul Ulama menyatakan diri keluar dari politik praktis dan kembali menjadi "*jam'iyyah diniyyah*", dan bukan lagi wadah politik. Dengan kata lain, sejak Muktamar Situbondo 1984 para kiai bebas berafiliasi dengan partai politik mana pun dan sejak itu para kiai menikmati enaknya kedekatan dengan pemerintah. Dengan itu, Nahdlatul Ulama tidak lagi "dicurigai" oleh pemerintah, segala aktifitasnya tidak lagi dilarang dan malah sebaliknya sering "difasilitasi".

Hal ini, setelah para ulama dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama melakukan koreksi, introspeksi dan refleksi terhadap perjalanan Nahdlatul Ulama selama ini, terutama perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam bidang politik praktis dan setelah dievaluasi untung-ruginya, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Nahdlatul Ulama harus kembali ke jati dirinya,

kembali menjadi *jam'iyyah diniyyah* (organisasi keagamaan) seperti ketika berdiri pada tahun 1926 yang kemudian populer dengan "kembali ke Khittah 1926" melepaskan diri dari ikatan-ikatan politik dengan partai politik manapun termasuk Partai Persatuan Pembangunan.

Nahdlatul Ulama selama ini dikenal sebagai organisasi keagamaan tradisional yang unik. Dalam perjalanan sejarahnya selama 92 tahun hingga kini telah melalui beberapa fase dengan menampilkan *performance* yang berbeda-beda. Apabila pada fase pertama lebih menampilkan gerakan keagamaan (*Islam Ahl-al-sunnah wa al-jama'ah*) dengan peran ulama-kiai pesantren sebagai pimpinan informalnya, dan fase kedua lebih melibatkan diri dalam gerakan politik praktis (partai politik) dengan para santri sebagai aktor politisi yang memainkan gerak politik strukturalnya, pada pasca khittah (fase ketiga) Nahdlatul Ulama terbawa arus ke arah *deparpolisasi/depolitisasi-formal* dengan gerakan politik-kulturalnya yang dimainkan oleh generasi pembaharu dengan dukungan karisma para ulamanya.

Namun, pelaksanaan gerakan politik kultural sebagai implementasi khittah ini mengundang problematika konflik internal yang melahirkan polarisasi aspirasi politik di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri, yang berakibat semakin lemahnya Partai Persatuan Pembangunan yang diidentifikasikan penyalur politik Islam, dan semakin kuatnya pemerintah dengan dominasi Golongan Karya yang berkolaborasi dengan tentara dan birokrat. Sementara itu, Nahdlatul Ulama sendiri tetap termarginalkan peran politiknya, kecuali kelonggaran gerak organisasi dan dakwah untuk pengembangan kultur keagamaannya (Daman, 2001).

Namun, pasca Orde Baru terdapat fenomena unik pada diri Nahdlatul Ulama dalam hal berpolitik. Perubahan peta sosial-politik era reformasi direspon Nahdlatul Ulama dengan mendirikan sebuah partai politik. Lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya, integralitas wadah penyaluran aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa lantas diklaim sebagai satu-satunya sayap politik resmi milik warga Nahdlatul Ulama (Ismail, 1999: 37).

Bila dicermati, tindakan para tokoh Nahdlatul Ulama ini mengindikasikan adanya kecenderungan perubahan sikap, orientasi dan bahkan perilaku politik (*political action*) pada diri elite Nahdlatul Ulama. Kalau selama ini perilaku politik Nahdlatul Ulama lebih bercorak kultural (*cultural oriented*) dengan fokus gerakan pada pembelaan dan

pemberdayaan masyarakat, kemudian berubah perilaku politik kian menampakkan wajahnya yang struktural (*structural oriented*).

Hal ini bisa dilihat bahwa perubahan perilaku politik Nahdlatul Ulama dari peran politik Nahdlatul Ulama yang independen dan oposan menjadi partisan, dan dari partai politik kerakyatan menjadi politik kekuasaan. Meskipun perilaku politik ini bersifat personal atau komunal dalam Nahdlatul Ulama sendiri bukan secara institusional yang melibatkan organisasi, tetapi dalam prakteknya susah dipisahkan antara keduanya. Karena tindakan personal atau kelompok yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama selalu mengusung simbol-simbol keorganisasian Nahdlatul Ulama, baik secara langsung maupun tidak langsung (Moesa, Jawa Pos, 2002).

Memang sekilas perilaku politik Nahdlatul Ulama ini dapat dikatakan kontra-produktif dengan pola perilaku politik Nahdlatul Ulama pasca Khittah, di mana Nahdlatul Ulama memutuskan untuk menarik diri dari percaturan politik praktis untuk kembali kepada garis perjuangan semula, yakni sebagai organisasi sosial-keagamaan. Kemudian juga aktifitas perpolitikan Nahdlatul Ulama banyak diorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*) dalam kerangka kontrol terhadap kekuasaan (*moral force*).

Namun demikian, tindakan Nahdlatul Ulama untuk turut membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa dan keterlibatan politik di dalam partai itu tidak serta merta dapat dijadikan dalih untuk menjustifikasi bahwa Nahdlatul Ulama telah berpolitik praktis dan mengingkari Khittah tersebut. Pada prinsipnya, bahwa hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa hanyalah bersifat moral, kultural, historis, aspiratif, bukan bersifat struktural. Pun ada garis demarkasi yang tegas antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa, relasi antar keduanya sesungguhnya seringkali tampak kabur ketika dihadapkan pada realitas perpolitikan yang ditunjukkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan warganya secara umum. Keterlibatan aktif para tokoh dan kader Nahdlatul Ulama dalam mendirikan dan mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa, pada taraf tertentu, dapat diartikan bahwa Nahdlatul Ulama mulai memasuki kembali *political sphere* dan tampak kian berorientasi kepada suatu upaya untuk kembali meminjam istilah Syamsudin Haris (1990: 41) "berjaya secara politik" sebagaimana pengalaman politik Nahdlatul Ulama pada era 1950-1970-an di mana Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi aktor

politik (*political actor*) yang secara langsung berkiprah dalam struktur perpolitikan negara.

Oleh karena itu, adanya perubahan strategi dan taktik dari suatu permainan (*game*) ke permainan (*game*) yang lain merupakan kewajaran, bahkan adakalanya menjadi keharusan apabila merupakan tuntutan pemenuhan kebutuhan, sepanjang hal itu dilakukan berdasarkan kaidah aturan main yang berlaku. Kapan suatu perubahan gerakan itu dilakukan sangat bergantung pada kenyataan di lapangan (fakta) disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik internal maupun eksternal, serta dengan mempertimbangkan aspek positif (keuntungan) dan negatif (kerugian) yang mungkin ditimbulkan. Perubahan politik Nahdlatul Ulama sebagai suatu keputusan politik merupakan hasil dari interaksi politik yang berkaitan dengan fakta, nilai, dan harapan-harapan masa depan (Lasswell, 1992: 261). Dalam (QS. 57:20) sesungguhnya di dunia yang dipahami sebagai suatu permainan, sementara (QS, 13: 11) berdasar ketentuan Ilahi, meniscayakan adanya perubahan yang dilakukan oleh kelompok umat manusia sendiri.

Lika-liku perubahan gerakan politik Nahdlatul Ulama selama ini berdasarkan kultur keagamaan yang dianutnya, terutama pada kaidah-kaidah *fighiyah* yang menjadi acuan dan berdasarkan fakta, nilai serta harapan-harapan pemenuhan kepentingannya. Oleh karena itu, konsistensi rasional dari gerakannya hanya dapat dipahami dalam konteks kultur keagamaannya dalam merespon problematika yang dihadapi. Dengan demikian, prospek masa depan peran politik Nahdlatul Ulama banyak tergantung pada kapabilitas dan aseptabilitas aktor dominan (pemimpinnya) dalam mengembangkan kultur keagamaan dan sumber daya manusia warga Nahdlatul Ulama untuk merespon masa depan kehidupan modern umat dan bangsa Indonesia. Hal yang juga menarik karena Nahdlatul Ulama mendasarkan langkah politiknya berdasarkan pemikiran dan kultur keagamaan yang dianut, yaitu "tradisi sunni".

Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum dan landasan otonomi daerah menjadi angin segar untuk mewujudkan demokratisasi di Kota Samarinda. Dalam perspektif politik, Undang-Undang tersebut secara eksplisit menunjukkan adanya perubahan paradigma manajemen politik dan pemerintahan, dari yang asalnya sentralistis menjadi desentralistis (Buchari, 2015: 3). Gema demokrasi yang melekat dalam politik otonomi

daerah merembes ke berbagai penjuru tanah air, demikian halnya di Kota Samarinda. Tentu saja, hal tersebut turut memberi warna baru dalam dinamika perpolitikan di Kota Samarinda, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung sehingga kehidupan politik di kota ini, terasa hingar-bingar dan semakin semarak.

Perubahan politik yang sedemikian rupa, Indonesia pasca Orde Baru telah mulai memasuki era liberalisasi politik menuju sistem politik yang demokratis, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dengan sistem pemilihan langsung. Perubahan dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut, telah mengubah bangunan dan dinamika demokrasi di tingkat lokal. Artinya, pemilihan kepala daerah secara langsung menandai popularitas paradigma demokrasi *partisipatoris* dan sekaligus surutnya popularitas paradigma demokrasi *representatif* (Buchari, 2015).

Demokrasi merupakan pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Ketika sistem dibentuk sedemikian rupa yang memungkinkan kompetisi yang *fair* untuk memperebutkan jabatan politik dan hasilnya harus diterima sebagai hasil dari proses demokrasi. Sehubungan dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia telah membawa konsekuensi perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk aspek politik, baik menyangkut ketatanegaraan maupun yang terkait dengan sistem kepartaian. Oleh karena itu, mulai juni 2005 terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pemilihan kepala daerah, yaitu dengan di berlakukannya pemilihan kepala daerah langsung. Hal itu, merupakan konsekuensi dari perubahan sistem Pemilihan Umum di Indonesia, yang semakin memberikan perluasan hak rakyat dalam memilih para wakil dan pemimpin mereka.

Munculnya pemilihan kepala daerah langsung ini merupakan proses perkembangan demokrasi dan demokratisasi di tanah air yang cukup menggembirakan. Melalui pelaksanaan otonomi daerah Pemilihan Kepala Daerah di jadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang mendukung proses demokrasi di daerah. Melalui Pemilihan Kepala Daerah, diharapkan akan lahir pemimpin baru yang memiliki komitmen

politik dengan segenap rakyat pemilih, serta mampu melakukan terobosan baru untuk membangun daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus balik demokrasi pada aras lokal. Kedudukan kepala daerah sebelumnya (rezim Orde Lama dan Orde Baru) ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Dengan demikian, pemilihan umum Wali kota dan Wakil Wali kota Samarinda tahun 2015 merupakan wujud kedaulatan masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik yang fundamental. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah pada era reformasi telah menimbulkan atmosfer baru terhadap budaya politik di Indonesia, terutama di Kota Samarinda.

Di gelarnya pemilihan kepala daerah secara langsung membawa dampak serius terhadap perilaku politik elite Nahdlatul Ulama di tingkat lokal. Para aktor politik elite Nahdlatul Ulama tiba-tiba mendapatkan arena bermain cukup luas untuk menyalurkan bakat politik mereka secara bebas. Tampilnya para kandidat calon kepala daerah di arena Pemilihan kepala Daerah langsung, pada akhirnya harus menyeret berbagai kekuatan elite lokal yang memiliki basis massa yang kuat.

Seiring dengan konstalasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang *legitimate* sebagai harapan dari *ending* transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah tahun 2015 secara serentak. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun semakin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Secara khusus pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah langsung senantiasa mengandung kultur *vested interest* (kepentingan pribadi) di kalangan elite. Khususnya elite Nahdlatul Ulama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik lokal. Para elite Nahdlatul Ulama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan karisma, yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah.

Perubahan pola perilaku elite dalam Nahdlatul Ulama mengalami fase yang dianggap krusial pada saat munculnya pemilihan kepala daerah langsung pasca orde baru. Para elite Nahdlatul Ulama khusus di Kota Samarinda tersedot energinya dalam meresponnya. Pemicu utamanya

adalah banyaknya elite Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari permainan politik.

Kasus-kasus pemilihan kepala daerah, (khusus Kota Samarinda) elite Nahdlatul Ulama banyak terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. Para calon kepala daerah sendiri, juga tak henti berupaya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai. Para elite Nahdlatul Ulama memperlihatkan bahwa nilai politiknya di hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekadar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Komunitas elite keagamaan ini, masih dipercaya mampu memberikan sumbangan signifikan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun perorangan.

Elite Nahdlatul Ulama Samarinda mencari dan memanfaatkan organisasi untuk tujuan jangka pendek sesuai dengan makna subjektif yang dimiliki elite yang berkuasa. Para elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan kepala daerah Kota Samarinda telah jauh masuk dalam pusaran liberalisasi politik. Elite Nahdlatul Ulama yang memilih terjun dalam permainan politik pragmatis ini membuat mereka terfragmentasi. Perebutan akses politik ini jelas kepentingan ekonomi pribadi ataupun golongan. Hasil kajian dan suvey lembaga-lembaga tepercaya mengungkapkan realitas faktual perubahan orientasi politik elite Nahdlatul Ulama semakin rasional dan pragmatis, khususnya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Oleh karena itu, jika elite Nahdlatul Ulama masih terjebak dalam pusaran liberalisasi politik, Nahdlatul Ulama tidak akan mengambil peran strategis dalam membangun peradaban bangsa ke depan. Sebaliknya, elite Nahdlatul Ulama cenderung hanya dimanfaatkan menjadi pengumpul suara (*votegetter*). Namun, perubahan nasib warga Nahdlatul Ulama tidak pernah terwujud meskipun calon kepala daerah mendapatkan suara mayoritas warga Nahdlatul Ulama.

Keterlibatan elite Nahdlatul Ulama dalam permainan politik dalam mendukung calon kepala daerah berpengaruh terhadap pilihan warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa aktifitas-aktifitas yang dilakukan elite Nahdlatul Ulama Samarinda lebih banyak bersentuhan dengan wilayah politik praktis. Hal ini, berimbas terhadap aktivitas Nahdlatul Ulama yang bersifat sosial-keagamaan mengalami penurunan. Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Realitas Sosial Mengenai Perilaku Elite Nahdlatul Ulama Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kota Samarinda)".

Dalam hal ini, kajian terfokus pada mengkaji perilaku atau tindakan politik (*political action*) elite Nahdlatul Ulama pada level mikro, yakni Nahdlatul Ulama Samarinda. Bagaimana perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada Pilkada di Kota Samarinda dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama pada Pilkada di Kota Samarinda.

Dengan demikian, kajian ini dapat menganalisis perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada Pilkada serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada Pilkada Kota Samarinda.

BAGIAN II

Konsep Elite Politik & Kekuasaan

Secara sederhana, elite diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat misalnya elite pendidikan, elite agama, dan elite organisasi. Namun, dalam perspektif sosiologi, elite itu lebih banyak ditujukan kepada elite politik (*political elite*). Menurut David Jarry dan Julia Jarry, asumsi teori elite yang membagi kaum elite dan rakyat jelata merupakan ciri yang tidak terelakkan dalam masyarakat modern yang kompleks di mana pun juga. Menurut mereka, asumsi yang mengatakan bahwa rakyat secara keseluruhan yang menjalankan pemerintahan adalah sesuatu yang keliru. Hal ini justru menggambarkan bagaimana posisi elite itu ditempatkan pada wilayah yang sungguh bermakna politik walaupun diakui munculnya elite-elite yang terspesialisasi dalam berbagai bidang kehidupan (David Jarry dan Julia Jarry dalam Jurdi, 2004: 20).

Di samping itu, para ilmuwan sosial telah memelopori dan mengetengahkan teori tentang elite, terutama dihubungkan dengan kehidupan politik kenegaraan atau berkait langsung dengan posisi sosial seseorang, baik dalam lingkup keagamaan maupun profesi lainnya. Istilah elite mulai digunakan pada abad ketujuh belas untuk menyebut barang

dagangan yang mempunyai keutamaan khusus (berkualitas tinggi). Kemudian, istilah elite digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang juga didasarkan pada posisi sosial yang tinggi seperti kesatuan militer yang utama dan kalangan bangsawan (Tom B. Bottomore dalam Kartodirdjo, 1990: 24). Sementara itu, istilah elite berasal dari bahasa latin, yaitu "*eligere*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*elite*", yang berarti memilih. Dalam pemakaian biasa, kata tersebut berarti "bagian yang menjadi pilihan" suatu bangsa, budaya, kelompok usia, dan orang-orang yang menduduki posisi sosial yang lebih tinggi (Jurdi, 2004: 20).

Teori-teori klasik tentang elite memberikan tekanan bahwa elite adalah sekelompok kecil yang mempunyai pengaruh besar atau kekuasaan politik dalam sebuah sistem politik. Mosca, dalam karya klasiknya *The Rulling Class*, mengemukakan hal itu sebagai berikut: Dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk, yaitu satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu (Sastroatmodjo, 1995: 147).

Sementara itu, pengertian tentang elite juga dikemukakan Mills, yaitu mereka yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik, membentuk kurang lebih elite kekuasaan yang terintegrasi dan terpadu yang keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat. Menurut Mills bahwa elite kekuasaan bukanlah suatu klik yang tertutup atau statis dengan seperangkat kebijaksanaan yang benar-benar terpadu (Johnson, 1986, 1974).

Vilfredo Pareto mendiskripsi pengertian elite dengan berbagai penuturan, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah bahwa bakat dan kemampuan setiap individu berbeda-beda dalam setiap lapisan masyarakat. Untuk itulah kemudian sering dikenal pengelompokan struktur sosial ke dalam dua kelompok. Pertama lapisan yang lebih rendah, yakni sekelompok massa yang tidak merupakan golongan elite yang mungkin berpengaruh juga dalam pemerintahan. Kedua lapisan yang lebih tinggi, yakni golongan elite yang terdiri dari elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah (Robert D. Putnam dalam Mas'oed, 1982: 71).

Keller (dalam Jurdi, 2004) juga mengemukakan konsep mengenai elite. Pertama-tama elite menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elite adalah minoritas yang efektif dan bertanggung jawab efektif melihat pelaksanaan kepentingan dengan perhatian kepada orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapan. Elite merupakan posisi di dalam masyarakat yang berada di puncak kekuasaan, baik organisasi sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan atau memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu atau struktur sosial terpenting, yaitu posisi teratas dalam organisasi ekonomi, pemerintahan, dan sebagainya. Seiring dengan itu, Nazaruddin Syamsuddin mengemukakan pengertian elite. Menurutnya elite adalah tokoh-tokoh puncak di antara para pelaku yang melaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Semua elite yang ikut serta dalam memengaruhi proses politik dan memformulasikan kepentingannya dapat disebut sebagai elite (Jurdi, 2004: 23).

Berkaitan dengan konsep elite, muncul anggapan yang mengatakan bahwa kelas menengah merupakan bagian dari komunitas elite karena memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi dan politik dalam masyarakat. Namun, Mills melihat bahwa elite kekuasaan (*power elite*) adalah mereka yang berbeda jauh dengan kelas menengah yang berada dalam posisi yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Bahkan, varian elite yang ada dalam masyarakat modern, dianggapnya sebagai sebuah komponen sosial yang memiliki asal usul yang sama (Poloma, 2000: 340) sehingga sulit untuk disamakan dengan kelas menengah yang secara umum muncul dari berbagai kelompok sosial politik yang beragam dalam masyarakat (Jurdi, 2004: 22).

Oleh karena itu, dalam kajian elite setidaknya ada dua perspektif penting, pertama perspektif pluralis dan kedua perspektif Marxian. Kaum pluralis, baik yang diklasifikasikan sebagai pluralis klasik seperti Laswell, Truman dan Dahl, maupun neo-pluralis seperti C. Wright Mills dan G. William Domhoff menganggap bahwa di setiap masyarakat keputusan-keputusan penting dilakukan oleh sekelompok kecil yang disebut kaum elite. Kaum pluralis menolak anggapan kalangan Marxis yang memandang elite sebagai kelompok kepentingan kelas sosial ekonomi. Elite tidak lain adalah kelompok kepentingan yang berhimpun atas dasar berbagai kesamaan kultural dan tidak berkaitan dengan perjuangan kelas. Kekuasaan yang diperoleh elite kemudian sebagai hasil dari proses bargaining secara terus-menerus antar kelompok kepentingan, seperti organisasi pengusaha,

perdagangan, partai, kelompok etnis, mahasiswa, institusi perempuan, maupun kelompok agama. Dalam negara yang demokratis, kelas atau elite penguasa terdiri atas aliansi diam-diam antara penguasa dan yang dikuasai. Tujuan elite atau kelas penguasa tidak lain adalah memuaskan kepentingan klien mereka (Maliki, 2004: 15).

Sementara itu, para eksponen Marxian menolak kalau masyarakat hanya dilihat dari pembagian kelompok kepentingan. Pengelompokan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari praktek hubungan produksi, yang menimbulkan dialektika antara mereka yang menguasai dan yang tidak menguasai alat produksi. Dalam konteks ini maka kekuasaan akan selalu berhubungan dengan modal produksi, ideologi, kelas dan perjuangan kelas yang berlangsung secara dialektik, kelas yang menguasai berhadapan dengan kelas yang tidak menguasai alat produksi. Dalam perjuangan kelas, pada saatnya akan dimenangkan oleh kelas proletar, kelas yang tidak menguasai alat produksi, yang setelah mengambilalih kekuasaan dari tangan kelas borjuis, mereka akan membangun masyarakat tanpa kelas (Maliki, 2004).

Sudah menjadi karakteristik elite penguasa untuk mencari dan mempertahankan kekuasaannya. Hal itu terjadi, berkait dengan kepentingan "informal" masing-masing elite yang berbeda. Meski secara "informal" saling berhadapan, namun elite politik sesungguhnya tengah memperjuangkan kepentingan "formal" yang sama, yakni seperti dikemukakan oleh Mills, semua elite mengarahkan energinya untuk kepentingan yang sama yakni berupaya mempertahankan kekuasaan, dan lalu mempertahankan setiap kebijakan-kebijakan mereka. Untuk itulah maka selalu ada upaya elite menjadikan sejumlah institusi pembentukan kesadaran seperti lembaga pendidikan, pengetahuan dan bahkan juga agama, untuk mendukung kepentingan mereka (Maliki, 2004).

Namun demikian, dalam setiap komunitas kehadiran seorang elite pemimpin merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak karena setiap masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi panutan bagi mereka dalam proses penciptaan keteraturan dan pola interaksi dalam komunitasnya. Suzanna Keller, misalnya, mengatakan bahwa kepemimpinan sosial adalah salah satu kekuatan yang menyangga masyarakat teratur (Jurdi, 2004: 22). Dengan demikian, untuk studi ini akan dilihat konsep elite pada aspek perilaku politik elite. Studi tentang perilaku politik bisa terfokus pada individu-individu sebagai aktor yang berperan.

Bisa juga dilakukan terhadap kelompok atau lembaga (organisasi) baik keagamaan, sosial, politik maupum ekonomi.

Oleh karena itu, perilaku politik diartikan sebagai tindakan untuk mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat (*otorotative*) bagi suatu kelompok ataupun masyarakat. Tindakan tersebut bermakna usaha untuk membangun kesadaran kolektif. Perilaku atau tindakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya semacam norma dan nilai yang kemudian memengaruhi motivasi untuk membentuk sikap dan mendorong tindakan sebagai suatu perilaku politik (Jurdi, 2004: 29).

Politik sebagai salah satu bentuk interaksi antara manusia baik secara individual maupun secara kelompok yang berpengaruh pada gejala politik. Proses politik adalah proses interaksi antara individu dan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang menghasilkan produk politik. Di mana mekanisme interaksi bergantung pada penerapan sistem politik yang diberlakukan di dalam struktur politik dalam bentuk musyawarah mufakat, secara otoriter, melalui pemilu atau kudeta (Setiadi dan Kolip, 2013 : 130).

Dalam pengertian Miriam Budiardjo, politik sebagai usaha menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga dan membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Politik juga dipandang sebagai ikhtiar manusia menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Politik diposisikan sebagai ruang bersama di mana setiap individu berjuang meningkatkan bakat dan kehidupannya. Oleh karena itu, ketika seorang ingin dan berjuang meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumberdaya yang tersedia, ketika mereka berupaya memengaruhi orang lain untuk menerima pandangan dan keinginannya, mereka akan melibatkan diri pada aktivitas politik (Sandi, 2016).

Politik merupakan suatu relasi dengan pemerintahan, Undang-Undang, hukum, kebijakan atau *policy*. Harold J. Laski (dalam Budiardjo, 1993) mendefenisikan politik sebagai "*who gets what, when and how*" yang artinya *siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana*. Siapa bisa merujuk pada sekelompok orang yang memberikan suara dalam pemilu, para fungsionaris memberikan visi dan misi politik partainya atau para elite politik sedang membicarakan. Pada kegiatan politik itu para pihak melakukan interaksi politik.

Di samping itu, politik bukan hanya terkait dengan negara belaka, sebab konflik-konflik, ketentuan, ketetapan, gejala dan masalah-masalah sosial tertentu akan dapat bersifat politis atau menjadi masalah politis yang oleh Deutsch (dalam Sandi, 2016) disebut "politisasi". Politisasi ialah kegiatan membuat segala sesuatu menjadi politik atau kegiatan penyadaran aspek-aspek politis dari bermacam-macam masalah hidup serta masalah sosial. Suatu masalah sosial akan berubah menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkan satu persoalan sosial merupakan suatu aktivitas politik, demikian pula upaya mengganjal atau menentang upaya pemerintah terlibat dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah juga disebut sebagai aktivitas politik.

Sementara itu, teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Teori politik adalah bidang yang abstrak. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas: (a) tujuan dari kegiatan politik, (b) cara-cara mencapai tujuan itu, (c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan (d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu (Budiardjo, 1993: 30). Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory*, dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok tidak bersifat mutlak: (A). Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (*norms for political behavior*). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (value) maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya. (B) Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan *nonvaluational* atau *value free* (bebas-nilai). Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif. Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi (Budiardjo, 1993).

Teori-teori dalam kelompok (A) di atas dapat dibagi lagi dalam tiga golongan, yaitu (a) Filsafat Politik (*political philosophy*) mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam, semesta (universe) dengan sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti

metafisika dan epistemologi harus dipecahkan dahulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya menurut filsuf Yunani Plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai "kehidupan yang baik" (*good life*) yang dicita-citakan olehnya. (b) Teori politik sistematis (*systematic political theory*), teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, akan tetapi mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Misalnya, dalam abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. (c) Ideologi Politik (*political ideology*), teori ini adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu "*Weltanschauun*g", yang dimiliki seorang atau kelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Oleh karena itu, nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata-tertib sosial politik yang ideal (Budiardjo, 1993: 32).

Dalam klasifikasi ini suatu teori politik yang etis tentulah masuk dalam kelompok A, yaitu *valuational theory* (teori yang berorientasi pada nilai tertentu). Sejauh mana nilai-nilai itu mengandung unsur etika adalah soal lain. Mengacu pada pendapat Moore tentang perbuatan yang benar secara etis (bermoral) adalah perbuatan yang menghasilkan sebanyak mungkin realitas yang baik. Seperti kata "baik", begitu pula kata "benar" tidak dapat didefenisikan. Namun, kita dapat menentukan perbuatan mana yang "benar". Perilaku yang benar adalah selalu berperilaku yang menunjang kebaikan (Magnis dalam Nurtjahjo, 2008:59). Jika disambungkan dengan teori politik yang etis, mestilah suatu teori politik yang dapat menunjang terciptanya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat (Nurdjahjo, 2008).

Namun, John G. Gunnel menjelaskan bahwa teori politik sekarang amat sedikit hubungannya maupun sumbangannya terhadap disiplin

induknya, yaitu ilmu politik. Semenjak awal 1970-an, sub bidang teori politik dalam ilmu politik, telah lebih banyak menumpahkan perhatian terhadap masalah-masalah yang lebih luas dan lebih otonom. Dengan demikian, teori politik telah menciptakan struktur kelembagaan tersendiri yang tampak menjauh dari induknya, yakni ilmu politik itu sendiri (Azhar, 1996: 9).

Oleh karena itu, teori politik yang bagaimanakah yang menunjang kebaikan itu, yang utama adalah teori politik yang tidak menabrak harkat dan martabat manusia, serta dapat mewujudkan keadilan sosial yang luas bagi warga negara. Hal ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya pemerintahan yang senantiasa dikontrol oleh rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana pemerintahannya merupakan hasil dari pemilihan umum yang bebas dan jujur (Nurdjahjo, 2008: 59).

Kajian politik adalah kajian tentang pengaruh dan orang yang berpengaruh. Ilmu politik menyatakan syarat, sedangkan filsafat politik membenarkan pilihan. Orang yang berpengaruh adalah orang yang memperoleh banyak dari apa yang dapat diperoleh. Nilai-nilai yang ada dapat digolongkan ke dalam golongan *rasa hormat*, *pendapatan*, *keamanan*. Orang-orang yang memperoleh pada umumnya adalah *elite*, sedangkan yang lain-lain adalah *massa* (Zainuddin, 1992: 107). Oleh karena itu, konsep kekuasaan di dalam ilmu politik adalah suatu konsep yang banyak dibahas. Sebabnya adalah karena konsep ini dianggap "Mempunyai sifat yang sangat mendasar dalam ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik khususnya. Malahan, pada suatu ketika politik (*politics*) dianggap tidak lain dari masalah kekuasaan belaka. Dan dalam keadaan bagaimana pun juga "Kekuasaan tetap merupakan gejala yang sangat sentral dalam ilmu politik dan diperdebatkan dengan hangat. Perbedaan pandangan tentang hakikat kekuasaan itu di kalangan para sarjana agaknya adalah suatu hal yang lumrah. Kendati demikian, sekalipun ada banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kekuasaan, akan tetapi agaknya ada satu inti yang tampak dalam semua perumusan itu, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan (Zainuddin, 1992).

Oleh karena itu, kekuasaan otoritatif akan dapat bekerja secara efektif dalam suatu sistem yang disebut sistem politik. Sistem politik adalah salah

satu sistem dari berbagai sistem yang ada di masyarakat, di antaranya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem hukum. Menurut David Easton (dalam Sahid, 2011: 78) sistem politik ada beberapa unsur sebagai berikut: Unsur utama adalah *input*, proses, dan *output*. *Input* terdiri atas tuntutan dan dukungan dan *output* berupa keputusan atau kebijakan. Sebelum menjadi keputusan atau kebijakan, *input* diolah terlebih dahulu melalui proses politik.

Menurut David Easton, sistem politik dapat digambarkan melalui diagram seperti tampak dalam gambar berikut ini:
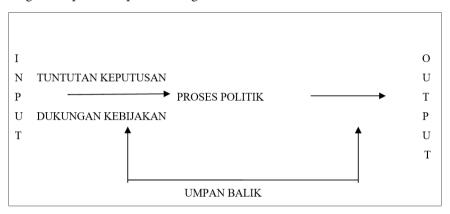
Gambar 2.1: Model Sistem Politik Menurut David Easton

Sumber: Diadaptasi dari karya David Easton yang dikutip dalam buku "Perbandingan Sistem Politik" karangan Mochtar Mas'oed dan Colin Mc Andrew (Sahid: 2011:78).

Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem yang lain. Menurut David Easton (dalam Mas'oed yang dikutip Sahid, 2011), ada beberapa ciri utama sistem politik, yaitu sebagai berikut. (1) Ciri-ciri identifikasi, yaitu; a) unit-unit sistem politik adalah unsur-unsur yang membentuk sistem politik, yaitu tindakan-tindakan politik yang membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik, b) Batas-batas, yaitu sebagai sistem yang berada dalam masyarakat maka sistem politik tidak sendirian, dia akan berdampingan atau sering kali berinteraksi dengan sistem-sistem lain sebagai lingkungan luar. Oleh karena itu, untuk membedakan sistem politik dari yang lain maka perlu ada batas-batasnya. Adapun yang menjadi batas adalah segala tindakan yang langsung berhubungan dengan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Tindakan-tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk sistem politik, melainkan sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem. (2) Adanya *input* dan *output,* yaitu

setiap sistem politik pasti menghasilkan keputusan-keputusan penting bagi masyarakat yang disebut *output*. Untuk menghasilkan *output*, sistem politik membutuhkan *input* secara berkelanjutan. Sistem politik akan berfungsi jika *input* secara *ajeg* untuk diolah menjadi *output*. Dengan demikian, ciri utama sistem politik yang kedua adalah adanya *input* dan *output*. (3) Adanya diferensiasi dalam sistem, yaitu tidaklah mungkin semua *input* yang bermacam-macam itu hanya ditangani oleh satu orang atau satu kelompok orang saja yang ada dalam sistem, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Di dalam sistem tentu berbagai macam *input* itu dikerjakan oleh berbagai kelompok atau struktur agar sistem dapat bekerja dengan baik. Kelompok-kelompok atau struktur tersebut bekerja sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensinya masing-masing, inilah yang disebut diferensiasi dalam sistem, (4) Integrasi dalam sistem, yaitu sebuah sistem politik berfungsi untuk mengolah *input* menjadi *output*. Walaupun secara riil ada diferensiasi dalam sistem, namun untuk berjalannya sistem, perlu adanya integrasi atau keterpaduan antar berbagai struktur atau kelompok yang ada dalam sistem. Keterpaduan dalam sistem akan mengakibatkan malfungsi atau disfungsi sistem, bahkan bisa mengakibatkan kehancuran sistem itu sendiri. Dengan demikian, dalam sebuah sistem berstruktur harus ada integrasi yang mendorong dan menguatkan sistem untuk bekerja secara optimal.

Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun di antara ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Beberapa diantaranya bahkan menganjurkan agar konsep kekuasaan ditinggalkan karena bersifat kabur, dan berkonotasi emosional. Namun, tampaknya politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral. Oleh karena itu, berikut ini diuraikan konsep kekuasaan dengan cara menempatkan dalam konteks proses politik secara lebih proposional tanpa berpretensi untuk menjadikan kekuasaan sebagai satu-satunya konsep ilmu politik. Sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (power) sebagai berikut; (a) *Influence,* ialah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. (b) *Persuasion*, ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. (c) *Manipulasi*, penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya, sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan.(d) *Coercion*, ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan

berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi, seperti penangkapan oleh polisi, diinterogasi oleh militer, atau melapor secara reguler kepada pihak militer. (e) *Force*, ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu (Surbakti, 1992: 57).

Kekuasaan kadang-kadang dikemukakan sebagai pengaruh. Adakalanya kedua istilah itu dianggap memiliki pengertian tersendiri yang berbeda intensitasnya. Contoh dari perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh dapat kita lihat dari tulisan seperti: (1) pengaruh koersif, yaitu pengaruh yang berdasarkan ancaman atau harapan memperoleh hukuman atau kerugian yang sangat besar, terutama hukuman badan, siksaan, hukuman penjara, dan hukuman mati. (2) pengaruh terandal, yaitu pengaruh di mana kemungkinan untuk dipatuhi tinggi sekali yang kadang-kadang dinamakan kekuasaan (Dahl, 1963: 51). Tetapi, adakalanya keduanya dianggap menunjuk kepada satu pengertian sehingga tempatnya dapat saling dipertukarkan (Zainuddin, 1992).

Sementara itu, Dahl sendiri tampak lebih senang untuk tidak membedakan antara kekuasaan, pengaruh serta istilah-istilah lain yang mirip dengan itu. Ia menyebutkan istilah-istilah seperti *power*, *influence*, *authority and rule*, dan menamakan semuanya itu "istilah kekuasaan" (Zainuddin, 1992: 107).

Di samping itu, konsep dan teori *Powercube* (Kubus Kekuasaan) John Gaventa dikenal tiga macam bentuk kekuasaan: kekuasaan yang terlihat, kekuasaan yang tidak terlihat, dan kekuasaan yang tersembunyi.

Kekuasaan yang Terlihat *(Visible Power)*

Bentuk Kekuasaan Yang Terlihat (*Visible Forms of Power*) merupakan wujud kontestasi kepentingan yang terlihat di ruang-ruang publik atau lembaga pembuat kebijakan. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik ataupun organisasi-organisasi massa lain adalah contoh bentuk-bentuk kekuasaan yang terlihat. Lembaga-lembaga tersebut merupakan tempat memproduksi berbagai macam kebijakan. Sebagai bentuk pembuatan kebijakan (*decision making*), di sana, terdapat aktor-aktor pembuat kebijakan beserta kepentingan-kepentingannya. Lembaga,

aktor, dan kepentingan merupakan unit-unit penyusun bentuk kekuasaan yang terlihat (Halim, 2014: 55).

Oleh karena itu, *visible power* merupakan representasi kekuasaan yang terlihat dalam bentuk kontestasi antar aktor kekuasaan, baik di daerah maupun di pusat. Daerah menjadi ajang kontestasi atau ruang pertarungan kekuasaan, terlebih ketika isu desentralisasi kekuasaan dihembuskan. Di saat musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tiba maka gegap gempita politik di daerah menjadi fenomena yang menarik perhatian. Para calon dengan seluruh modal yang berupa uang, karisma, intelektualitas, dan pengaruh saling bertarung merebut simpati dan dukungan massa. Pada saat yang sama, massa bergerak dan menjatuhkan pilihan pada masing-masing calon karena berada di bawah kendali pengaruh dan keinginan para calon sendiri. Kemampuan menggerakkan massa adalah bentuk kekuasaan yang terlihat, yang dimiliki oleh para calon, yang ditunjukkan di ruang publik (Halim, 2014).

Ada dua asumsi yang melandasi kekuasaan yang terlihat (*visible power*). *Pertama*, dalam konsep pendekatan *visible power* berlaku sebuah asumsi bahwa akses terhadap arena pembuatan kebijakan (*decision making arenas*) relatif terbuka bagi kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan. *Kedua*, dengan melihat siapa yang berpartisipasi dalam kontestasi dan pergulatan kepentingan, hasil akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pihak yang menang adalah pihak yang aspirasi dan kepentingannya diakomodir untuk ditetapkan sebagai kebijakan untuk umum. Sebaliknya, pihak yang kalah adalah pihak yang aspirasi dan kepentingannya tersingkir sehingga tidak bisa masuk dalam kebijakan untuk umum. Dengan demikian, fenomena *menang-kalah* ini mengindikasikan adanya kekuasaan dalam sebuah lembaga pembuat kebijakan (Halim, 2014).

Kekuasaan yang Tersembunyi *(Hidden Power)*

Kekuasaan tersembunyi bagi Gaventa (dalam Halim, 2014: 61), merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan *privilage* dari kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kepentingan maka diciptakan halangan-halangan dan gangguan-gangguan yang bisa membendung partisipasi kritis rakyat.

Dalam konteks kekuasaan tersembunyi di daerah, para aktor dan elite politik yang paling dominan dan menentukan adalah elite pemerintah dan elite parpol yang sedang berkuasa. Melalui *Hidden Power*, alternatif-alternatif politik menjadi terbatas. Masyarakat atau rakyat semakin diasingkan dan dipisahkan (*excluded*) dari lingkaran kekuasaan. *Hidden Power* menjadi alat penguasa untuk mempertahankan *status quo*-nya. Contoh, politik dinasti bisa langgeng, baik di dalam struktur kekuasaan maupun di dalam partai politik, tak lepas dari praktik *hidden power* ini. Untuk itulah, strategi melawan *Hidden Power* adalah mendidik rakyat untuk bersuara kritis, memobilisasi massa untuk meruntuhkan halangan-halangan yang diciptakan oleh pihak penguasa, dan menggunakan media untuk melakukan perlawanan terhadap isu-isu yang dibentuk oleh para penguasa (Halim, 2014).

Kekuasaan yang Tidak Terlihat *(Invisible Power)*

Kekuasaan tidak terlihat (*Invisible Power*), pada prinsipnya adalah kelanjutan dari Kekuasaan Tersembunyi (*Hidden Power*). Hanya saja, keduanya memiliki sisi perbedaan. *Hidden Power*, kesadaran masyarakat atau rakyat masih mungkin muncul untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, semisal melalui investigasi di luar struktur kekuasaan. Namun, di dalam kendali *Invisible Power*, masyarakat sama sekali kehilangan kesadaran karena terbius oleh nilai-nilai dan ideologi penguasa. Dengan dan melalui ideologi, penguasa bisa mengelabui dan menghegemoni kesadaran masyarakat sehingga mereka terbuai dan terkendali tanpa disadari. Ideologi dan nilai-nilai yang secara halus membius dan merasuki kesadaran masyarakat, merupakan Kekuasaan Yang tak Terlihat (*invisible power*) (Halim, 2014: 67).

Oleh karena itu, dalam praktik *invisible power* di daerah, keterlibatan para aktor dan elite politik adalah keniscayaan. Pihak yang paling menonjol dalam praktik kekuasaan jenis ini adalah elite agama, elite masyarakat dan elite parpol. Alasannya, nilai-nilai agama dan tradisi lokal masyarakat masih menjadi faktor kuat untuk ' mengelabui masyarakat di daerah. Tentu saja, praktik *invisible power* lebih berbasis pada hegemoni dan ideologisnya karena ia terkait dengan perilaku pemilih (*voting behavior*) sebagai salah satu pintu masuk merebut hati rakyat (Agustinus, 2009: 187).

Di samping itu, ada pula praktik *invisible power* yang masih terjadi di daerah-daerah walaupun nyaris tidak tersentuh wacana publik, yaitu praktik *magic* atau pendukunan. Sebagaimana ideologi, kekuatan *magic* atau mistik bekerja layaknya ideologi yang rasional. Mistik merupakan kekuatan halus yang bisa memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Politik di tingkat desa kerap melibatkan cara-cara pendukunan, di mana para calon yang akan bersaing sedikit banyak percaya pada peran komunitas dukun. Satu hal yang penting lain yang juga adalah kekuatan para *blater*, yaitu "mafia-mafia" kampung. Dalam realitasnya, blater adalah kekuatan yang kerap dimanfaatkan oleh para kandidat yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat (Agustinus, 2009).

Dengan demikian, modus operandi praktik kekuasaan tak terlihat ini adalah melalui internalisasi ketidakberdayaan masyarakat. Masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuasaan dicekoki nilai-nilai ideologi sehingga mereka pun turut tenggelam dalam ideologi tersebut. Oleh karena itu, mengingat *invisible power* bergerak di balik kesadaran dan beroperasi untuk mengacaukan kritisisme maka strategi melawan praktik penggunaan *invisible power* adalah dengan cara menggedor dan membangkitkan kesadaran masyarakat. Kritisisme harus ditumbuhkan sehingga masyarakat tidak mudah terhipnotis oleh ideologi pragmatis yang hanya menguntungkan kepentingan para kandidat yang mencalonkan diri (Halim, 2014:71).

BAGIAN III

Politik dan Nahdlatul Ulama

Partisipasi Poltik

Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Adams (dalam Hariyanto, 2012: 141) partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi ialah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikut sertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Muhammad, 2012 :185).

Dalam ilmu politik partisipasi diartikan sebagai upaya warga masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok, untuk ikut serta memengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara. Sementara itu, definisi umum tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Miriam Budiardjo,1993:183).

Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikatornya. Artinya, suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan (Sahid, 2011: 175). Oleh karena itu, masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkannya (Sahid, 2011).

Partisipasi politik dipahami sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut dan memengaruhi hidupnya. Asumsi yang mendasari partisipasi politik adalah bahwa yang paling tahu tentang kebutuhan dan apa yang paling baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Partisipasi politik, adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Dengan kata lain, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka (Hariyanto, 2012 :141).

Menurut Budiardjo (1993 : 3), partisipasi poltik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Oleh karena itu, dalam aspek sosiologi politik lebih banyak rakyat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik rakyat berhasil. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah maka menunjukkan indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi pada suatu negara kurang baik.

Dengan demikian, secara umum definisi tersebut mengarah kepada satu pemahaman yang berorientasi kepada bentuk keterlibatan seseorang atau kelompok yang dilakukan secara sukarela, legal atau ilegal, spontan atau direncanakan, damai atau dengan cara kekerasan untuk sebuah proses menyuarakan kepentingan masyarakat agar diperhatikan dan diperjuangkan hingga menjadi keputusan yang mengikat, hingga pelaksanaan dari sebuah keputusan tersebut secara sungguh-sungguh dan konsekuen (Hidajah, 2010: 65). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses politik bersifat menyeluruh (*komprehensif*), dari hulu hingga hilir, sampai ke hulu kembali. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat itu harus dilaksanakan sejak proses awal menjadi anggota atau pendukung sebuah kelompok kepentingan tertentu, mengikuti proses pemilihan hingga terpilihnya seseorang yang mempresentasikan masyarakat, dan ikut berperan aktif dalam kerseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sebuah kebijakan (Hidajah, 2010).

Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (dalam Muhammad, 2012) mendefenisikan partisipasi politik sebagai kegiatan privat warga negara (*privat citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Di samping itu, ahli yang lain mendefinisikan partisipasi politik mencakup banyak orientasi para warga negara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata.

Menurut Soekanto (2005 : 63), berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor yang dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung, antara lain:

1. Faktor imitasi, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat

mendorong seseorang mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku, namun imitasi mungkin pula menyebabkan terjadinya hal-hal negatif, misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Selain itu, imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan pengembangan daya kreasi seseorang;

2. Faktor sugesti, berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Proses ini hampir sama dengan imitasi, akan tetapi titik tolaknya berbeda. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi yang dapat menghambat daya berfikirnya secara rasional;
3. Faktor identifikasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan perihal lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi karena kepribadian seseorang dapat berbentuk atas dasar proses ini;
4. Faktor simpati, merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Dalam proses ini, perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain untuk bekerja sama dengannya.

Selanjutnya, Soekanto (2005 : 64) mengatakan bahwa suatu interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 2 (dua) syarat, antara lain adanya kontak sosial (*social contact*) dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu (1) antara perorangan yang terjadi melalui proses sosialisasi (*socialization*), (2) antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan (3) antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*).

Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan alternatif pemecahan terhadap masalah yang muncul, mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan nilai-nilainya. Dalam teori ini, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan (Mujani, 2007: 254). Menurut Kase dan Marsh (dalam Mujani, 2007) bahwa partisipasi politik

terkait dengan unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, kontrol, responsiveness (kecepatan memberi respons), fleksibilitas, legitimasi, dan resolusi konflik.

Teori elitis atau revesionis tentang demokrasi yang dikembangkan, antara lain oleh Schumpeter (1942), Dahl (1956, 1961), Huntington (1975, 1968), dan Lipset (1981) pada dasarnya mengklaim bahwa gagasan tentang pemerintahan aktual oleh rakyat dalam teori liberal klasik adalah gagasan yang tidak realistis. Kelompok elitis ini berargumen bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan urusan elite politik. Demokrasi merupakan prosedur bagi pertarungan di antara para elite untuk memperebutkan posisi penting dalam pemerintahan. Beberapa teoretikus tentang sifat elitis demokrasi lebih jauh berargumen bahwa masyarakat umum, dibandingkan dengan para elite, tidak mampu berperilku sebagai demokrat pada situasi politik yang konkret. Para elitelah yang merupakan penjaga sejati nyala api demokrasi (Mujani, 2007: 255). Karena politik dilakukan sebagian besarnya oleh elite, partisipasi politik tidaklah sepenting seperti diasumsikan teori klasik tentang demokrasi (Mujani, 2007).

Menurut Gabriel Almond (dalam Sahid, 2011), partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan, di mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer. Peran mereka sebagai agregator politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Menurutnya, negara besar memiliki bangunan organisasi yang telah terspesialisasi dalam menyalurkan bentuk agregasi politik berikut kebijakan terkait menghasilkan partai politik.

Sementara itu, menurut Gaventa dan Valderama (dalam Sahid, 2011) bahwa partisipasi politik melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara. Karena itu, partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung. Selanjutnya, partisipasi politik diungkapkan dalam tindakan individu atau kelompok terorganisasi untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk memengaruhi wakil-wakil pemerintah. Dengan demikian, Gaventa dan Valderama lebih melihat partisipasi politik sebagai orientasi pada 'memengaruhi' dan 'mendudukkan wakil-wakil rakyat' dalam lembaga pemerintahan daripada 'partisipasi aktif' dan 'langsung

‘ dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri. Sedangkan, Huntington dan Nelson (1994: 6) memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut, Huntington dan Nelson memberi batasan partisipasi politik pada beberapa hal berikut:

Pertama, partisipasi politik yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini komponen subjektif seperti orientasi-orientasi politik yang meliputi pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, dan persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Hal-hal, seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik, tetapi terpisah dari tindakan politik. *Kedua*, subjek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara preman (*private citizen*) atau lebih tepatnya, orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik, seperti pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon-calon politikus, *lobby* profesional. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (*evocational*) dan bersifat sekunder saja dibandingkan dengan peranan-peranan sosial lainnya.

Ketiga, kegiatan apa yang disebut partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksud untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik. Sasarannya adalah untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, mengubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan main politiknya. Tujuan-tujuan itulah yang menjadi batasan partisipasi politik terlepas apakah itu legal atau tidak. Karena itu, aktivitas seperti misalnya protes-protes, huru hara, demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik. *Keempat*, partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang memengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan ini mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal. *Kelima*, partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik yang dilakukan atas kemauan

sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan adalah karena keinginan dan digerakkan orang lain.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (1997: 123), partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun, kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat jalan.

Selain definisi tersebut, partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan memengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan massa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya. Mobilisasi politik tampak antara lain dalam upaya pengerahan sejumlah besar orang oleh golongan elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato politik dalam suatu rapat umum, atau dalam upaya menggerakkan sejumlah besar orang untuk mengacaukan suatu kedutaan asing. Oleh karena itu, partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Dan konsep partisipasi politik pun mencakup apa yang disebut apatisme politik, alienasi politik, dan kekerasan politik. Perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya. Termasuk di sini, motivasi untuk menduduki jabatan puncak dalam bidang politik (Maran, 2007: 147).

Partisipasi politik sebagai sebuah aktivitas, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik. Armstein S.R melihat bahwa partsipasi politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Lebih perinci, ia menjelaskan faktor politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Sedangkan menurut Frank Lindenfeld, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutanpun akan menjadi apatis.

Menurutnya, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi (Sahid, 2011:185).

Partisipasi politik, dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan kritik terhadap suatu kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin atau pemerintahan. Sedangkan, partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah. Selain itu, ada model partisipasi selain keduanya, yaitu golongan putih (Hariyanto, 2012 : 142).

Menurut Ramlan Surbakti (1992) dua variabel penting yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama*, aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Di samping itu, menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (dalam Sahid, 2011) faktor lain yang juga sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah budaya kewargaan (*civic culture*). Bahkan, faktor ini merupakan sesuatu yang menjadi titik inti tumbuhnya partisipasi politik warga. Budaya kewargaan (*civic culture*) pada hakikatnya merupakan cermin dari tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokratis dalam masyarakat yang baik (*good citizen*).

Oleh karena itu, menurut Arbi Sanit (dalam Sahid, 2011) dalam konteks Indonesia menyebutkan lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia. *Pertama*, adanya kebebasan berkempetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik. *Kedua*, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. *Ketiga*, adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur. *Keempat*, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupaya kekayaan dalam masyarakat. *Kelima*, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Sementara itu. faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah.

Faktor tersebut dipengaruhi faktor lain di antaranya faktor sosial, status ekonomi, aplikasi politik orang dan pengalaman berorganisasi. Oleh karerna itu, dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud dengan agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa. Adapun yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat (Muhammad, 2012 : 187).

Selanjutnya, menurut model ini ada 4 faktor yang memengaruhi perilaku politik seorang aktor politik:

1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung, yang memengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian, yang tecermin dalam sikap individu.
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung, berupa situasi (Muhammad, 2012).

Perilaku politik warga negara dalam bentuk partisipasi politik oleh Milbrath dijelaskan dalam kaitannya dengan empat faktor utama. *Pertama*, sejauh mana orang menerima perangsang politik. *Kedua*, karakteristik pribadi seseorang. *Ketiga*, karakteristik sosial seseorang dan *empat* ialah keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang dapat menemukan dirinya sendiri (Sastroatmodjo, 1995 : 15).

Politik Perspektif Nahdlatul Ulama

Akar historis perjuangan Nahdlatul Ulama, yang diwarnai dengan suka-duka masa pemerintahan orde lama maupun orde baru yang sama-sama menempatkan Nahdlatul Ulama pada kondisi yang kurang menguntungkan, merupakan momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk menampakkan eksistensi sebagai organisasi besar. Momentum penting benar-benar dimanfaatkan Nahdlatul Ulama baik ketika menjadi organisasi keagamaan, menjadi partai politik berikut fusinya dengan

Partai Persatuan Pembangunan maupun saat kembali menjadi organisasi keagamaan setelah menyatakan kembali ke khittah 1926.

Dinamika perjuangan Nahdlatul Ulama bersinggungan dengan kepentingan keagamaan dan kenegaraan dapat ditelusuri mulai dari rekaman peristiwa sebelum Indonesia merdeka sampai era transisi. Kontribusi perjuangan pollitik Nahdlatul Ulama sebelum merdeka, dapat dijadikan pertimbangan bagi Nahdlatul Ulama memulai karier politik. Karena sejak awal kemerdekaan, ulama Nahdlatul Ulama turut ambil bagian penting mengusir penjajah dengan sebutan perang suci (resolusi jihad) yang dimotori oleh kiai pesantren (Patoni, 2007: 30).

Keluarnya pernyataan resmi Nahdlatul Ulama dengan perang suci dalam menghadapi kaum penjajah menimbulkan ekses perlawanan yang sangat besar. Resolusi jihad yang dimotori Nahdlatul Ulama, merupakan bentuk kritik atas sikap negara yang kurang tegas menghadapi penjajah. Sikap perlawanan tersebut sekaligus merupakan sikap radikal Nahdlatul Ulama sebagai pelopor perjuangan massal melawan penjajah (van Bruinessen, 2004:60).

Sikap kepeloporan Nahdlatul Ulama dalam berbangsa dan bernegara dapat pula ditelusuri dari keterlibatan Nahdlatul Ulama pada masa pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu kekuatan bangsa tidak tinggal diam ikut menumpas gerakan Partai Komunis Indonesia. Konsistensi sikap kepeloporan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang menaruh peduli pada persoalan berbangsa, terjadi pada masa orde baru di mana saat Nahdlatul Ulama mendapat tekanan dari pemerintah, justru Nahdlatul Ulama menjadi pelopor dalam penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Padahal dalam persoalan menolak atau menerima asas tunggal ini merupakan pilihan sulit bagi Nahdlatul Ulama, di mana pada saat itu organisasi kemasyarakatan masih mempersoalkan tentang asas tunggal.

Melihat besarnya kontribusi perjuangan Nahdlatul Ulama terhadap bangsa dan bernegara yang terlepas dari atribut partai politik, justru menempatkan Nahdlatul Ulama pada posisi strategis. Dengan adanya perubahan konstelasi politik yang menyeret Nahdlatul Ulama ke wilayah politik, ada sebuah pertanyaan mengapa organisasi yang sejak awal menjadi organisasi sosial keagamaan dan sudah memberi kontribusi besar kepada bangsa dan negara ini berubah menjadi partai politik ?.

Keterlibatan Nahdlatul Ulama ke gelanggang politik praktis kalau ditelusuri lebih jauh merupakan langkah spekulasi dan sekadar mengikuti kemauan elite Nahdlatul Ulama saja, bukan didasarkan pada sebuah perjuangan murni yang digariskan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Sebab Nahdlatul Ulama yang sejak awal digariskan sebagai organisasi keagamaan, tiba-tiba berubah haluan menjadi partai politik. Perubahan sikap politik Nahdlatul Ulama ini tidak terlepas dari besarnya akses politik para elite Nahdlatul Ulama yang menyeret organisasi terjun ke politik praktis.

Pendeklarasian Nahdlatul Ulama sebagai partai politik praktis dan menyatakan pisah dengan Masyumi merupakan bukti tidak terpenuhinya akses politik Nahdlatul Ulama untuk jabatan menteri agama. Di samping pertimbangan akses politik itu, posisi penting elite Nahdlatul Ulama dalam perpolitikan nasional, juga menjadi penyebab Nahdlatul Ulama terjun dalam politik praktis. Mendasarkan pada realitas politik tersebut, Nahdlatul Ulama dengan segala keterpaksaan sebagai organisasi keagamaan terbesar ini harus tampil sebagai kekuatan praktis dan mendapat pengesahannya pada Muktamar ke-19 di Palembang (Saifuddin, 1991: 30-31).

Keterlibatan Nahdlatul Ulama secara organisatoris dalam pentas politik sering dinyatakan berawal pada tahun 1952, saat Nahdlatul Ulama menyatakan keluar dari Masyumi dan menegaskan dirinya sebagai partai politik. Hal ini berdasarkan hasil Muktamar ke-19 di Palembang memutuskan Nahdlatul Ulama secara organisatoris memisahkan diri dari Masyumi dan mengusulkan kepada Masyumi untuk mereorganisasi menjadikan Masyumi sebagai badan federasi (Daman, 2001: 93).

Dengan demikian, mulai saat itu sebutan "Partai Nahdlatul Ulama" lebih populer karena keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan-kegiatan dan proses-proses politik, di samping masih tetap melakukan kegiatan keagamaan (Daman, 2001). Sampai dengan tahun 1973 keadaan demikian berlangsung, di mana saat terjadinya fusi partai-partai politik Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Peran Nahdlatul Ulama di pentas politik masih berlangsung terus sampai dengan tahun 1984, ketika Nahdlatul Ulama secara organisatoris resmi menanggalkan aktivitas politiknya lewat Partai Persatuan Pembangunan. Pada periode 1952-1984 para ulama dan politisi Nahdlatul Ulama mempunyai peran berlebih, terutama para ulamanya di samping sebagai pelaku politik juga sebagai pembimbing umat sehingga perilaku politiknya merupakan refleksi dari paham keagamaan yang bersumber

dari tradisi keberagamaannya, dan sebaliknya perilaku keagamaannya bernuansa politik. Sehubungan dengan itu, berbagai perubahan dalam politik Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari "Dimensi kepentingan ideologis dan politis", yakni kepentingan mempertahankan dan mengembangkan paham ahlusunnah wal jamah dan kepentingan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan (Daman, 2001). Oleh karena itu, secara nyata Nahdlatul Ulama menampakkan sikap politiknya, baik dalam percaturan politik di antara sesama tokoh-tokoh Islam (kalangan modernis) yang sering menampakkan adanya persaingan dan menimbulkan ketegangan, maupun ketegangannya dengan pemerintah.

BAGIAN IV

Mengenal Sistem Pemilihan

Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Sistem pemilihan umum dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, hampir bisa dikatakan sistem pemilihan umum di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali pergantian rezim selalu diubah peraturan perundang-undangannya berdasarkan kebutuhan zaman (Asshiddiqie, 2013: 1).

Pemilihan umum menjadi tolok ukur berjalannya proses demokratisasi karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.

Oleh karena itu, dalam ilmu politik sistem pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Menurut Lijphart (dalam Hoesein dan Yasin, 2015:18) manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih, sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi. Sementara itu, pemilihan presiden, gubernur dan bupati, dan wali kota, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian, melihat kenyataan seperti itu maka betapa pentingnya sistem pemilihan umum dalam sebuah negara demokrasi.

Pemilihan Umum 2004 dan Pemilihan Umum 2009 misalnya, baik pemilu legislatif, maupun pemilu presiden, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen. Selama empat kali dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, pada tahap pertama dilakukan hingga pada tahap pengesahan pada tanggal 19 Oktober 1999; perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000; pengesahan perubahan ketiga pada tanggal 10 November 2001; dan pengesahan hasil perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Dalam perubahan tersebut, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan, namun diberlakukan sistem pemilihan langsung, artinya semua peserta pemilihan umum, memiliki kesempatan sama untuk mengajukan calon presiden dengan tetap berpijak pada Undang-Undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemilihan Umum yang diselenggarakan di bawah payung UUD 1945 hasil amendemen, tidak memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), namun secara paket memilih juga pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan ini melibatkan partai politik dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, yang diatur penuh pada pasal 6A (Hoesein dan Yasin, 2015).

Dengan demikian, sistem pemilihan umum yang demokratis membutuhkan suatu aturan atau mekanisme kerja yang jujur dan adil dalam memenuhi kapasitas demokrasi itu sendiri. Setiap calon dan pasangan calon, baik calon anggota legislatif maupun calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden memiliki aturan dengan berbagai syarat yang dibuat lewat kesepakatan politik formal. Setiap calon pemimpin yang bersaing dan bertarung dalam kontestasi demokrasi diikat

oleh suatu aturan main yang harus diikuti bersama.

Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, seperti yang dijadikan judul buku Kofi Anan, "*Election with Integrity*", bukan sekadar pemilihan umum yang bersifat formalistik dan prosedural formal. Untuk mengembangkan pemilihan umum yang berintegritas diperlukan kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem aturan dan infra-struktur pendukung yang dapat memaksa penerapan prinsip pemilihan umum berintegritas itu dalam praktik. Semua pihak harus sama-sama membangun integritas berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/Majelis Permusyawaratan Rakyat /2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Bahkan, para sarjana hukum, khususnya sarjana hukum tata negara harus menyadari bahwa Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber etika. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya berisi norma hukum konstitusi atau "*constitutional law*", tetapi juga etika konstitusi atau "*constitutional ethics*" yang harus tecermin dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai baju hukum bangunan hukum dari substansi kebijakan publik (*public policies*) dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara (Hoesien dan Yasin, 2015).

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum ada empat pihak yang terlibat, yaitu (1) penyelenggara pemilihan umum, (2) peserta pemilihan umum, (3) kandidat atau calon, dan (4) para pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Idealnya keempat pihak ini sama-sama harus berintegritas. Jika rakyat pemilih menghalalkan praktik suap atau jual beli suara, dengan mengambil uangnya, tetapi tidak memilih pemberinya, dampak buruknya adalah para kandidat atau peserta pemilihan umum akan terus membiasakan diri dengan praktik suap dan jual beli suara itu. Praktik tidak terpuji itu bukan saja akan terjadi di antara kandidat atau peserta pemilihan umum dengan pemilih, tetapi jika iklim sudah terbentuk kebiasaan buruk menjadi sesuatu yang dianggap benar, dengan mudah praktik demikian akan menjalar pula ke aparat penyelenggara pemilihan umum. Apalagi jika sistem suara terbanyak dipertahankan, aktor yang bekerja dan berjuang untuk menang dengan segala cara akan berjumlah sebanyak jumlah calon legislatif dari semua partai peserta pemilihan umum di seluruh Indonesia. Sudah pasti sistem kontrolnya akan menjadi sangat sulit. Karena itu, integritas pemilihan umum menuntut kesadaran semua pihak untuk tunduk kepada prinsip hukum dan etika secara

sekaligus. Sudah tentu, untuk memulainya, kita harus mendahulukan integritas penyelenggara pemilihan umum (Hoesein dan Yasin, 2015: xi).

Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Indonesia memasuki babak baru kehidupan yang lebih demokratis ketika gerakan reformasi melanda di tahun 1998, ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Tuntutan luas masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh reformasi mendorong perubahan sosial politik. Setahun setelah kejatuhan Soeharto, reformasi institusional politik yang diperankan Presiden Habibie menjadi tonggak awal proses demokratisasi di Indonesia. Perubahan signifikan sistem kepartaian dan sistem pemilu berimplikasi pada fungsi legislatif di parlemen serta hubungannya dengan presiden dan kepala daerah di eksekutif. Oleh karena itu, di tingkat lokal atau daerah, instrumen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mendorong percepatan demokratisasi parlemen dalam memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perubahan ini tentu memperoleh dukungan masyarakat di daerah-daerah. Adanya Undang-Undang baru telah mendorong bangkitnya tokoh-tokoh lokal untuk tampil menjadi pemimpin daerah (Irham, 2016 : 2).

Transformasi politik yang terjadi di bangsa kita saat ini tidak terjadi begitu saja, namun memiliki pergulatan dahsyat bahkan tidak jarang terjadi perang wacana. Ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung dilatarbelakangi oleh berbagai ketidakpuasan dan penyimpangan di dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakoni oleh para wakil rakyat di daerah. Berbagai aktivis pro demokrasi, lembaga sosial masyarakat, pakar politik, dan akademisi yang *concern* terhadap kondisi perpolitikan di tanah air, melakukan diskusi dan seminar untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara penerapan pemilihan kepala daerah langsung. Dengan upaya para *stakelholders* yang memiliki *political will*, akhirnya mendapat angin segar, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah langsung.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lazim dengan pemilihan kepala daerah langsung, baik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati/Wali kota dan Wakil

Bupati/Wali kota secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan pemilihan kepala daerah langsung tersebut, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia dan otonom, sebagaimana rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif). Pemilihan kepala daerah langsung didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Secara teknis petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Ubaedillah dan Abdul Rozak (peny.), 2006: 202).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung yang dimulai tahun 2005 adalah kelanjutan dari proyek demokratisasi, khususnya di tingkat lokal, semangatnya adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan), di mana Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal (Upe, 2008: 72).

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan langkah politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah. Legitimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral dan sosial. Jelasnya, seorang Kepala Daerah yang memiliki legitimasi adalah Kepala daerah yang terpilih dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melalui proses kampanye dan pemilihan yang bebas, *fair* dan adil sesuai dengan dan norma-norma sosial dan etika politik, didukung oleh suara terbanyak dari seluruh pemilih secara objektif, dan menjalankan tugas dan fungsi Kepala Daerah sesuai dengan komitmen dalam proses kampanye pemilihan. Dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat paling populer digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan negara federasi seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Kanada. Rakyat memilih langsung Kepala Daerah sehingga legitimasi terhadap proses dan

hasil pemilihan sangat besar. Kepala Daerah memiliki otoritas besar atas kekuasaannya. Gubernur negara bagian bukanlah atasan langsung dari Wali kota-Wali kota di *City*, *Country*, atau sejenisnya. Pada saat bersamaan, kontrol rakyat dan dewan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atas Wali kota atau Gubernur juga efektif sehingga mekanisme *chek and balances* berjalan dengan optimal (Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006: 203).

Dengan pemilihan kepala daerah langsung telah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya diserahkan dan digunakan oleh rakyat dalam menentukan kepala daerah sehingga lebih menjamin keterwakilan dan demokratisasi. Sedangkan hasil pemilihan menjadi konsekuensi keputusan rakyat sendiri, termasuk jika di kemudian hari kinerja Kepala Daerah buruk dan mengecewakan. Oleh sebab itu, kualitas pemilih dalam sistem langsung sangat dibutuhkan. Kualitas pemilih mengandung rasionalitas dalam menyeleksi calon-calon kepala daerah yang ada. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dilakukan kepada rakyat melalui mekanisme politik sehingga mekanisme *chek and balances* menuntut keterlibatan rakyat.

Oleh karena itu, kondisi tersebut merupakan kemajuan sejarah demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung sangat ditentukan oleh rakyat sebagai pemilih. Menurut Sjamsuddin dalam Pradhanawati (2005) bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ini ada dua faktor yang dapat memengaruhi sukses tidaknya pemilihan kepala daerah langsung. Pertama, adalah faktor pemilih baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Aspek kuantitas yaitu mengenai hak masyarakat untuk mendapat dan diberi kesempatan untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, pendataan pemilih harus benar-benar mutakhir. Sementara dari aspek kualitas berkaitan dengan kesiapan pemilih untuk menjalankan haknya selaku pemilih.

Pemilihan kepala daerah langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis dan rekrutmen politik yang terbuka dalam pemilihan eksekutif daerah (gubernur, bupati, dan atau wali kota beserta wakilnya) apabila memenuhi beberapa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang disebut dengan asas luber dan jurdil.

BAGIAN V

Teori-Teori Sosial

Teori Strukturasi

Teori strukturasi (*structuration theory*) merupakan suatu teori sosiologi yang mencoba mengembangkan tiga konsep utama tentang "struktur", "sistem" dan "dualitas struktur" atau secara khusus mengkaji tentang hubungan antara "agen" (pelaku, aktor) dan "struktur" (Giddens dalam Ritzer dan Goodman, 2004 : 569).

Menurut Giddens, perkara sentral ilmu sosial ialah "praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu." Dalam masyarakat, arena tidak ada praktik sosial tanpa tindakan beberapa orang, maka tindakan pelaku (*agency*) tidak mungkin diabaikan ilmu sosial. Giddens memberikan contoh bahwa tidak mungkin ada kediktatoran tanpa ada tindakan otoriter seseorang atau beberapa diktator (Wirawan, 2012: 292).

Dalam teori strukturasi, Giddens pada dasarnya menolak dualisme subjek dan objek, agensi dan struktur, serta struktur dan proses, yang selama ini telah dipandang sebagai dualisme tersebut, oleh Giddens dikoreksi, yaitu dengan memunculkan istilah dualitas. Dengan koreksi yang dimaksudkan,

Giddens (1984:2) menginginkan berakhirnya "imperialisme" yang saling berlawanan antara kutub subjektivisme (sosiologi interpretativisme) dan kutub objektivisme (sosiologi sosiologisme).

Dualitas struktur pada dasarnya memandang struktur dan individu-aktor berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil (*outcome*) dan struktur, tetapi aktor juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru (Wirawan, 2012: 294).

Oleh Giddens struktur itu sendiri, dipandang sebagai aturan-aturan (*rules*) dan sumber-sumber (*resources*). Aturan-aturan dimaksud bisa bersifat konstitutif dan regulatif, guna memberikan kerangka pemaknaan (*interpretative scheme*) dan norma. Sedangkan sumber menunjuk pada distribusi sumber alokasi (ekonomi) dan sumber otoritatif (politik), yang terkait secara langsung dengan soal *power* (Faisal, 1998: 66).

Giddens tidak mengabaikan fakta bahwa struktur bisa menghambat tindakan, namun ia merasa bahwa sosiolog terlalu melebih-lebihkan arti penting hambatan ini. Terlebih lagi, mereka gagal menegaskan fakta bahwa struktur "Selalu menghambat dan mendorong". Sering kali struktur memungkinkan agen melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan. Namun, Giddens mengakui bahwa aktor dapat kehilangan kontrol mereka atas "Hal-hal yang terstrukturkan dalam sistem sosial" karena mereka senantiasa tumbuh di ruang dan waktu (Ritzer dan Goodman, 2004: 571). Sebaliknya, sistem-sistem sosial yang secara rutin melibatkan struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia, dan diproduksi di sepanjang ruang dan waktu. Oleh karena itu, menurut Giddens menganalisis strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari cara-cara bagaimana sistem-sistem seperti itu, yang tertanam dalam aktivitas-aktivitas aktor tertentu yang berpegang pada aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya dalam beragam konteks tindakan, diproduksi dan direproduksi dalam interaksi (Giddens, 1984 :40).

Jika kita bertanya, apakah struktur dalam pandangan Giddens mempunyai bentuk tertentu yang bisa dilihat secara kasatmata? Maka, jawabnya pasti 'tidak'. Struktur dalam hal ini mirip skema yang bersarang dalam memori kita mengatasi waktu dan ruang sehingga tidak kasatmata dan hanya tampak dalam praktik-praktik sosial. Struktur berupa skema mirip "aturan" yang menjadi prinsip berlangsungnya praktik-praktik sosial (Wirawan, 2012: 295). Sama seperti tata bahasa (kaidah-kaidah bahasa),

akan menciptakan ungkapan dan kalimat yang baik dan kalimat yang baik ini akan membentuk bahasa, demikian pula struktur yang berisi peraturan dan sumber daya akan memberi kendala dan peluang bagi aktor untuk bertindak, dan berdasarkan peraturan dan sumber daya itu aktor akan menghasilkan kembali institusi dan hubungan-hubungan sosial (struktur) dalam masyarakat (Wirawan, 2012).

Oleh karena itu, penting dicatat bahwa struktur tidak hanya menimbulkan kendala (*constraint*) bagi tindakan manusia, tetapi juga menimbulkan peluang bagi manusia untuk bertindak atas kehendak sendiri. Secara operasional, struktur yang melahirkan aturan dan sumber daya dapatlah dijabarkan ke dalam tiga bentuk kendala (Giddens, 1984 dalam Wirawan: 296). *Pertama*, semua tipe peraturan yang digunakan sebagai alat menginterpretasi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh aktor, dan benda-benda yang dihasilkannya. Peraturan yang bersifat semantik ini berfungsi sebagai komunikasi makna. Bentuk yang pertama ini merupakan unsur-unsur struktural, seperti tata simbol dan dimensi-dimensi politik, ekonomi, dan hukum. Hal ini merupakan kendala objektif bagi individu-aktor.

Kedua, semua tipe peraturan yang digunakan oleh aktor sebagai norma untuk mengevaluasi tingkah laku. Peraturan yang bersifat moral ini berfungsi sebagai evaluasi dan penilaian tingkah laku. Kendala ini dapatlah disebut sebagai sanksi-sanksi negatif terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan struktur. *Ketiga*, semua fasilitas dan sumber daya material dan nonmaterial yang mungkin digunakan oleh aktor dalam suatu interaksi, mulai dari penguasaan keterampilan berbicara sampai pada penerapan sarana-sarana kekerasan. Sumber daya ini akan memberikan kemampuan melakukan transformasi (kekuasaan). Namun, tidak setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan tersebut. Perbedaan akses terhadap kekuasaan inilah yang membatasi kemampuan aktor memobilisasi sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang berarti.

Dengan demikian, teori ini menempatkan manusia tidak sekadar penanggung beban struktur ekonomi-politik. Individu-aktor juga tidak dilihat sebagai makhluk yang selalu menyesuaikan diri dengan atau mencari persetujuan dari sistem nilai utama, ataupun subkultur yang telah diinternalisasi dan diterjemahkan ke dalam motivasi. Individu-aktor memiliki pengetahuan mengenai masyarakatnya dan berdasarkan

pemahaman itu bertindak untuk mengubah realitas sekelilingnya (Surbakti, 1992: 48).

Giddens melihat tiga gugus besar struktur. *Pertama*, struktur signifikasi (*signification*) menyangkut skemata simbolis, penyebutan, dan wacana. *Kedua*, struktur dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). *Ketiga*, struktur legitimasi menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Giddens, 1984: 31). Oleh karena itu, dikaitkan dengan kekuasaan, dualitas struktur berfungsi sebagai alat analisis kehidupan sosial yang penting terutama mengenai hubungan antara tindakan manusia dengan struktur.

Berdasarkan hal tersebut Davis dalam (Wirawan, 2012: 306-307) menyimpulkan bawa karakteristik utama dari kekuasaan menurut pandangan strukturasionis antara lain:

1. Kekuasaan sebagai bagian integral dari interaksi (*power of integration to social interaction*). Dalam setiap interaksi sosial selalu melibatkan kekuasaan, sehingga kekuasaan dapat diterapkan pada semua jenjang kehidupan sosial mulai dari yang sempit sampai dengan yang luas.
2. Kekuasaan adalah hal yang penting pokok dalam diri manusia (*power as intrinsic to human agency*). Kekuasaan adalah kemampuan aktor untuk memengaruhi dan mengintervensi serangkaian peristiwa sehingga ia dapat mengubah jalannya peristiwa tersebut.
3. Kekuasaan adalah konsep relasional, termasuk hubungan otonomi dan ketergantungan. Kekuasaan bukan sekadar kapasitas transformasi aktor untuk mencapai tujuannya, melainkan juga konsep relasional. Ini berarti setiap aktor dapat memengaruhi lingkungan di mana peristiwa interaksi itu terjadi agar aktor lain memenuhi keinginannya.
4. Kekuasaan selain bersifat membatasi juga memberi kebebasan (*power as contraining as well as enabling*). Dalam kehidupan sehari-hari kekuasaan bergandengan tangan dengan dominasi yang terstruktur. Anggota masyarakat tidak hanya mengintervensi jalannya interaksi, tetapi juga mencoba melakukan kontrol terhadap perilaku orang lain. Ini dilakukan dengan sarana sanksi yang telah tersedia secara struktur.
5. Kekuasaan sebagai proses (*power as process*). Hubungan dialektik antara aktor dan struktur tidaklah bersifat statis, tetapi secara kontinu melakukan produksi dan reproduksi lewat proses strukturasi.

Menurut Giddens, kekuasaan lebih berfokus pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi secara terus-menerus dan rutin membangun, memelihara, mengubah, dan mentransformasi hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada level mikro maupun makro, mencakup dominasi dan subordinasi yang dibangun secara terus-menerus dalam proses interaksi oleh faktor-faktor untuk memelihara hubungan kekuasaan tadi (Wirawan, 2012).

Menurut teori strukturasi, masa produksi aksi adalah juga masa reproduksi di dalam konteks penerapan kehidupan sehari-hari. Teori ini menganggap tidak akurat melihat sifat struktur sosial dari sistem sosial sebagai produk sosial karena hal ini sama dengan mengatakan bahwa para aktor berkumpul untuk menciptakan mereka. Di dalam memproduksi sifat-sifat struktural, para agen juga mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan aksi tersebut dilakukan. Manusia agen selalu mengetahui apa yang mereka lakukan pada tingkat kesadaran diskursif di bawah deskripsi tertentu, tetapi mereka mungkin tidak dapat memahami apa yang mereka lakukan di bawah deskripsi lain (Surbakti, 1992: 49).

Dualitas struktural pada gilirannya mensyaratkan pemonitoran refleksi para agen di dalam aktivitas sosial sehari-hari. Aktor manusia tidak hanya memonitor aktivitasnya dan aktivitas orang lain di dalam keteraturan perilaku sehari-hari. Mereka juga dapat memonitor pemonitoran tersebut dalam kesadaran diskursif. Skema-skema interpretatif merupakan "*modes of tyificatio*n" yang dimasukkan ke dalam perbendaharaan pengetahuan para aktor yang kemudian dipakai secara reflektif di dalam komunikasi. Perbendaharaan pengetahuan yang digunakan para aktor di dalam produksi dan reproduksi interaksi adalah sama dengan perbendaharaan pengetahuan melalui di mana mereka dapat membuat penjelasan, dan memberikan alasan (Wirawan, 2012: 298).

Dengan demikian, secara singkat dualitas struktur dapat dirumuskan sebagai struktur yang melahirkan kendala dan peluang, berinteraksi dengan individu yang bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi. Individu bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi tertentu sehingga dapat menggunakan peluang dan kemudahan yang tersedia, tetapi terkendala oleh struktur yang objektif pada satu pihak dan oleh ketidaksadarannya pada pihak lain. Oleh karena itu, antara struktur dan agensi bukanlah suatu dualisme, melainkan suatu dualitas. Struktur merupakan medium dari agensi, namun pada saat yang bersamaan juga sebagai *outcome* dari agensi.

Agensi tidak sekadar mereproduksi struktur, tetapi juga memproduksi struktur. Atas dasar itu, Giddens memunculkan konsep dualitas struktur yang merupakan konsep sentral dalam teori strukturasi (Wirawan, 2012: 299).

Teori Pertukaran Sosial

Teori-teori Pertukaran Sosial memberikan asumsi-asumsi dasar bahwa Perilaku sosial merupakan serangkaian pertukaran. Individu-individu berusaha memaksimalkan imbalan-imbalan mereka dan meminimalkan biaya-biaya mereka. Apabila individu-individu menerima imbalan-imbalan dari orang lain, mereka merasakan adanya penghargaan. Oleh karena itu, melekat di dalam asumsi-asumsi ini terdapat dua konsep, mementingkan diri sendiri dan saling ketergantungan. Mementingkan diri sendiri mendorong individu-individu untuk bertindak sesuai dengan persepsi-persepsi dan proyeksi-proyeksi mengenai imbalan-imbalan dan biaya-biaya dihubungkan dengan sebuah pertukaran, atau pertukaran yang potensial, tentang sumber-sumber. Saling ketergantungan mengacu kepada tingkat di mana hasil-hasil satu orang tergantung kepada hasil-hasil orang lain (Budyatna, 2015: 364).

Sebuah pertukaran hanya sebuah penyampaian mengenai sesuatu sebagai pengganti atau balasan untuk sesuatu. Hal ini dapat terjadi antara individu dan lingkungan. Namun, demikian pertukaran "sosial" memerlukan sebuah hubungan dengan manusia lainnya. Pertukaran sosial juga merupakan sesuatu yang berbeda dari pertukaran ekonomi. Pertukaran ekonomi secara khusus meliputi kewajiban-kewajiban hukum, sedangkan pertukaran sosial bergantung kepada kepercayaan dan kemauan baik. Dengan perkataan lain, pertukaran sosial bersifat sukarela. Sementara Pertukaran ekonomi memerlukan sebuah perincian yang eksak tentang imbalan-imbalan dan biaya-biaya dari kedua belah pihak, sedangkan pertukaran sosial membiarkan imbalan-imbalan dan biaya-biaya terbuka (Budyatna, 2015).

Namun, demikian teori ini menyatakan bahwa petukaran sosial itu dilandasi pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer. Orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori pertukaran memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip dengan

transaksi ekonomi. Akan tetapi, mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata.

Teori pertukaran sosial juga didasarkan pada konsep-konsep tentang kepentingan-kepentingan diri sendiri dan saling ketergantungan. Individu-individu didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dalam cara-cara yang membantu kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri. Meskipun ini mungkin berarti kita mencoba untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan kita atas biaya orang lain, ini tidak selalu demikian halnya. Sering kali ini merupakan kebijaksanaan kita untuik bekerja sama sehingga keuntungan-keuntungan kedua belah pihak dimaksimalkan. Oleh karena itu, untuk memahami "saling ketergantungan", adalah bermanfaat untuk berpikir tentang kebebasan dan ketergantungan. Kebebasan penuh terjadi apabila hasil-hasil seseorang didasarkan semata-mata pada usaha-usaha orang lain. Kebebasan secara penuh dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan individu dalam lingkungan fisik. Dengan demikian, saling ketergantungan berarti bahwa hasil-hasil atau imbalan-imbalan masing-masing orang dipengaruhi oleh usaha-usaha orang lain. Dalam sebuah hubungan jangka panjang, misalnya kepuasan masing-masing orang (sebuah imbalan) dipengaruhi dari orang lain (Budyatna, 2015: 367).

Dalam sebuah pabrik, misalnya seorang pekerja yang berinteraksi dengan pembantunya dapat menjalin kerja sama yang intim dengan harapan memperoleh ganjaran nyata berupa sejumlah besar bonus tahun baru. Tetapi ganjaran dari persahabatan dan goodwill yang tidak nyata dapat melahirkan perilaku yang sama, bahkan di saat-saat dunia usaha mengalami masa sulit di mana bonus demikian merupakan hal yang mustahil. Model timbal balik tetap ada sejauh orang memberi dan berharap imbalan barang atau jasa itu (Poloma, 2000: 54).

Diantara tokoh dalam teori pertukaran ini adalah Peter M. Blau dan George C. Homans. Menurut Blau memang diakui tidak semua perilaku manusia di bimbing oleh pertimbangan pertukaran sosial, tetapi dia berpendapat kebanyakan memang demikian. Tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang. Hubungan antar pribadi dapat bersifat timbal balik atau sepihak. Dalam hal ini, terjadi hubungan yang bersifat simetris, di mana semua anggota menerima

ganjaran sesuai dengan apa yang diberikannya maka kita dapat menyebut hal demikian sebagai hubungan pertukaran.

Menurut Blau (Poloma, 2000: 82) mengemukakan dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial : (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi orang lain, dan (2) perilaku tersebut harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan yang diinginkan itu dapat berupa ganjaran ekstrinsik (seperti uang, barang-barang atau jasa-jasa) atau instrinsik (termasuk kasih sayang, kehormatan atau kecantikan).

Demikian pula Homans mengetengahkan proposisi tindakan sosial yang bermaterikan *exchange theories,* yaitu:

1. Jika tingkah laku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi atau dilakukan.
2. Semakin sering dalam peristiwa tertentu tindakan seseorang memberikan ganjaran terhadap tindakan orang lain maka sering pula orang lain itu mengulangi tindakannya.
3. Semakin bernilai suatu tindakan orang lain yang ditujukan kepadanya, semakin besar kemungkinan atau semakin sering ia akan mengulangi tindakannya (Ritzer, 1985).

Oleh karena itu, secara umum teori pertukaran ini mendasarkan asumsi pokoknya pada (1) perilaku sosial adalah suatu rangkaian pertukaran, (2) individu-individu itu senantiasa berusaha untuk memaksimalkan keuntungan (*reward*) mereka, dan meminimalkan biaya (*cost*) atai risiko, (3) ketika individu-individu itu menerima hadiah atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan (*reward*) dari orang lain maka mereka merasa berkewajiban untuk membalasnya (Amal, 2010: 281).

Teori dari Homans ini analisis dasarnya ialah *face to face* pertukaran sosial antar dua individu, dengan konsep prinsip-prinsip ekonomi. Dua orang individu yang mengadakan interaksi akan selalu mementingkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Atau dalam kalimat lain juga sering disebut bahwa dalam setiap perilaku individu senantiasa memaksimalkan *frofit* dan meminimalkan loss (Upe, 2010 ; 179). Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya teori

Homans tidak mengakui bahwa yang disebut interaksi itu hanya *face to face* saja dan berlangsung secara spontan, tetapi yang dipentingkan adanya *operat reinforcement* serta dasar yang paling utama dalam interaksi itu adalah adanya prinsip ekonomis yang selalu melihat adanya profit dan loss. Justru yang membuat kompleksnya struktur sosial itu dilihat, diukur dari dari sejauhmana prinsip-prinsip itu tecermin dalam kehidupan.

Teori Pilihan Rasional

Teori yang relevan dalam kajian tentang *political behavior* adalah teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Prinsip dasar dari teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya (Ritzer, 2004).

Selanjutnya, Ritzer (2004) teori pilihan rasional hanya berada di pinggiran utama Sosiologi, melalui upaya Coleman, teori ini menjadi habat. Coleman menyebutkan bahwa paradigma tindakan rasional adalah satu-satunya yang mungkin integrasi berbagai paradigma sosiologi.

Sedangkan teori ini dipopulerkan oleh James Coleman. Menurut Coleman bahwa teori pilihan rasional merupakan "tindakan rasional" dari seorang individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (Ritzer, 2004). Selanjutnya, Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoretis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka (Upe, 2008).

Selanjutnya, menurut Coleman ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman dalam Upe (2008) menjelaskan interaksi antara aktor dan sumberdaya secara perinci menuju ke tingkat sistem sosial, yakni "Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-

masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan".

Dengan demikian, Coleman memusatkan perhatiannya pada tindakan rasional individu, kemudian dilanjutkan pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Akan tetapi, pada akhirnya ia memusatkan perhatian pada asperk hubungan mikro-makro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lainnya (Upe, 2004). Menurut Santoso dalam Upe (2008) bahwa pendekatan pilihan rasional memfokuskan perhatiannya pada pilihan yang dibuat orang ketika terlibat dalam perilaku politik. Menurut asumsi dasar pendekatan tersebut adalah jika seseorang dihadapkan pilihan akan beberapa aksi *alternative*, orang akan memilih aksi yang memaksimalkan kegunaan atau manfaat yang mereka harapkan. Kemudian, menurutnya bahwa jika teori pilihan rasional kurang memadai, dalam kajian tentang sosiologi poltik juga dapat menggunakan teori perilaku pemilih yang lebih baik dengan menginterpretasi ulang konsep pemilihan rasional (Hidajah, 2010: 85).

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor yang dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Meskipun teori ini memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama. *Pertama*, adalah keterbatasan sumber. Aktor mempunyai sumber yang berbeda terhadap sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber data yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif rendah. Sumber pemaksa *Kedua*, atas tindakan aktor individual adalah lembaga sosial, seperti dinyatakan Friedman dan Hechter (dalam Ritzer, 2004:358). Merasakan tindakannya diawasi sejak lahir hingga mati oleh aturan keluarga dan sekolah, hukum dan peraturan,kebijakan tegas, gereja, masjid, rumah sakit dan perkuburan. Dengan membatasi rentetan yang boleh dilakukan oleh individu dengan dilaksanakannya aturan permainan meliputi norma hukum, agenda dan aturan-aturan pemungutan suara secara sistematis memengaruhi akibat sosial (Hidajah, 2010: 83-84).

Selanjutnya, Friedman dan Hechter (dalam Hidajah, 2010: 84) mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi dasar teori pilihan rasioanal, *Pertama*: adalah kumpulan mekanisme atau proses yang menggabungkan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan

akibat sosial. *Kedua*: adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya informasi dalam membuat pilihan rasional. Suatu ketika diasumsikan bahwa aktor mempunyai informasi yang cukup untuk membuat pilihan diantara peluang tindakan yang terbuka untuk mereka. Tetapi, aktorpun makin mengenal bahwa kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia sangat berubah-ubah dan perubahan itu sangat dipengaruhi pilihan.

Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat di atas menurut Santoso dalam Upe (2008) bahwa pendekatan pilihan rasional memfokuskan perhatiannya pada pilihan yang dibuat orang ketika terlibat dalam perilaku politik. Menurutnya asumsi dasar pendekatan tersebut adalah jika seseorsang dihadapkan pilihan akan beberapa aksi *alternatif*, orang akan memilih aksi yang memaksimalkan kegunaan atau manfaat yang mereka harapkan. Kemudian, menurutnya bahwa jika teori pilihan rasional kurang memadai, dalam kajian tentang sosiologi politik juga dapat menggunakan teori perilaku pemilih yang lebih baik dengan menginterpretasi ulang konsep pilihan rasional.

Teori Tindakan Sosial

Menurut Max Weber bahwa tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjektive meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya (Johnson dalam Upe, 2008 : 89). Perilaku politik sebagai tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan itu meliputi setiap jenis perilaku manusia, yang dengan penuh arti diorientasikan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan di waktu yang akan datang.

Pokok-pokok pikiran Max Weber yang tertuang di dalam Teori Tindakan Sosial dalam memahami fenomena sosial adalah, antara lain:

1. Tidak jauh berbeda dengan teori fungsional struktural, Max Weber menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam bentuk evolusi, namun yang digunakan paradigma definisi sosial (interpretative). Oleh karena itu makna motivasi dan arti subjektif dalam melakukan proses analisis sosial memegang peranan penting.
2. Konsep rasionalitas menjadi titik sentral perhatian Max Weber yang sama pentingnya dengan konsep solidaritasnya Durkheim. Tindakan

rasional inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan secara kualitatif-akumulatif atau tindakan rasional instrument dianggap paling esensial (Johnson, 1990).

3. Kenyataan sosial (social reality) secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan sosial, diimplementasikan dalam bentuk perilaku sosial, pandangan dan tujuan serta tindakan-tindakan sosial tersebut.
4. Dunia sosial-budaya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sesuai dengan hukum-hukum alam saja, dan manusia terdeterminasi oleh norma sosial dan struktur sosial (dalam pandangan positivis), tetapi dunia sosial budaya dipandang sebagai suatu dunia kebebasan dan terkait dengan pemahaman internal (rasionalitas) individu yang memandang sesuatu cenderung subjektif (Laeyen Deker L, 1991).
5. Pemikiran yang menekankan pada *verstehen*, yaitu pemahaman subjektif mendalam, sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif. Tindakan sosial adalah penting. Setiap kajian sosial harus menganalisis perilaku aktual manusia individual menurut orientasi subyektif mereka sendiri (Campbell T, 1981). Perilaku sosial tidak cukup dipahami dari tampilan lahir (tampak), tetapi juga harus dipahami atau diselami hal yang tidak tampak.
6. Konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisis objektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Analisis objektif mengenai arti subjektif adalah pengalaman subjektif, sering dipahami secara salah. Menurut Weber, tindakan objektif adalah pengalaman subjektif yang dapat dimengerti orang lain karena dialami bersama secara luas, sedangkan tindakan subjektif adalah pengalaman subjektif yang tidak dapat dikomunikasikan atau dimengerti oleh kehidupan bersama, meskipun hal itu sangat riil bagi yang bersangkutan (Johnson, 1990). Tindakan rasional adalah tindakan yang berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan (ada aspek positif/negatif).
7. Menurut Max Weber, ada empat macam tindakan individu dalam kehidupan sosial, antara lain : (Tindakan rasional instrumental, tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang penting atau menduduki posisi paling tinggi daripada ketiga tindakan yang lain. Tindakan

ini selalu didasarkan pada; tujuan yang jelas yang akan dicapai; menggunakan alat atau sasaran tertentu dalam upaya mencapai tujuan kemampuan meramalkan atau memperediksi ke depan dari tindakan tersebut; (b) Tindakan rasional yang berorientasi nilai, ciri tindakan ini, antara lain: tujuannya sudah ada dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut, individu sudah disuguhkan seperangkat nilai untuk dipilih; pertimbangan kegunaan dan efisiensi sudah ada pedomannya; nilai akhir bersifat non rasional, contoh tindakan ini adalah tindakan relegius (kegiatan ibadah dalam agama), (c) Tindakan tradisional, cirinya antara lain: merupakan tindakan yang bersifat non rasional; tindakan dilakukan karena kebiasaan, tanpa perencanaan secara sadar; individu hanya membenarkan tindakan itu apabila diminta. Tindakan ini akan hilang apabila individu meninggalkan tindakan rasional instrumental, contoh tindakan ini adalah tindakan upacara-upacara tradisi; (d) Tindakan efektif, diantara tindakan ini adalah: tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosional tanpa perencanaan dan pemikiran logis; tindakan bersifat non-rasional. Contoh tindakan ini adalah tindakan individual dimabuk cinta, ketakutan dengan kegembiraan yang berlebihan (Johnson, 1990 ; Ritzer dan Goodman, 2004). Ini berarti konsep tindakan individu dalam kehidupan sosial atau pola perilaku individu dalam kehidupan sosial adalah menyatunya dimensi pemikiran yang abstrak (tujuan, motivasi, pandangan) dan dimensi tata cara/kegiatan sehari-hari dan alat atau sarana. Jadi, pola perilaku sosial itu konkret (tampak). Oleh karena itu, dalam memahami pola perilaku sosial harus menggunakan pendekatan Verstehen.

8. Menurut Max Weber hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami tindakan individu adalah: (a) dalam tindakan sosial tersebut di atas, bisa terjadi tindakan satu mengait pada tindakan yang lain, misalnya tindakan tradisional mengait tindakan rasional yang berorientasi pada nilai; (b) pola perilaku khusus yang dilakukan beberapa individu, bisa berbeda karena orientasi, motivasi dan tujuan subjektif dari individu bisa berbeda; (c) tindakan sosial dapat dimengerti hanya menurut arti subjektif (verstehen) dan pola-pola motivasi individu (Wrong. D, 1970 ; Giddens, A. 1984).
9. Struktur sosial dalam pandangan Max Weber adalah istilah-istilah yang bersifat probabilistic dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik

yang ada terlepas dari individu seperti dalam pemahaman kaum positivis/fungsional struktural.

Teori tindakan Weber berusaha menafsirkan tindakan sosial di antara hubungan sosial serta menjelaskan hubungan kausal antara berbagai faktor dari tindakan tersebut. Weber secara khusus mengklasifikasi tindakan sosial ke dalam empat tipe :

1. *Zwek Rational* : tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan (*zwek*) untuk dicapai dalam kehidupan manusia yang tujuan dengan alat untuk mencapai hal tersebut telah dirasionalisasikan dan dikalkulasikan sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh yang melakukannya.
2. *Wercrational action* : tindakan rasional, tetapi si aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang di pilihnya meruapakan cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *Affectual action* : tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Tindakan yang dibuat-buat, di pengaruhi oleh emosi dan kepura-puraan.
4. *Traditional action* : tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja atau telah mendarah daging (Johnson, 1990 dan Ritzer, 2004).

Tindakan sosial adalah seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun secara diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan kepada tujuannya. Tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di pilih, tindakan meliputi setiap jenis perilaku manusia, yang dengan penuh arti diorientasikan kepada perilaku orang lain yang telah lewat, yang sekarang dan yang akan datang sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan, tetapi yang terstruktur atau memiliki pola tertentu dan makna-makna tertentu.

Beberapa asumsi fundamental teori aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Parsons menyebutkan beberapa asumsi mengenai tindakan sosial (Ritzer, 2004).

1. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari eksternal dalam posisinya sebagai objek

2. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut
4. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang sedang terjadi dan yang akan dilakukan
5. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.

Selanjutnya, secara khusus Parsons dalam mencermati fenomena sosial, menyusun skema unit-unit dasar dari tindakan sosial dengan karakteristik:

1. Adanya individu selaku aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan
5. Aktor berbeda di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang memengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan, tetapi putusan akhir ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai *voluntarisme,* yaitu kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya (Ritzer, 2004).

Baik Weber maupun Parsons menempatkan individu sebagai makhluk yang kreatif, bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan yang hendak dicapainya. Senada kedua tokoh tersebut, Veeger (1993), individualitas manusia menampakkan diri dalam tindakannya yang sadar dan sengaja. Sebagai individu ia bebas, mampu menentukan apa yang harus dilakukannya. Sebagai individu, manusia dapat mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya. Ia dapat bertindak sesuai dengan harapan-harapan orang lain, tetapi ia juga dapat melawan harapan-harapan orang lain.

Dalam setiap organisasi, kelompok dan lembaga-lembaga tersebut terdapat individu konkret yang membuat berbagai keputusan. Karenanya individu bukanlah subjek pasif yang semata-mata bereaksi terhadap nilai-nilai di luarnya dan kondisi-kondisi struktural yang melingkupinya. Aktor juga tidak hanya tanggap terhadap struktur yang telah mapan, tetapi juga melakukan perubahan pada kondisi struktural. Karena itu, dalam memahami segi kehidupan politik diperlukan dan penting untuk memberikan perhatian khusus pada nilai-nilai, motivasi-motivasi, dan persepsi individual dari aktor-aktor itu. Individu sebagai aktor dalam perilaku politiknya yang dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan itu beroperasi konsekuensi pada struktur keyakinan dan individu.

Kepentingan sebagai tujuan yang dikejar oleh aktor merupakan faktor yang penting dalam perilaku politik, individu maupun kelompok, yang selalu melekat dalam proses politik. Kepentingan merupakan kekuatan pendorong yang utama bagi manusia dan seperti tindakan manusia didasarkan atas pemilihan kepentingan (Upe, 2008).

Dengan demikian, perilaku politik dalam perspektif tindakan sosial adalah tindakan individual dan kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan politik memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tujuan politik dari aktor yang memainkannya. Bahkan, tingkah laku politik merupakan hasil dari pertemuan faktor-faktor struktur kepribadian, keyakinan politik, tindakan politik individu, dan struktur, serta proses politik menyeluruh. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah sebuah landasan ideologi yang tertuang dalam visi-misi dari sebuah partai politik untuk diperjuangkan melalui taktik dan strategi tertentu. Karena itu, sorang politisi, politikus, dan politikolog akan berpikir dan bertindak dalam kerangka landasan idealisme dan orientasi yang khas (Martin, 1993).

Teori Perilaku Sosial

Dalam sosiologi politik terdapat beberapa perspektif teori yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku politik seseorang atau kelompok. Perspektif yang relevan dibunakan dalam kajian ini, yaitu perspektif *behavioral* (perilaku). Pendekatan ini mengkaji manusia serta perilaku politiknya karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Perilaku yang dimaksud dalam sosiologi politik mencakup kesatuan-

kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan., kelompok elite maupun masyarakat politik secara umum.

Perilaku sosial tidak hanya sekadar warisan dari keluarganya, tetapi juga merupakan produk masyarakat (Gustav Le Bon dalam Wardi Bachtiar, 2006: 201). Artinya perilaku individu juga banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekitar mereka, baik yang melekat pada dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Sehubungan dengan perilaku sosial ini, Skinner mengemukakan bahwa tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungan dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat, atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan tingkah laku (Ritzer, 1992: 82) sehingga dalam teori ini terdapat hubungan fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor dalam melakukan aksinya/pekerjaannya.

Di dalam teori perilaku terdapat pendekatan *behaviorisme*, di mana pendekatan ini sudah dikenal sejak lama dalam ilmu sosial, khususnya di bidang psikologi yang dipelopori oleh B.F.Skinner (1963). Menurut Skinner, paradigma fakta sosial dan definisi sosial sebagai perspektif yang misteri, mengandung persoalan yang masih teka-teki dan tidak dapat diterangkan secara rasional. Sedangkan paradigma perilaku memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan terdiri atas bermacam-macam objek sosial dan objek non-sosial. Perbedaan pandangan antara paradigma perilaku sosial dengan paradigma fakta sosial, terletak pada sumber pengendalian tingkah laku individu. Termasuk dalam paradigma perilaku sosial adalah sosiologi perilaku (*behavioral sosiologi theory*) dan teori pertukaran (*exchange theory*). Teori perilaku sosial menitikberatkan pada hubungan antara tingkah laku aktor dengan tingkah laku lingkungannya. Konsep dasarnya adalah pemberdayaan (*reinforcement*) yang dapat diartikan sebagai hasil atau ganjaran. Suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh kepada aktor pasti tidak akan diulangi. Teori ini tidak dapat dilepaskan dari ide yang pernah dilontarkan pendahulunya, semisal Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill.

Hal yang sangat penting dalam pembahasan tentang pendekatan perilaku sebagaimana yang dikemukakan oleh Skiner, yakni bahwa objek studi sosiologi yang konkret-realistis adalah perilaku manusia yang tampak serta kemungkinan perulangannya (*behavior of man and contingencies of reinforcement*). Dalam pandangan sosiologi terdapat dua

teori yang termasuk dalam paradigma perilaku, yakni sosiologi perilaku dan teori pertukaran. *Reinforcement* ditentukan oleh hadiah (penguat) dan ongkos (hukuman). Hadiah ditentukan oleh kemampuannya memperkuat perilaku, sedangkan biaya mengurangi kemungkinan perilaku (Upe, 2008 : 95).

Dengan kata lain, perilaku masyarakat (dalam hal ini elite Nahdlatul Ulama) bukan semata-mata karena bawaan dari keluarga akan tetapi, merupakan hasil jalinan interaksi sosial di masyarakat itu sendiri. Sehingga perilaku masyarakat juga lahir akibat adanya pengaruh dari mana masyarakat itu berada atau bernaung artinya faktor eksternal dari diri masyarakat juga sangat dominan. Hal senada dikemukakan oleh B.F.Skinner bahwa tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungan dengan faktor lingkungan akan menghasilkan akibat-akibat, atau perubahan dalam faktor lingkungan, menimbulkan perubahan tingkah laku (Ritzer, 2004: 82). Pemikiran ini dilandasi oleh ide-ide dan asumsi-asumsi yang dibangun lewat teori tingkah laku sosial, antara lain :

1. Masyarakat pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimum, tetapi mereka senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari adanya interaksi yang mereka lakukan dengan manusia lainnya;
2. Manusia tidak memiliki informasi yang mencakup semua hal sebagai dasar untuk mengembangkan alternatif, akan tetapi mereka tetap memiliki informasi walaupun sedikit atau terbatas dalam rangka memperhitungkan untung ruginya;
3. Manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya, akan tetapi mereka selalu melakukan kompetisi guna mendapatkan keuntungan;
4. Walaupun untuk mendapatkan keuntungan menggunakan kompetisi, namun tetap saja mereka dibatasi oleh sumber-sumber yang tersedia; dan
5. Manusia senantiasa berada pada keterbatasannya, akan tetapi mereka selalu melakukan kompetisi guna mendapatkan keuntungan;
6. Manusia selalu berusaha memperoleh hasil dalam wujud material di samping non material seperti emosi, perasaan suka dan sentiment (Zamroni, 1992: 66).

Dengan demikian, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, norma sosial (pengaruh tekanan

sosial), kontrol perilaku pribadi (kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan sesuatu perilaku), dan genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak hanya ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur sebagai kontrol sosial.

Kemudian, George C. Homans dan Peter M. Blau mengemukakan beberapa bentuk perilaku sosial, antara lain;

1. Proposisi Keberhasilan, artinya semakin sering sesuatu tindakan mendapatkan ganjaran (mendatangkan respons yang positif dari orang lain) maka akan semakin sering pula tindakan dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
2. Proposisi Stimulan, artinya jika suatu stimulus tertentu telah merupakan kondisi di mana tindakan seseorang mendapatkan ganjaran, semakin serupa stimulus yang ada dengan stimulus tersebut akan semakin besar kemungkinannya bagi orang itu untuk mengulang tindakannya seperti yang ia lakukan pada waktu yang lalu.
3. Proposisi Nilai, artinya semakin bermanfaat hasil tindakan seseorang bagi dirinya maka akan semakin besar kemungkinan tersebut diulangi.
4. Proposisi Kejenuhan-Kerugian, artinya semakin sering seseorang tersebut mendapatkan ganjaran yang istimewa maka ganjaran tersebut akan menjadi kurang bermakna.
5. Proposisi Persetujuan-Perlawanan, artinya jika seseorang tidak mendapat ganjaran seperti yang ia inginkan, atau mendapat hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan menjadi marah dan akan semakin besar kemungkinan bagi orang tersebut untuk mengadakan perlawanan atau menentang, dan hasil dari tingkah laku semacam ini akan menjadi lebih berharga bagi dirinya, demikian pula sebaliknya.

Beberapa pemikiran di atas, dipertegas lagi oleh Weber yang dikutip oleh Veeger, (1990: 174), mencoba membuat klasifikasi perilaku sosial di masyarakat dengan membaginya atas empat tipe, yaitu:

1. Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan;
2. Kelakuan yang berorientasi kepada suatu nilai, seperti keindahan (nilai estetis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan) dan seterusnya;
3. Kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang sehingga disebut "kelakuan efektif atau emosional;
4. Ada kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi sehingga disebut "kelakuan tradisional".

Parson sebagaimana dikutip oleh Zamroni, (1992:27) mengemukakan konsep perilaku sukarela yang menyangkut beberapa elemen pokok, yaitu:

1. Aktor sebagai individu
2. Aktor memiliki tujuan yang hendak dicapai
3. Aktor memiliki berbagai cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut.
4. Aktor dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat memengaruhi pemilihan cara-cara yang akan digunakan mencapai tujuan tersebut.
5. Aktor dikomando oleh nilai-nilai, norma dan ide-ide dalam menentukan tujuan yang diinginkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Perilaku termasuk bagaimana aktor mengambil keputusan tentang cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dipengaruhi oleh ide-ide, dan situasi-kondisi yang ada.

Selanjutnya, Susan Stainback (2003) menyatakan bahwa "Temuan dalam kajian peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil atau besar. Bila dilihat dari *level of explanation*, kajian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain; atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori. Hasil kajian kualitatif yang tertinggi kalau sudah dapat menemukan teori, atau hukum-hukum, dan paling rendah adalah kalau masih bersifat deskriptif.

Oleh karena itu, konteks dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat maka yang dibahas adalah perilaku politik elite masyarakat (elite Nahdlatul Ulama) dalam pemilihan Kepala Daerah. Pendekatan ini dapat digunakan untuk meneliti orientasi individu terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, harapan, dan sebagaintya (Budiardjo, 1999).

BAGIAN VI

Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama pada Pilkada Kota Samarinda

Keputusan dalam Pilihan Politik

Hasil wawancara mendalam dengan informan bahwa perilaku politik elite-elite Nahdlatul Ulama rata-rata di dalam mengambil keputusan dalam pemilihan kepala daerah selalu bersifat kolegial. Hal ini dilakukan melalui rapat pengurus Nahdlatul Ulama kota Samarinda. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa:

> "Secara kelembagaan dan keorganisasian saya sebagai ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Samarinda, selalu membicarakan ini dengan internal pengurus agar Nahdlatul Ulama secara kelembagaan independen kalau elite-elite Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang bermain silahkan asal jangan membawa-bawa Nahdlatul Ulama secara struktur". (wawancara KH.M.Munzir, Ketua PC NU, tanggal 10 November 2016).

Gambar 6.1 wawancara dengan Ketua PC NU Kota Samarinda, KH.M.Mundzir, MH.

Sementara itu informan yang lain juga mengatakan bahwa mereka sering diundang oleh elite-elite Nahdlatul Ulama untuk membicarakan yang berkaitan dengan calon kepala daerah dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal itu dibicarakan dalam pertemuan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. Dalam hal ini, informan tersebut mengatakan:

> "Instruksi resmi sih tidak ada, tetapi dalam rapat-rapat selalu dibicarakan untuk mendukung salah satu calon walaupun ada juga elite-elite Nahdlatul Ulama yang mempunyai pilihan calon dengan alasan siapapun terpilih kedua-duannya orang-orang Nahdlatul Ulama ada". (wawancara Haryono, Ketua MWC NU Kec.Samarinda Ilir, tanggal 09 November 2016).

Pandangan di atas senada dengan informan-informan yang lain, informasi yang dipaparkan oleh informan kali ini dalam melihat cara pengambilan keputusan di kalangan elite-elite Nahdlatul Ulama berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, menurutnya:

> "Saya pernah diundang untuk pertemuan dengan elite-elite Nahdlatul Ulama membicarakan pemilihan Kepala Daerah dalam rangka memenaangkan salah satu calon". (wawancara Muhammad Dardiri, tanggal 12 November 2016).

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa para elite-elite Nahdlatul Ulama dalam memenangkan salah satu calon yang diunggulkan, selalu melakukan rapat atau pertemuan dalam mengambil sebuah keputusan.

Selain itu, data tersebut mengandung makna bahwa dari elite-elite Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan kegiatannya selalu melakukan komunikasi dengan calon atau tim sukses calon. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa :

> "Secara resmi tidak, tetapi dengan hadirnya dia calon wali kota pada pengajian majelis itu menandakan dan tidak perlu diomongkan, jemaah sudah paham pasti meminta dukungan." (wawancara KH.Silahuddin, Rais Syuriah PC NU, tanggal 12 November 2016).

Selain itu, hasil wawancara dengan informan bahwa perilaku elite Nahdlatul Ulama dalam pilkada kota Samarinda bersifat tidak independen. Walaupun setiap mengambil keputusan selalu melakukan pertemuan. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa:

> "Pada saat pilkada elite, khususnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tidak independen dan Nahdlatul Ulama akhirnya pecah. Seharusnya independen kan enak dalam pemilihan tidak dipengaruhi". (wawancara Mahmud, Ketua MWC NU Kec.Palaran, tanggal 12 November 2016).

Berikut di paparkan mengenai perilaku elite Nahdlatuil Ulama berkaitan dengan keputusan dalam pilihan politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah bahwa para elite membangun hubungan dengan calon-calon kepala daerah. Hal ini dikemukakan oleh informan menyatakan:

> "Saya melihat para elite Nahdlatul Ulama tidak independen dan mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Waktu itu, kami diundang rapat atau pertemuan berkaitan dengan pilkada. Oleh karena itu, sepertinya begitu itu menurut pribadi saya dan saya gak tau kalau orang lain yang menilai. (wawancara. Gufran. Ketua MWC NU Kec. Sambutan, tanggal 09 November 2016).

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari para informan bahwa para elite Nahdlatul Ulama dalam pilihan politiknya, mereka lebih memilih mendukung kepala daerah sesuai dengan keputusan bersama para elite Nahdlatul Ulama. Karenanya menurut informan ini:

"Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa para elite-elite Nahdlatul Ulama dalam pilihan politiknya terlibat dalam dukung mendukung calon kepala daerah dalam Pilkada. Mungkin saja ada dan ingin punya pengaruh kalau nanti calon itu yang didukung terpilih sehingga mereka bisa membangun jaringan untuk mendapatkan sesuatu kemudian dia tertawa". (wawancara Siswoyo, Ketua MWC NU Kec.Samarinda Ulu, tanggal 10 November 2017).

Pandangan di atas senada dengan informan-informan yang lain, informasi yang dipaparkan oleh informan kali ini dalam persepsinya keputusan pilihan politik para elite Nahdlatul Ulama, karena menurutnya:

"Para elite NU membangun komunikasi dengan pasangan calon karena beranggapan kita harus membangun komunikasi dengan para calon kepala daerah agar salah satu yang menang NU tetap ada. Oleh karena itu, instruksi secara resmi tidak ada, tetapi secara personal antar elite NU ada untuk memilih salah satu calon kepala daerah. Katanya si calon tersebut akan memberikan sesuatu kepada NU mungkin juga elite-elite NU". (wawancara M.Yazid, Ketua MWC NU Kec. Loa Janan, tanggal 10 November 2016).

Selanjutnya, informan yang satu ini dari hasil wawancara para elite Nahdlatul Ulama dalam keputusan pilihan politiknya, mereka lebih memilih calon kepala daerah yang memberikan janji politik seandainya mereka terpilih, informan menyatakan:

"Ada janji untuk memberikan bantuan perbaikan tempat pengajian dan masjid kami, kalau seandainya terpilih. Janji itu disampaikan oleh elite-elite Nahdlatul Ulama. Kami percaya saja dan mengikuti saja sesuai dengan arahan para elite yang ada dalam struktur PC NU. Kami beranggapan nanti calon tersebut terpilih akan bermanfaat bagi umat Islam khususnya warga NU". (wawancara Asriansyah, Ketua MWC NU Kec.Sei. Kunjang, tanggal 10 November 2016).

Dalam menentukan pilihan politiknya para elite-elite Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa harus di dukung oleh jajaran pengurus dan juga warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, media yang selalu digunakan untuk memastikan pilihan politik elite-elite Nahdlatul Ulama didukung warga NU lewat pertemuan atau rapat. Seperti yang dikemukakan informan berikutnya:

"Menurut saya, memang para elite NU sangat dekat dengan salah satu calon kepala daerah. Beberapa kali pertemuan yang saya hadiri mengarahkan untuk memilih salah satu calon kepala daerah. Waktu

> pertemuan sempat dilontarkan oleh salah satu elite NU bahwa nantinya NU akan diberikan akses seperti itu". (wawancara, dengan Ketua MWC NU Kec. Samarinda Kota, tanggal 10 November 2016).

Hasil wawancara mendalam dengan informan, diperoleh informasi bahwa keputusan dalam pilihan politik elite Nahdlatul Ulama bahwa mereka rata-rata memilih calon kepala daerah karena ingin punya pengaruh dalam proses pemerintahan, informan mengemukakan:

> "Mereka ingin punya pengaruh terhadap perjalanan pemerintahan di kota Samarinda. Dengan seperti itu, memberikan ruang kepada elite NU kalau nanti calon yang didukung menang. Kami selalu di undang pertemuan atau rapat untuk membicarakan tentang pilkada berkaitan dengan pilihan politik siapa calon kepala daerah yang harus didukung". (wawancara Munandar, Ketua MWC NU Kec. Samarinda Utara, tanggal 14 November 2016).

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa para elite Nahdlatul Ulama dalam memilih calon kepala daerah yang harus didukung, harus dengan selalu melakukan pertemuan sehingga memastikan bahwa keputusan pilihan politik benar-benar didukung oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama, baik yang berada di dalam struktur kepengurusan maupun yang tidak masuk dalam struktur disemua tingkatan.

Oleh karena itu, keputusan para elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon kepala daerah, harus ikut terlibat langsung menjadi bagian dari tim pemenangan. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa:

> "Bahwa pasti ada elite-elite Nahdlatul Ulama yang menjadi tim sukses calon wali kota, tetapi tidak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama kelembagaan". (wawancara KH.Munzir, Ketua PC NU, tanggal 10 November 2016).

Tindakan dalam Perilaku Politik

Menurut informan yang peneliti wawancara, berpendapat bahwa para elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah melakukan kegiatan yang kemudian mengundang tim suskses atau calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan. Informan menyatakan:

“Tetapi mereka tidak diundang, mungkin mereka diundang oleh elite-elite atau person pengurus Nahdlatul Ulama, tetapi yang pasti saya tidak mengundang karena anggapan saya bahwa yang datang itu adalah yang meminta dukungan bukan orang yang mendukung”. (wawancara, KH.Silahuddin, Rais Syuriah PC NU, tanggal 12 November 2016).

Gambar 6.2. Wawancara dengan KH.Silahuddin, Rais Syuriah PC NU Kota Samarinda

Sementara itu, informan yang lain juga mengatakan bahwa para elite-elite Nahdlatul Ulama selalu hadir dalam kegiatan pengajian majelis ta'lim yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Hal ini dikatakan informan:

“Mengadakan kegiatan pengajian kemudian tanpa diundang atau ada elite-elite Nahdlatul Ulama yang mengajak calon tersebut hadir dalam pengajian itu yang menandakan bahwa inilah yang harus dipilih”. (wawancara, Haryono, tanggal 09 November 2016).

Yang lebih ekstrem lagi, menurut informan bahwa elite Nahdlatul Ulama dalam perilaku politiknya untuk mendukung salah satu calon melakukan memobilisasi warga Nahdlatul Ulama. Seperti dinyatakan informan:

“Dalam pelaksanaan kampanye, kami diminta untuk mengarahkan warga Nahdlatul Ulama khususnya saya para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren untuk ikut kampanye dan itu diberi dana

> transportasi dan snack". (wawancara, Yazid, Ketua MWC NU Kec.Loa Janan, tanggal 10 November 2016).

Di samping itu, menurut informan yang lain bahwa perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah terjadi juga polarisasi dukungan. Polarisasi sangat tampak dikalangan elite-elite Nahdlatul Ulama. Hal ini informan menyatakan:

> "Sangat karena elite Nahdlatul Ulama mempunyai interaksi dengan calon wali kota sehingga elite Nahdlatul Ulama berjuang untuk memenangkan calon tersebut". (wawancara, Daldiri Ketua MWC NU Kec. Samarinda Seberang, tanggal 12 November 2016).

Selain itu, dari hasil wawancara di atas senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah berharap mempunyai pengaruh terhadap calon wali kota yang mereka dukung menang. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

> "Karena mereka ingin punya pengaruh terhadap perjalanan pemerintahan di kota Samarinda". (wawancara, Munandar Ketua MWC NU Kec.Samarinda Utara, tanggal 14 November 2016).

Sementara itu, informan yang lain beranggapan bahwa perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah di kota Samarinda secara terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah. Seperti yang dikatakan informan:

> "Secara langsung para elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon wali kota." (wawancara, Munandar, tanggal 14 November 2016).

Sementara informan lain beranggapan bahwa perilaku politik Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah sangat dekat dengan salah satu calon wali kota. Informan menyatakan:

> "Menurut saya memang para elite Nahdlatul Ulama sangat dekat dengan salah satu calon". (wawancara, Musleh Ketua MWC NU Kec. Samarinda Kota, tanggal 10 November 2016).

Hasil wawancara mendalam dengan salah satu informan bahwa perilaku politik elite Nahdlatul Ulama melakukan komunikasi dengan dua pasangan calon kepala daerah. Seperti yang dikatakan informan:

> "Para elite Nahdlatul Ulama membangun komunikasi dengan dua pasangan calon karena beranggapan kita harus membangun komunikasi keduanya biar salah satu yang menang Nahdlatul Ulama

> tetap ada". (wawancara, Yazid Ketua MWC NU Kec.Loa Janan, tanggal 10 November 2016).

Perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah kota Samarinda informan beranggapan bahwa para elite-elite Nahdlatul Ulama secara terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah. Hal ini informan menyatakan:

> "Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa elite-elite Nahdlatul Ulama terlibat di dalam mendukung calon wali kota". (wawancara, Siswoyo Ketua MWC NU Kec.Samarinda Ulu, tanggal 10 November 2016).

Selain itu, informan yang lain menyatakan bahwa pada pemilihan kepala daerah kota Samarinda para elite Nahdlatul Ulama mendukung calon kepala daerah untuk mencari popularitas. Di samping itu, untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan informan:

> "Saya melihat tidak independen dan mencari popularitas dan keuntungan pribadi". (wawancara, Gufron Ketua MWC NU Kec. Sambutan, tanggal 09 November 2016).

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari para informan bahwa para elite Nahdlatul Ulama dalam tindakan politiknya dalam mendukung salah satu calon kepala daerah, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti lewat pengajian majelis ta'lim untuk memperkenalkan calon tertentu. Seperti yang dikemukakan informan:

> "Kami di sini ada pengajian, kemudian kami melaksanakan pengajian dan mengundang calon wali kota dan kami mengajak kepada warga khususnya warga NU untuk memilih karena nanti kalau calon terpilih akan bermanfaat bagi umat Islam khususnya warga NU". (wawancara Ardiansyah, Ketua MWC NU Kec. Sei. Kunjang, tanggal 10 November 2016).

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari informan bahwa elite Nahdlatul Ulama dalam tindakan politiknya sangat tidak independen. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa:

> "Pada saat Pilkada elite NU khususnya PC NU tidak independen dan NU akhirnya pecah, seharusnya kan harus independen kan enak dalam pemilihan tidak dipengaruhi. Tentu dalam hal ini elite NU ingin mencari pengaruh kekuasaan dan pasti ada embel-embelnya sambil tertawa". (wawancara Mahmud, tanggal 12 November 2016).

Dalam setiap pemilihan kepala daerah, elite organisasi kemasyarakatan pasti mencari incaran para calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan. Menurut informasi dari para informan bahwa elite Nahdlatul Ulama seperti dikatakan informan:

> "Saya rasa pasti ada elite NU yang menjadi tim sukses calon wali kota, walaupun hal itu tidak membawa kelembagaan. Namun, dengan kehadiran elite NU menjadi bagian dari tim sukses itu menandakan dukungan organisasi terhadap calon kepala daerah tertentu". (wawancara Munzir, tanggal 10 November 2016).

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan olahan data menunjukkan bahwa perilaku politik elite Nahdlatul pada pemilihan kepala daerah kota Samarinda mendukung salah satu calon kepala daerah. Hal itu dinyatakan informan:

> "Pada intinya mendukung salah satu pasangan calon". (wawancara, Haryono, tanggal 09 November 2016).

Sikap dalam Berpolitik Praktis

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari para informan bahwa perilaku politik elite Nahdlatul Ulama mereka rata-rata melakukan interaksi untuk mendapatkan dukungan dengan cara pengajian kepada warga Nahdlatul Ulama. Seperti dikatakan informan:

> "Pada intinya kami melakukan pengajian kemudian mengundang calon wali kota untuk hadir dengan begitu secara otomatis ini bentuk dukungan warga kepada calon tersebut". (wawancara, Musleh Ketua MWC NU Kec.Samarinda Kota, tanggal 10 November 2016).

Sementara itu, informan lain beranggapan bahwa lewat pengajian majelis ta'lim elite Nahdlatul Ulama dapat melakukan sosialisasi kepada warga Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan dukungan terhadap calon kepala daerah yang mereka dukung. Seperti yang dikemukakan informan ini:

> "Kami disini ada pengajian maka kemudian kami melaksanakan pengajian dan mengundang calon wali kota dan kami mengajak kepada warga khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk memilih karena nanti kalau calon terpilih akan bermanfaat bagi umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama". (wawancara, Aliansyah Ketua MWC NU Kec.Sei Kunjang, tanggal 10 November 2016).

Di samping itu, informan yang lain juga menyatakan bahwa elite Nahdlatul Ulama memanfaatkan momen pengajian untuk menyampaikan bahwa calon kepala daerah yang mereka dukung akan memberikan manfaat bagi umat. Sebagaimana yang disampaikan informan:

> "Tertawa sambil mengatakan bahwa saya secara terang-terangan menyampaikan untuk memilih salah satu calon kepada warga karena saya beranggapan bahwa calon yang dimaksud dapat membawa perubahan dan kemaslahatan dan kepentingan warga Nahdlatul Ulama dapat diakomodasi". (wawancara, Yazid Ketua MWC NU Kec. Loa Janan, tanggal 10 November 2016).

Perilaku politik elite Nahdlatul Ulama menurut informan ini bahwa elite Nahdlatul Ulama dengan calon kepala daerah selalu melakukan kontrak politik dengan tujuan dukungan warga tetap konsisten. Hal itu seperti dikatakan informan:

> "Ada semacam kontrak malahan ada elite-elite Nahdlatul Ulama sudah melakukan tanda tangan kontrak untuk memberikan dukungan". (wawancara, KH.Silahuddin Rais Syuriah PC NU, tanggal 12 November 2016).

Dengan demikian, para elite Nahdlatul Ulama menurut informan ini selalu melakukan komunikasi dengan calon kepala daerah. Informan menyatakan:

> "Setelah pilkada hubungan elite-elite Nahdlatul Ulama dengan calon terpilih cukup harmonis". (wawancara, Mahmud Ketua MWC NU Kec. Palaran, tanggal 12 November 2016).

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa perilaku politik elite Nahdlatul Ulama komunikasi elite Nahdlatul Ulama dengan kepala daerah sangat intens. Hal ini dikemukakan informan:

> "Baik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tanpa diminta kami datang untuk memberikan masukan kepada pemerintah terpilih". (wawancara, KH.Munzir Ketua PC NU, tanggal 10 November 2016).

Berikut di paparkan mengenai sikap politik praktis para elite Nahdlatul Ulama yang mendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah kota Samarinda tahun 2015. Sehubungan dengan hal itu, informan menyatakana:

"Saya melihat para elite Nahdlatul Ulama sudah masuk dalam politik praktis. Karena para elite Nahdlatul Ulama sudah ikut mendukung salah satu calon kepala daerah". (wawancara Gufran, tanggal 09 November 2016).

Namun, informasi dari para informan yang lain bahwa elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah kota Samarinda mendukung salah satu calon kepala daerah, informan menyatakan:

"Pada intinya mendukung salah satu pasangan calon. Pada dasarnya kami ok-ok saja yang penting itu untuk kepentingan NU. Secara jelas para elite-elite Nahdlatul Ulama akan diperhatikan oleh calon kepala daerah ketika mereka menang". (wawancara Haryono, tanggal 09 November 2016).

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari para informan bahwa elite Nahdlatul Ulama sudah bukan rahasia lagi dalam sikap politiknya mendukung salah satu calon kepala daerah. Informan mengemukakan:

"Sudah bukan rahasia umum bahwa elite Nahdlatul Ulama terlibat di dalam dukung mendukung calon wali kota. Mungkin saja ada dan ingin punya pengaruh kalau nanti calon itu terpilih sehingga mereka bisa membangun jaringan untuk mendapatkan sesuatu kemudian tertawa". (wawancara Siswoyo, tanggal 10 November 2016).

Pandangan di atas senada dengan informan-informan yang lain, informasi yang dipaparkan oleh informan kali ini dalam persepsinya untuk sikap politik elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan kepala daerah, karena menurutnya:

"Kedekatan elite NU secara personal mungkin barangkali yang bersangkutan sudah diberikan fasilitas. Ya mungkin juga sudah berutang budi kepada calon tertentu sehingga tidak bisa lagi menghindari calon tersebut". (wawancara Daldiri, tanggal 12 November 2016).

Sementara itu, dari hasil wawancara dan informasi dari informan kali ini bahwa elite Nahdlatul Ulama dalam sikap politiknya mendukung salah satu calon kepala daerah kota Samarinda tahun 2015, menyatakan:

"Secara langsung para elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon wali kota. Karena mereka ingin punya pengaruh terhadap perjalanan pemerintahan di kota Samarinda.Ya sebab dengan seperti

itu memberikan ruang kepada elite Nahdlatul Ulama kalau nanti calon yang didukung menang". (wawancara Munandar, tanggal 14 November 2016).

BAGIAN VII

Menelisik Faktor-Faktor Perilaku Politik Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Samarinda

Perubahan sosial politik yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan telah mendorong elite-elite daerah untuk terlibat aktif dalam merespon perubahan tersebut. Sebagaimana yang menjadi kecenderungan umum di banyak masyarakat Indonesia, sekelompok masyarakat memegang peranan penting, sedangkan kelompok lain menjadi mayoritas dan tidak memiliki kekuasaan. Jadi, dua kelompok yang berbeda kedudukan, fungsi, dan peranan sosialnya, yaitu kelompok yang memimpin sebagai golongan kecil yang oleh para ilmuwan sosial disebut sebagai elite, sedangkan masyarakat umum dianggap sebagai massa kebanyakan. Pareto (dalam Jurdi: 2004: 199) menyebut elite sebagai the rulling class, yaitu kelas elite yang memerintah, yang terdiri dari para individu yang secara langsung ataupun tidak langsung memainkan peranannya, sementara di pihak lain ada kelas yang dikuasai atau kelas yang diperintah.

Posisi perilaku elite dalam Nahdlatul Ulama kota Samarinda merupakan jawaban atas isu-isu politik yang berkaitan dengan

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*) di tingkat lokal. Oleh karena itu, pergeseran perilaku politik elite Nahdlatul Ulama disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhinya dalam pemilihan kepala daerah.

Pertimbangan Rasional

Berikut di paparkan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan kepala daerah kota Samarinda. Hal ini dikemukakan oleh informan:

> "Katanya si calon tersebut akan memberikan sesuatu kepada Nahdlatul Ulama mungkin juga elite-elite Nahdlatul Ulama". (wawancara, Yazid Ketua MWC NU Kec.Loa Janan, tanggal 10 November 20016).

Informan yang lain juga mengatakan bahwa terjadinya faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah dikarenakan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Hal ini dikemukakan:

> "Mobil operasional dan sekretariat akan dibangunkan" (wawancara, Haryono Ketua MWC NU Kec.Samarinda Ilir, tanggal 09 November 2016).

Namun, faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama menurut informan ini bahwa warga Nahdlatul Ulama dengan arahan elite masih rasional dalam memilih kepala daerah. Seperti yang dikemukakan informan:

> "Ya tentu warga Nahdlatul Ulama cukup berpengalaman di dalam memilih pemimpin tentu melihat bagaimana visi dan program kerja calon ada tidak manfaat bagi orang banyak dan lebih khusus warga Nahdlatul Ulama". (wawancara, Aliansyah Ketua MWC NU Kec.Sei. Kunjang, tanggal 10 November 2016).

Pandangan di atas senada dengan informan-informan yang lain, informasi yang dipaparkan oleh informan kali ini dalam pandangannya berkaitan dengan faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama, karena menurutnya:

> "Ada, tetapi sebagai pengurus Nahdlatul Ulama saya melihat dahulu apakah programnya mempunyai dampak kepada kepentingan masyarakat banyak khususnya warga Nahdlatul Ulama". (wawancara,

Munandar Ketua MWC NU Kec.Samarinda Utara, tanggal 14 November 2016).

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari para informan, mengatakan:

> "Sangat memengaruhi walaupun kami juga melihat dahulu figurnya siapa". (wawancara, Gufron Ketua MWC NU Kec.Sambutan, tanggal 09 November 2016).

Sementara informan lain memaparkan bahwa yang mempengarui perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah. Hal itu dikemukakan:

> "Setahu saya ada juga tergantung apakah itu bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama atau tidak, tetapi itu punya pengaruh". (wawancara, Siswoyo Ketua PC NU Kec.Samarinda Ulu,tanggal 10 November 2016).

Pandangan yang sama dengan informan lain dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa:

> "Kalau itu menuju kebaikan akan dipertimbangkan latar belakang calon apa program punya kemanfaatan gak terhadap warga". (wawancara, Mahmud Ketua MWC NU Kec. Palaran, tanggal 12 November 2016).

Selanjutnya, seperti pandangan di atas senada dengan informan-informan yang lain, informasi yang dipaparkan oleh informan berikut ini bahwa:

> "Ya karena mereka juga melihat seperti apa figur seorang calon apakah membawa manfaat bagi warga dalam program-program kerjanya". (wawancara, Daldiri Ketua MWC NU Kec. Samarinda Seberang, tanggal 12 November 2016).

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dari informan yang memengaruhi perilaku politik para elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah selalu mempertimbangkan berbagai aspek. Informan menyatakan:

> "Di dalam memilih kepala daerah elite Nahdlatul Ulama mempertimbangkan berbagai aspek seperti, ketokohan, pengalaman dalam mengelola pemerintahan serta program kerjanya. Ini menjadi pertimbangan karena banyak problem pemerintahan dan masyarakat yang harus ditangani oleh Kepala Daerah". (wawancara Munzir, 10 November 2016).

Di samping itu, hasil wawancara mendalam dari informan bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung calon Kepala Daerah, figur masih menjadi pertimbangan yang cukup diutamakan, seperti dikemukakan informan:

> "Ketokohan atau figur seseorang menjadi dasar utama dalam memilih calon wali kota. Karenanya, elite Nahdlatul Ulama yang merupakan refresentasi warga Nahdlatul Ulama sangat memperhatikan figur wali kota. Ditambah lagi dengan kemampuan manajemen mengelola pemerintahan maka keinginan masyarakat untuk sejahtera dapat terwujud lewat program kerjanya". (wawancara Musleh, tanggal 10 November 2016).

Dari hasil wawancara di atas, bahwa pada prinsipnya yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung calon kepala daerah mempertimbangkan secara rasional baik dari aspek, figur, ketokohan, kemampuan manajerial maupun program kerjanya.

Selain itu, data tersebut menguatkan bahwa elite Nahdlatul Ulama lebih mengutamakan visi, misi dan program kerja calon wali kota. Hal ini tentu juga menjadi pertimbangan para elite Nahdlatul Ulama dalam melakukan sosialisasi kepada warga Nahdlatul Ulama untuk memilih pemimpin daerah mereka.

Oleh karena itu, informan yang ini menginformasikan bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam menetukan pilihan kepala daerah, karena menurutnya:

> "Pilihan terhadap calon tertentu harus juga melihat di samping kemampuan dalam memimpin juga tidak kalah pentingnya adalah moralnya. Karena cerminan sebuah masyarakat yang baik adalah cermin dari pemimpinnya yang bermoral". (wawancara Silahuddin, tanggal 12 November 2016).

Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama adalah mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek program kerja dan visi dan misi serta program kerja calon wali kota. Informan mengemukakan:

> "Bahwa memilih salah satu calon kepala daerah pada prinsipnya melihat figur dan program kerja dari calon kepala daerah. Di samping itu juga, yang membawa kemaslahatan dan kepentingan warga NU dapat diakomodasi". (wawancara Yazid, tanggal 10 November 2016).

Gambar 7.3 Salah satu kegiatan PC NU Kota Samarinda yang menampilkan calon wakil wali kota Samarinda yang didukung.

Menguatnya Pragmatisme

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama menurut informan ini menyatakan:

> "Saya kira itu bukan rahasia umum, tetapi mungkin ada pengurus yang begitu, tetapi Nahdlatul Ulama harus tetap konsisten tetapi juga aja elite-elite Nahdlatul Ulama satu dua yang menerima itu". (wawancara, KH.Silahuddin Rais Syuriah PC NU, tanggal 12 November 2016).

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang satu ini bahwa faktor yang memengaruhi perilaku elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan kepala daerah, informan tersebut menyatakan:

> "Ya mungkin juga karena mungkin sudah berutang budi kepada calon tertentu sehingga tidak bisa lagi menghindari calon tersebut". (wawancara, Daldiri Ketua MWC NU Kec.Samarinda Seberang, tanggal 12 November 2016).

Sementara informan yang lain, informasi yang dipaparkan informan kali ini lebih ekstrem dalam pandangannya bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama, menurutnya:

> "Ada kalau sudah diberi uang pasti terjadi peralihan dukungan apalagi lebih besar pemberiannya". (wawancara, Mahmud Ketua MWC NU Kec. Palaran, tanggal 12 November 2016).

Pandangan di atas senada dengan informan-informan yang lain, menunjukkan bahwa:

> "Ada yang saya ingat seperti pemberian sembako dan transaksi politik yang lain berupa dana operasional dan bantuan untuk sarana prasarana". (wawancara, Munandar Ketua MWC NU Kec.Samarinda Utara, tanggal 14 November 2016).

Sementara dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari para informan faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama, disampaikan bahwa:

> "Ada janji untuk memberikan bantuan perbaikan tempat pengajian dan masjid kami". (wawancara, Aliansyah Ketua MWC NU Kec.Sei. Kunjang, tanggal 10 November 2016).

Senada dengan informan yang lain, informan yang satu ini beranggapan bahwa yang memengaruhi perilaku elite Nahdlatul Ulama, menurutnya:

> "Pada dasarnya kami ok-ok saja yang penting itu untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Secara jelas bahwa Nahdlatul Ulama dan elite-elite Nahdlatul Ulama akan diperhatikan oleh calon kalau dia terpilih". (wawancara, Haryono Ketua MWC NU Kec.Samarinda Ilir, tanggal 09 November 2016).

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari informan bahwa yang memengaruhi perilaku elite Nahdlatul Ulama dikarenakan menurut informan:

> "Berupa tawaran fasilitas sarana dan prasarana. Ada dan itu sudah umum terjadi". (wawancara, Musleh Ketua MWC NU Kec.Samarinda Kota, tanggal 10 November 2016).

Pandangan informasi yang dipaparkan oleh informan ini tentang yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dipengaruhi karena menurutnya:

> “Mungkin saja ada dan ingin punya pengaruh kalau nanti calon terpilih sehingga mereka bisa membangun jaringan untuk mendapatkan sesuatu kemudian informan tertawa”. (wawancara, Siswoyo Ketua MWC NU Kec.Samarinda Ulu, tanggal 10 November 2016).

Sebagaimana yang di sampaikan oleh informan ketika peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan kepala daerah, informan mengatakan bahwa:

> “Secara jujur ada dijanjikan kalau seandainya terpilih”. (wawancara, Gufron Ketua MWC NU Kec.Sambutan, tanggal 09 November 2016).

Kemudian informan yang satu memaparkan bahwa yang memengaruhi perilaku politik dikarenakan faktor, hal itu dikatakan:

> “Ada pengaruh, tetapi sebagai elite Nahdlatul Ulama mengimbau kepada jemaah Nahdlatul Ulama untuk memilih yang rasional yang punya dampak terhadap Nahdlatul Ulama”. (wawancara, KH.Silahuddin Rais Syuriah, tanggal 12 November 2016).

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah dikarenakan faktor seperti yang dikemukakan oleh informan berikut ini:

> “Secara resmi tidak, tetapi pernah menjanjikan untuk pengadaan kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Samarinda yang beralamat di jalan A.Wahab Syahrani”. (wawancara, KH.Munzir Ketua PC NU, tanggal 10 November 2016).

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung calon wali kota, informan menyampaikan:

> “Katanya si calon tersebut akan memberikan sesuatu kepada Nahdlatul Ulama mungkin juga elite-elite NU. Kemudahan di dalam mendapatkan bansos atau hibah karena katanya rata-rata elite NU punya madrasah atau pengajian majelis ta’lim”. (wawancara Yazid, tanggal 10 November 2016).

Terlibat dalam *Power Sharing*

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi dari informan bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama karena faktor seperti yang dikemukakan informan bahwa:

> "Ada pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau elite-elite Nahdlatul Ulama akan dilibatkan dalam menentukan posisi jabatan di pemkot". (wawancara, KH.Silahuddin Rais Syuriah, tanggal 12 November 2016).

Sementara informan berikut ini, senada dengan informan yang lain bahwa yang memengaruhi perilaku poltik elite Nahdlatul Ulama hal ini dikatakan informan:

> "Hal itu ada akan diberikan kemudahan kepada elite-elite Nahdlatul Ulama dalam akses dilingkungan pemerintahan kota". (wawancara, Siswoyo Ketua MWC NU Kec.Samarinda Ulu, tanggal 10 November 2016).

Pandangan di atas senada juga dengan informan ini yang menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dikarenakan menurutnya:

> "Mungkin juga akses ke pemerintah kota kalau sudah terpilih akan memberikan ruang untuk bisa melakukan bargaining pada jabatan-jabatan tertentu". (wawancara, Musleh Ketua MWC NU Kec.Samarinda Kota, tanggal 10 November 2016).

Peneliti menanyakan kepada informan tentang faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah, informan mengatakan:

> "Kemudahan di dalam mendapatkan bantuan atau hibah karena katanya bahwa rata-rata elite Nahdlatul Ulama punya madrasah atau pengajian majelis ta'lim". (wawancara, Yazid Ketua MWC NU Kec.Loa Janan, tanggal 10 November 2016).

Menurut informan ini, ketika peneliti melakukan wawancara bahwa faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah kota Samarinda menurutnya:

> "Sangat berpengaruh karena nanti kalau wali kota terpilih memudahkan elite-elite Nahdlatul Ulama untuk memengaruhi penempatan jabatan-jabatan tersebut dan itu sudah pernah disampaikan oleh salah satu calon wali kota". (wawancara, Daldiri Ketua MWC NU Kec.Samarinda Seberang, tanggal 12 November 2016).

Sebagaimana yang disampaikan informan ini bahwa faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama informan juga mengatakan:

> "Karena:1. mencari pengaruh kekuasaan 2. pasti ada embel-embelnya". (wawancara, Mahmud Ketua MWC NU Kec.Palaran, tanggal 12 November 2016).

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah kota Samarinda informan mengatakan:

> "Ada, tetapi karena sumber daya manusia Nahdlatul Ulama kurang maka itu tidak bisa dipenuhi, tetapi kalau diminta pendapat ada". (wawancara, KH.Munzir Ketua PC NU, tanggal 10 November 2016).

Selanjutnya, diperoleh informasi dari informan bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama faktor utama adalah adanya kepentingan untuk terlibat dalam mengelola pemerintahan. Karena itu informan menyatakan:

> "Elite NU dilibatkan dalam menentukan jabatan-jabatan dilingkungan Pemerintahan Kota kalau calon tersebut menang. Menurut kami hal itu, wajar-wajar saja karena dia sudah berjuang untuk memenangkan calon tersebut. Tentu itu juga berimbas kepada warga NU". (wawancara Gufran, tanggal 09 November 2016).

Informan yang lain juga diperoleh informasi bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung salah satu calon kepala daerah berharap dalam proses perjalanan pemerintahan terlibat dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan tersebut. Seperti yang dikemukakan informan:

> "Secara jelas bahwa Nahdlatul Ulama dan elite-elite Nahdlatul Ulama akan diperhatikan oleh calon kepala daerah kalau dia terpilih. Tentu saja para elite Nahdlatul Ulama terlibat dalam proses perjalanan pemerintahan kota sesuai dengan bidang yang diberikan". (wawancara Haryono, tanggal 09 November 2016).

Pandangan di atas senada juga dengan informan-informan yang lain, informasi yang dipaparkan oleh informan kali ini bahwa yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama, karena menurut:

> "Sangat dekat sekali karena sudah banyak para elite Nahdlatul Ulama

diberikan akses dan jaringan oleh salah satu calon kepala daerah. Ikut dilibatkan dalam keputusan dan kebijakan pemerintah kota. Hal ini, menurut kami baik untuk elite itu sendiri terutama buat warga Nahdlatul Ulama". (wawancara Asliansyah, tanggal 10 November 2016).

Selanjutnya, menurut informan berikut ini bahwa faktor yang memengaruhi perilaku elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon wali kota, pada prinsipnya supaya elite NU mendapatkan akses ke pusat pemerintahan kota. Hal itu, dikemukakan informan:

> "Secara langsung para elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon wali kota. Karena mereka ingin punya pengaruh terhadap perjalanan pemerintahan kota Samarinda. Ya sebab dengan seperti itu memberikan ruang kepada elite Nahdlatul Ulama kalau nanti calon yang didukung menang". (wawancara Munandar. Tanggal 14 November 2016).

Gambar 7.4 Suasana rapat pengurus PC NU Kota Samarinda dengan agenda penentuan terhadap dukungan bakal calon wali kota

BAGIAN VIII

Analisis Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah

Secara bebas, perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik warga negara (masyarakat) yang dalam manifestasi konkretnya telah memiliki saling hubungan dengan kultur politik. Almond dan Powel (dalam Rusadi Kartaprawira, 1995 : 26) menyatakan bahwa sikap serta respons warga negara dalam menilai objek, peristiwa politik maupun aktivitasnya terhadap sistem politik sangat dipengaruhi oleh perilaku politik elite yang memerintah maupun sosial budaya dalam masyarakat.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku diterjemahkan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 1056). Sedangkan perilaku politik atau *political behaviour* adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah dan lembaga dalam proses politik. Oleh karena itu, perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan berkenaan

dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, antara lembaga pemerintah dan antar kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan, kebijakan dalam bidang politik pada dasarnya disebut dengan perilaku politik (Sastroatmodjo, 1995 : 2).

Sementara itu, studi tentang perilaku politik bisa berfokus pada individu-individu sebagai aktor yang berperan. Bisa juga dilakukan terhadap kelompok atau lembaga (organisasi) baik keagamaan, sosial, politik maupun ekonomi. Studi ini terfokus pada individu dalam lembaga (organisasi). Dalam hal politik, dengan mengacu pada pendapat David Easton, politik dipahami sebagai "Bagaimana mengalokasikan sejumlah nilai secara otoritatif bagi sebuah masyarakat" (*authoritative allocation of values for a society*). Sejumlah nilai yang dimaksud dapat berupa pencerahan, kebebasan, kedamaian, dan keadilan yang berimplikasi pada proses pendewasaan kehidupan politik kebangsaan (Jurdi, 2004 : 28).

Perilaku politik merupakan salah satu bagian dari perilaku sosial karena dalam berpolitik pasti ada interaksi antar satu individu ke satu individu, maupun sebaliknya antar satu individu ke banyak individu. Menurut Ramlan Surbakti (1999: 15 dan 13), perilaku politik adalah perilaku yang bersangkutan dengan proses politik, yakni suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Oleh karena itu, perilaku politik (*political behavior*) dinyatakan sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik tertentu. Perilaku politik yang dimaksud adalah menyangkut interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan masyarakat, serta antara kelompok dan individu dalam masyarakat, dalam rangka pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Dengan demikian, salah satu substansi dasar yang berkaitan dengan perilaku politik ialah; bahwa pendekatan tingkah laku politik menjadi sentral perhatian dan kajian dalam perspektif budaya politik.

Dapat dikatakan bahwa perilaku politik diartikan sebagai tindakan untuk mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat (*otoritative*) bagi suatu kelompok, ataupun masyarakat. Tindakan tersebut bermakna usaha untuk membangun kesadaran kolektif. Perilaku atau tindakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya semacam norma dan

nilai yang kemudian memengaruhi motivasi untuk membentuk sikap dan mendorong tindakan sebagai suatu perilaku politik (Jurdi, 2004).

Perilaku politik dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok terhadap semua atau sebagian kegiatan politik. Di dalamnya meliputi partisipasi, motivasi dan pemberian dukungan terhadap salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah pada salah satu jabatan politik.

Pada abad ke-20 ini merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern. Demokrasi yang dilansir Francis Fukuyama (dalam Hidajah, 2010) bahwa demokrasi adalah titik-titik akhir evolusi ideologi manusia dan bentuk final pemerintah, tetapi aura optimisme itu lebih disandarkan pada satu kenyataan bahwa memasuki kuartal abad ke-20 ini, banyak negara yang menjadi demokratis.

Oleh karena itu, dalam kerangka seperti tersebut, pemilihan kepala daerah secara langsung, mau tidak mau meletakkan publik sebagai bagian awal dalam pengembangan dan penumbuhan demokrasi yang dari realitas bawah. Realitas bawah sering kali dianggap sebagai bentuk pengejawantahan dari aspirasi publik riil, yang dianggap sebagai parameter dari pengembangan dan penumbuhan demokrasi.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah langsung, perlu dilihat kembali bahwa pemilihan kepala daerah langsung bisa menjadi arus balik demokrasi. Kerentanan akan munculnya konflik-konflik lokal di berbagai daerah dalam menghadapi arus demokrasi langsung susah untuk dihindari. Sorensen (1993) (dalam M. Mufti Mubarok, 2005 : 159 yang dikutip Hidajah, 2010) bahwa konflik demokrasi yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis.

Arus bawah, termasuk elite Nahdlatul Ulama merupakan minoritas-minoritas pribadi-pribadi dalam konteks ini dapat digolongkan ke dalam elite strategis di bidang sosial keagamaan, juga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan politik. Elite Nahdlatul Ulama bersifat kolegial, artinya, perumusan dan pengimplementasian kebijakan dilakukan secara kolektif dan jarang sekali mengandalkan seseorang karena elite tersebut

berada dalam suatu solidaritas mekanik (Sartono Kartodirdjo, 1983 dalam Syarifuddin Jurdi, 2004 : 31).

1. Keputusan Dalam Pilihan Politik Elite Nahdlatul Ulama

Keberadaan dan peran elite tidak lepas dari proses politik dan kekuasaan dalam kehidupan suatu masyarakat di mana elite itu berada. Dalam tataran mikro, dilihat pada kelompok elite sosial mana yang dianggap paling berkuasa atau berpengaruh dalam struktur kekuasaan kelompok elite itu yang pada akhirnya memengaruhi posisi dan peran warga Nahdlatul Ulama dalam kehidupan yang bersangkutan, sedangkan pada tingkat makro, dilihat pada kekuasaan elite apa saja yang tengah berkuasa dalam kehidupan sistem politik yang juga dimungkinkan memengaruhi peran dan posisi warga (Nashir, 2000 dalam Upe, 2008, 86).

Dengan demikian, perilaku politik merupakan bagian dari struktur dalam masyarakat. Struktur yang dimaksudkan adalah *rule and resources* (aturan dan sumber daya) yang terwujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu praktik sosial. Dalam artian, struktur tidak hanya bersifat mengekang (*contstraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga bersifat memungkinkan (*enabling*) terjadinya praktik sosial (Giddens, 2011).

Perubahan sosial politik yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan telah mendorong elite-elite daerah untuk terlibat aktif dalam merespons perubahan tersebut. Kemampuan dalam demokrasi mulai ditandai dengan adanya kebebasan mengemukakan pendapat, pembatasan atas kekuasaan, pemilihan umum dan pemilihan jabatan-jabatan publik yang kompetitif, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah langsung. Pemilihan kepala daerah langsung adalah suatu proses pemilihan umum karena keduanya senafas dan sejiwa serta tidak bisa dipisahkan. Dalam hal pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu tahap pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi solusi elegan sekaligus terobosan untuk mengatasi kemacetan demokrasi di tingkat lokal.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah bahwa kondisi masyarakat khusus warga Nahdlatul Ulama yang masih bersifat paternalistik dan primordial akan cenderung menginduk perintah pimpinan. Dalam hal ini, elite Nahdlatul Ulama, artinya dominasi

patron sangat kuat terhadap *client*-nya sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya secara mandiri terlebih lagi kalau telah diploitisasi (Karim, 2003 : 67).

Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi dan peranan elite, utamanya elite Nahdlatul Ulama perlu dilakukan sebagai berikut; *pertama*, analisis posisional menunjuk pada elite yang menduduki posisi tinggi dalam institusi-institusi formal yang disebut sebagai elite yang berkuasa atau elite yang memerintah. *Kedua*, analisis reputasional mendasarkan analisis keputusan yang lebih menempatkan elite sebagai orang atau sekelompok orang yang menentukan dalam pembuatan keputusan. Kedua bentuk analisis tersebut memang saling terkait dan saling tumpang tindih karena masing-masing posisi dan peran para elite mempunyai pertautan yang kemudian akan melahirkan kekuasaan elite yang terkonsentrasi (Jurdi, 2004 : 199). Elite Nahdlatul Ulama yang memiliki posisi formal, akan terkait dengan reputasi orang-orang yang secara informal memengaruhi proses pengambilan kebijakan organisasi.

Hasil wawancara dan data empiris kajian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan dan keorganisasian elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah di kota Samarinda selalu membicarakan dalam pertemuan dan rapat internal pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Namun, demikian secara kelembagaan dan organisasi harus independen.

Elite Nahdlatul Ulama berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi yang telah dirumuskan bersama untuk memajukan kehidupan umat dan bangsa dalam rangka menciptakan suatu peradaban yang maju, peradaban madani, atau peradaban *khairah ummah*. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi dan peranannya untuk melindungi kepentingan organisasi (juga warganya), elite Nahdlatul Ulama mempertimbangkan berbagai faktor demi terjaganya kepentingan bersama. Selain itu, elite Nahdlatul Ulama berfungsi untuk melakukan transformasi nilai-nilai yang bersifat normatif bermakna kebaikan kepada anggotanya atau warganya. Sebagaimana Aristoteles (dalam Jurdi, 2004 : 219) mengatakan dibutuhkan manusia-manusia luar biasa, manusia dengan kebajikan dan keutamaan, yang menilai keadilan dan kepentingan umum melebihi keuntungan pribadi.

Dengan demikian, mengutamakan keadilan dalam pemerataan dan menghindarkan diri dari perilaku yang rakus, itulah yang mesti diperankan oleh elite Nahdlatul Ulama. Elite Nahdlatul Ulama beranggapan bahwa sepanjang keterlibatan dalam politik dapat memperjuangkan aspirasi umat Islam (warga Nahdlatul Ulama) sebuah tugas yang mulia. Elite Nahdlatul Ulama menurut pengamatan penulis, dominan mengambil peran melalui *real politics*. Keterlibatannya dapat dipahami sebagai langkah untuk melakukan transformasi nilai-nilai Islam ke ranah kehidupan kebangsaan dan kenegaraan khususnya dalam pemilihan kepala daerah langsung.

Oleh karena itu, secara kelembagaan dan organisasi tidak ada instruksi resmi secara struktur ke tingkat pengurus di bawah. Tetapi, instruksi secara kultural selalu ada dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengajian melalui majelis ta'lim.

Sementara itu, saat peneliti bertanya tentang pengambilan keputusan di kalangan para elite Nahdlatul Ulama, rata-rata informan menyampaikan:

> "Pernah undang oleh elite Nahdlatul Ulama dalam pertemuan untuk membicarakan pemilihan kepala daerah dalam rangka memenangkan salah satu calon" (wawancara tanggal 12 November 2016).

Elite Nahdlatul Ulama bermakna kolektif. Artinya, setiap pandangan dan keputusan dalam pilihan politik yang mengatasnamakan organisasi selalu melalui mekanisme permusyawaratan dalam organisasi. Hal ini dipahami bahwa setelah melihat fakta politik sepanjang tidak merugikan kepentingan organisasi. Artinya, perumusan dan pengimplementasian kebijakan-kebijakan dilakukan kolektif karena elite tersebut berada dalam suatu solidaritas mekanik. Dapat dikatakan bahwa setiap orientasi sikap dan tindakan yang mengatasnamakan organisasi selalu dimusyawarahkan di antara elite.

Temuan 1. Semua keputusan elite Nahdlatul Ulama diterima warga Nahdlatul Ulama karena keputusan yang diambil bersifat kolektif.

Informasi yang diberikan oleh elite Nahdlatul Ulama terhadap keputusan dalam pilihan politik melalui proses rapat pengurus. Hal ini, dilakukan agar keputusan tersebut bisa diterima oleh semua pihak.

Temuan 2. Independensi organisasi tetap terjaga meskipun keputusan politik elite Nahdlatul Ulama mendukung sala satu pasangan calon kepala daerah.

Walaupun keputusan dalam pilihan politik elite Nahdlatul Ulama bersifat kolegial yang diputuskan melalui rapat pengurus. Namun, demikian independensi sebuah organisasi tetap harus dinomorsatukan. Hal ini, berkaitan dengan kewibawaan kelembagaan di mata masyarakat dan warganya.

Berdasarkan temuan 1 dan 2 maka **Proposisi Minor I :** Pilihan politik elite Nahdlatul Ulama yang diputuskan secara kolektif di terima oleh warga Nahdlatul Ulama dan independensi organiasi tetap terjaga.

2. Tindakan Dalam Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama

Setiap perilaku dan tindakan sosial kalangan elite mempunyai motif tertentu. Suatu tindakan, seperti dikatakan oleh Max Weber (Suzanne Keller, dalam Jurdi, 2004: 214), mempunyai makna, baik objektif maupun subjektif, bagi setiap individu yang menjadi faktor inti dalam perilaku yang terkait dengan perilaku orang lain. Oleh karena itu, makna setiap perilaku mempunyai arti secara sosial yang akhirnya bertanggung jawab untuk realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial.

Adalah keniscayaan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh masyarakat tidak serta-merta (*taken for granted*) menjadikan kualitas demokrasi di daerah meningkat. Harapan yang berlebihan bahwa pemilihan kepala daerah langsung akan meningkatkan kualitas demokrasi, salah-salah bisa mengaburkan pemahaman tentang strategi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, penghampiran terhadap aspek-aspek penting pmilihan kepala daerah. Akses itu berarti berfungsinya mekanisme *chek and balance*. Dimensi *chek and balance* meliputi hubungan Kepala Daerah dengan rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rakyat; Kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah, tetapi juga Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan lembaga Yudikatif dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam melakukan tindakan-tindakannya, secara organisatoris berdasar kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta tata aturan organisasi hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Pengurus dalam hal ini, elite Nahdlatul Ulama dalam melakukan tindakan-tindakannya diharapkan dapat bersandar dan mengacu pada ketentuan organisasi dan pada realitas politik yang dihadapi warga Nahdlatul Ulama. Namun, demikian disadari bahwa tindakan elite Nahdlatul Ulama diputuskan dengan dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu para pihak atau kepentingan tersembunyi (*hidden dimensions*) pengurus, elite kekuasaan, elite bisnis, struktur kekuasaan negara dan lain-lain.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung salah satu calon kepala daerah dilakukan dalam bentuk melakukan kegiatan pengajian majelis ta'lim bertatap muka langsung dengan calon kepala daerah. Di samping itu, melakukan tatap muka tidak langsung lewat sosialisasi calon kepada warga. Tindakan tersebut menurut Max Weber, yaitu tindakan didasarkan pada tujuan, nilai-nilai yang dianggap mempunyai kebenaran. Selain untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah dirumuskan secara bersama, adakalanya diwarnai pula oleh motif-motif tertentu yang barangkali hanya elite Nahdlatul Ulama itu sendiri yang mengetahuinya.

Keterlibatan seseorang dalam hal ini, elite Nahdlatul Ulama dalam wilayah politik tetap mengandung kepentingan, mulai dari isu-isu yang bersifat sosial, keadilan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan kehidupan umat hingga kepentingan subjektif pelaku.

Perubahan tindakan politik elite Nahdlatul Ulama dalam perspektif tindakan sosial dalam melakukan tindakan-tindakan politiknya memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tujuan serta keyakinannya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi babak baru dalam tindakan sosial elite Nahdlatul Ulama yang juga berarti adanya perubahan pemikiran yang dilandasi dengan pilihan rasional.

Namun, demikian tindakan politik elite Nahdlatul Ulama mendapatkan dukungan warga Nahdlatul Ulama. Artinya,

mendukung sejauh mana kepentingan elite Nahdlatul Ulama itu terpenuhi meskipun kepentingan itu sungguh bernilai sosial, apalagi kepentingan itu untuk organisasi dan warganya.

Secara umum tindakan-tindakan yang dilakukan oleh elite Nahdlatul Ulama cukup diterima dan memenuhi harapan warga Nahdlatul Ulama. Karena tindakan yang dilakukan memang menjadi harapan dan keinginan besar warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, dalam perspektif teori pertukaran semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang akan melakukan tindakan itu. Umumunya, perilaku yang sesuai dengan proposisi keberhasilan meliputi tiga tahap, yaitu: (1) tindakan orang; (2) hadiah yang dihasilkan; (3) perulangan tindakan asli atau sekurang-kurangnya tindakan yang serupa dalam hal tertentu (Upe, 2008 : 99).

Dalam kaitannya dengan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama, lebih jauh Lasswell (dalam Varma, 2003) menjelaskan dua hal penting, yaitu: (1) perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan tersebut, dibentuk oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian, dan (2) perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Temuan 3. Tindakan politik elite Nahdlatul Ulama dilakukan dalam bentuk langsung maupun tidak langsung dan melalui cara-cara konvensional dan non konvensional guna mendapatkan dukungan dari warga Nahdlatul Ulama.

Elite Nahdlatul Ulama melakukan silaturrahmi lewat acara-acara pengajian majelis ta'lim memperkenalkan dan menyosialisasikan calon kepala daerah. Hal ini, dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari warga Nahdlatul Ulama. Karena lewat acara pengajian majelis ta'lim bukan hanya warga Nahdlatul Ulama yang hadir, tetapi juga masyarakat umum. Dengan demikian, elite Nahdlatul Ulama melakukan sosialisasi calon kepala daerah yang akan didukung kepada masyarakat.

Temuan 4. Tindakan politik elite Nahdlatul Ulama di terima dan memenuhi harapan warga Nahdlatul Ulama.

Dengan melakukan sosialisasi, calon kepala daerah yang akan di dukung elite Nahdlatul Ulama mampu meyakinkan kepada warga Nahdlatul Ulama bahwa calon kepala daerah yang didukung adalah calon yang terbaik. Sehingga warga Nahdlatul Ulama dapat menerima dan memenuhi harapan yang diinginkan.

Berdasarkan temuan 3 dan 4 maka **Proposisi Minor 2 :**

Bentuk dukungan didapatkan secara langsung atau tidak langsung menunjukkan tindakan politik elite Nahdlatul Ulama di terima dan memenuhi harapan warga Nahdlatul Ulama.

3. Sikap Dalam Berpolitik Praktis Elite Nahdlatul Ulama

Dalam memahami perilaku politik elite Nahdlatul Ulama, bentuk sikap dan perilaku elite dapat dikelompokkan dalam dua kelompok: *pertama*, orientasi sikap partisipasi dalam kegiatan politik khususnya perilaku pemilih dalam pemilu (khususnya Pilkada) dan *kedua*, orientasi sikap dan pola hubungan dengan pemerintah. Dimensi sikap elite yang terfokus pada dua orientasi tersebut melahirkan berbagai kecenderungan sikap elite yang beragam dalam memandang hubungan Nahdlatul Ulama dengan politik praktis ataupun pemerintah (Nashir, 2000 : 148).

Namun, sebagai upaya untuk melihat pandangan sikap elite Nahdlatul Ulama dalam pentas politik, *Pertama*, sikap politik elite yang bersifat ideal memiliki kecenderungan yang kurang kooperatif terhadap pemerintah atau partai politik. *Kedua*, sikap elite pragmatis menunjukkan kecenderungan elite untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah (Jurdi, 2004: 210). Kelompok ini dalam beberapa hal memperlihatkan sikap politik yang pragmatis-praktis dengan meleburkan diri ke dalam wilayah politik praktis, bahkan ada upaya serius dari kelompok elite ini dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung untuk mengampanyekan kepada warga Nahdlatul Ulama agar memilih calon kepala daerah tertentu yang sesuai dengan visi politik elite Nahdlatul Ulama.

Sikap dan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama yang tidak konstan, adakalanya akomodasionis, resiprokal kritis, serta antagonistis menjadi fenomena yang menarik dan unik sehingga sering sulit dipahami di kalangan umat Islam. Sikap akomodasionis dan konsensus lebih banyak diterapkan tatkala berhadapan dengan

otoritas kekuasaan. Oleh karena itu, sikap dan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama terbentuk berdasar pertimbangan maslahah-mafsadat, manfaat-madharat atau untung rugi bagi kepentingan organisasi dan warganya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi (Daman, 2001 : 238).

Sikap politik elite Nahdlatul Ulama Samarinda masih memperlihatkan pola perilaku yang netral terhadap semua calon kepala daerah. Elite Nahdlatul Ulama juga mengembangkan kerja sama dan komunikasi yang intens dengan para calon kepala daerah. Sikap politik inklusif masih menjadi pilihan terbaik bagi elite Nahdlatul Ulama dalam mengartikulasikan peran-peran sosialnya. Oleh karena itu, pengembangan pola perilaku politik inklusif akan membantu elite Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan problem-problem lokal, umat maupun internal warga Nahdlatul Ulama.

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa diperlukan pemimpin Islam yang mementingkan fungsi inklusif dan integratif. Peran inklusif menjadi penting dalam kondisi masyarakat saat ini karena disparitas politik dan liberalisasi sosial politik dan ekonomi telah membawa umat kepada sebuah keadaan yang tidak menentu dan melahirkan berbagai persoalan baru bagi masyarakat (Abdurrahman Wahid 1999, dalam Jurdi, 2004 : 214). Itulah pentingnya elite Nahdlatul Ulama tampil dengan wajah menyejukkan dan mampu membangun kesadaran kolektif umat, menjadi perekat, penyejuk, dan melindungi kepentingan organisasi khususnya warga Nahdlatul Ulama.

Dikemukakan oleh Ketua PC NU Kota Samarinda, bahwa pada hakekatnya proses pemilihan kepala daerah agar lancar dan berhasil sukses tentunya elite Nahdlatul Ulama mempunyai sikap mendukung salah satu calon kepala daerah. Dengan demikian, calon yang terpilih akan dapat membangun kota Samarinda dengan baik. Sehingga Nahdlatul Ulama bisa memberikan masukan kepada pemerintah kota Samarinda diminta atau tidak. Pada prinsipnya demi untuk kepentingan masyarakat dan Nahdlatul Ulama selalu memberikan masukan yang konstruktif.

Sikap elite Nahdlatul Ulama kota Samarinda dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya warga Nahdlatul Ulama dilakukan dengan mendorong dan mendukung

calon kepala daerah yang dianggap bisa membawa perubahan dan kepentingan warga Nahdlatul Ulama dapat terpenuhi.

Sikap politik elite Nahdlatul Ulama kota Samarinda bersifat inklusif masih menjadi pilihan terbaik bagi elite Nahdlatul Ulama dalam mengartikulasikan peran-peran sosialnya. Sikap politik elite Nahdlatul Ulama bersifat ideal memiliki kecenderungan bersikap kooperatif dengan pemerintah asalkan pemerintah tidak melakukan tindakan yang zalim dan mungkar. Disinilah sikap Nahdlatul Ulama mengawal pemerintahan yang sah menurut konstitusi.

Dalam konteks ini, dengan sikap politik elite Nahdlatul Ulama yang bersikap inklusif akan membantu Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan problem-problem lokal yang dihadapi oleh umat. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa diperlukan pemimpin Islam yang mementingkan fungsi inklusif dan integratif. Peran inklusif menjadi penting dalam kondisi masyarakat seperti saat ini karena disparitas dan liberalisasi sosial politik dan ekonomi telah membawa umat kepada sebuah keadaan yang tidak menentu dan melahirkan berbagai persoalan baru bagi masyarakat lokal (Jurdi, 2004 : 213).

Sikap politik elite Nahdlatul Ulama, selain untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi juga ada motif-motif lain. Hal ini tentu sudah mempunyai kesepakatan antar elite-elite Nahdlatul Ulama. Karena pada prinsipnya keterlibatan seseorang atau elite dalam wilayah politik tetap mengandung kepentingan, mulai dari isu-isu yang bersifat sosial, keadilan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan kehidupan umat Islam hingga kepentingan subjektif pelaku.

Temuan 5. Sikap politik elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon kepala daerah untuk kepentingan organisasi.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, setiap calon kepala daerah tentu saja ingin mendapatkan dukungan salah satunya dari organisasi kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama adalah salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang tentu saja setiap calon kepala daerah pasti meliriknya untuk mendapatkan dukungan suara. Elite Nahdlatul Ulama melihat momentum ini tidak boleh dilewatkan dan harus terlibat didalamnya. Oleh karena itu, elite

Nahdlatul Ulama ikut berpartisipasi dalam mendukung salah satu calon kepala daerah, tentu saja didasari kepentingan organisasi.

Temuan 6. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan berbasis agama mengawal pemerintahan yang sah secara konstitusi.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan merasa bertanggung jawab terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Apabila sebuah pemerintahan yang sah dan konstitusi berjalan dengan baik, maka pelaksanaan program dan kepentingan masyarakat bisa terpenuhi. Tentu hal ini, para elite Nahdlatul Ulama mengacu kepada dalil-dalil agama bahwa mendukung pemerintahan yang sah dan konstitusi hukumnya wajib.

Berdasarkan temuan 5 dan 6 maka **Proposisi Minor 3 :**

Kepentingan organisasi menjadi alasan terhadap dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, dan siapapun yang menang pemerintahannya tetap di kawal.

Dalam masyarakat masyarakat yang pluralisme buadayanya tinggi, seringkali terdapat kegiatan yang bervariasi dan tidak mustahil terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Untuk memahami perilaku politik diperlukan tinjauan dari sudut pandang yang multidimensi. Perilaku poltik merupakan produk sosial sehingga untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari beberapa disiplin ilmu. Dalam pendekatan behaviorisme individulah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu dalam hal ini elite yang secara aktual mengendalikan lembaga.

Di pihak lain terdapat dua variabel yang memengaruhi partisipasi politik warga negara. Dua variabel itu adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah. Dua variabel tersebut tidaklah berada pada kutub yang berlawanan sekaligus menentukan sikap dan perilaku warga negara dalam perilaku politiknya, tetapi berada secara integral dengan faktor-faktor lain seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi.

Perilaku politik aktor atau elite sering kali dipengaruhi oleh berbagai dimensi latar belakang yang merupakan bahan dalam pertimbangan poltiknya.

4. **Pertimbangan Rasional**

Masyarakat boleh jadi memang tidak pernah "diam". Masyarakat selalu bergerak, berkembang dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang inheren melekat dalam "diri" masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal (Narwoko dan Bagong Syanto, 2014 : 378). Oleh karena itu, masyarakat (dalam hal ini elite Nahdlatul Ulama) dipersepsikan sebagai sistem interaksi, juga kehidupan masyarakat ditempatkan pada dua posisi secara gradual (*cybernetic level*). Konsep ini mengandung konsekuensi dalam dua hal: pertama, interaksi sosial yang bersifat individual, dan kedua, interaksi sosial yang bersifat kolektif. Perilaku dan interaksi pada tingkat individu harus selalu dikendalikan dan diintegrasikan pada tingkat kolektif (Narwoko dan Bagong Suyanto, 2014).

Perubahan politik secara umum merupakan hal yang bersifat alamiah. Semua objek di dunia ini tidak dapat mempertahankan keabadiannya. Demikan juga, kehidupan politik tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan. Perubahan politik menyangkut persoalan-persoalan sistem nilai politik, struktur kekuasaan, serta strategi mengenai kebijakan umum yang berkenaan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang memengaruhi dan dipengaruhi sistem politik (Sastroatmodjo, 1995 : 235).

Perubahan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama mengalami suatu yang dianggap krusial pada saat munculnya pemilihan kepala daerah langsung. Para elite tersedot energinya dalam meresponsnya. Pemicu utamanya banyak elite Nahdlatul Ulama ikut terlibat didalam dukung mendukung calon kepala daerah.

Mencermati data-data wawancara dengan beberapa informan khuusussnya elite Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah kota Samarinda tahun 2015, peneliti memperoleh gambaran mengenai pergeseran perilaku politik elite Nahdlatul Ulama hampir sama. Sejak itu, elite Nahdlatul Ulama pilihannya maka dengan pilihan rasional yang merupakan tindakan rasional

demi untuk tujuan yang mempunyai nilai memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Menurut Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda elite Nahdlatul Ulama memberikan sosialisasi dimasing-masing tingkatan organisasi, masyarakat banyak khususnya warga Nahdlatul Ulama menerima dan memberikan dukungannya. Pilihan yang ditentukan oleh elite Nahdlatul Ulama mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Warga Nahdlatul Ulama juga sangat yakin dengan percaya penuh atas pilihannya itu dianggap benar karena yang menentukan adalah pimpinan atau elite organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama.

Tindakan ini menurut Max Weber termasuk tindakan traditional action, yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam atau tindakan efektif yang didominasi perasaan atau emosi belaka dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu (Ritzer, dan Goodman, 2009). Oleh karena itu, menurut Weber tindakan yang dilakukan oleh elite Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama dikategorikan tindakan Zwerk Rational, yaitu tindakan yang didasarkan pada tujuan-tujuan rasional yang didasar pada instrumen.

Dari tujuan tindakan tersebut, dapat diklasifikasikan berdasarkan kadar rasionalitas yang dikandungnya. Weber menyatakan bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seorang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (*means*) yang dinilai tepat untuk mewujudkannya sesuai dengan situasi yang ada (Upe, 2008 : 259).

Rasionalitas perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada dasarnya mencirikan model diakhronik, yaitu rasionalitas perilaku politik dengan mempertimbangkan jarak waktu pencapaian tujuan. Derajat rasionalitas tersebut, tersusun dalam tiga rentang waktu, yakni *pertama*, rasionalitas retrospektif, yaitu kemampuan untuk memilih berdasarkan penilaiannya pada penampilan calon kepala daerah pada masa lalu. Perilaku memilih retrospektif (retrospective voting) tidak ubahnya seperti memberikan ganjaran atau hukuman kepada calon kepala daerah. Rasionalitas retrospektif diarahkan pada figur (Upe, 2008 : 260).

Rasionalitas *kedua*, rasionalitas pragmatis-adaptif tipe ini rasionalitas ini didasarkan atau disesuaikan pada stimulus politik yang muncul pada momen pemilihan. Perilaku pragmatisme-adaptif muncul akibat pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar "isapan jempol" akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis. Perilaku model pragmatis-adaptif, yaitu perilaku yang diorientasikan hanya semata melihat kepentingan tertentu. *Ketiga*, rasionalitas prospektif adalah perilaku politik yang didasarkan pada orientasi masa depan yang lebih panjang. Perilaku politik model ini menentukan pilihannya didasarkan pada visi, misi kandidat atau calon kepala daerah, rekam jejak (*track record*), integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan (Upe, 2008). Oleh karena itu, rasionalitas diakhronik sejalan dengan pandangan Lasswell tentang makna perilaku politik seseorang. Dalam ungkapannya menyebutkan, "*politics is who get what, and how*" (politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Dari ungkapan tersebut, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan.

Berkaitan dengan realitas tersebut, perubahan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama juga di dalam memilih kepala daerah masih tetap mempertimbangkan bagaimana visi dan misi serta program kerja calon kepala daerah tersebut. Apakah programnya berpihak kepada kepentingan masyarakat lebih khusus warga Nahdlatul Ulama. Di samping itu, yang tidak kalah penting juga dipertimbangkan adalah melihat figur calon kepala daerah.

Temuan 7. Faktor perilaku politik elite Nahdlatul Ulama ditentukan oleh nilai-nilai Islam dan tujuan organisasi.

Perilaku politik elite Nahdlatul Ulama tentu saja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Setelah melakukan interaksi dengan calon kepala daerah dan melakukan dialog, kemudian menentukan pilihan calon kepala daerah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama, para elite Nahdlatul Ulama mendukung calon kepala daerah tentu saja mempunyai nilai dan tujuan tertentu.

Temuan 8. Visi, misi, dan program kerja serta figur menjadi faktor yang menentukan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama.

Para elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon kepala daerah, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Oleh karena itu,

visi, misi dan program kerja sangat menjadi motivasi utama di dalam mendukung calon kepala daerah. Namun, demikian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana daya tarik figur calon kepala daerah.

Berdasarkan temuan 7 dan 8 maka **Proposisi Minor 4 :**

Visi, misi, tujuan dan figur yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan organisasi menjadi pertimbangan dalam mendukung pasangan calon kepala daerah.

5. Menguatnya Pragmatisme

Disadari atau tidak, manusia sebagai insan politik (*zoon politicon*) dalam aktivitasnya, baik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok, senantiasa memiliki tujuan masing-masing. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, manusia terikat oleh nilai, norma, dan kaidah di mana mereka berinteraksi. Durkheim melihat realitas ini sebagai fakta sosial, yang dimaksudkan untuk mengatur pola perilaku manusia (Upe, 2008: 256).

Lain halnya Max Weber, tindakan manusia sebagai sesuatu yang memiliki makna subjektif. Individu dipandangnya sebagai makhluk kreatif sehingga mampu melakukan tindakan sesuai makna dan tujuan yang diinginkannya (Upe, 2008). Sementara itu, paradigma perilaku melihat perilaku atau tindakan manusia atas dasar stimulus dan respons.

Artikulasi atau tingkah laku elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan kepala daerah bersifat pragmatis, yaitu tingkah laku elite cenderung mengintegrasikan diri dalam struktur kekuasaan dan kepentingan pemerintah dan politik kekuasaan. Pada konteks ini, idealisme dan kekritisan elite terhadap kekuasaan menjadi praktis dan pragmatis karena proses peleburan diri ke dalam wilayah kekuasaan tersebut tanpa reserve sama sekali. Para elite hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek (Jurdi, 2004 : 204).

Fenomena yang menarik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah maraknya kapitalisme Pilkada. Realitas ini tidak hanya menarik diperbincangkan, tetapi juga telah menjadi amunisi utama dan modus operandi digunakan oleh para calon kepala daerah. Faktor yang sangat memengaruhi terjadinya pergeseran perilaku politik elite

Nahdlatul Ulama adalah karena perilaku pragmatis menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung calon kepala daerah.

Para elite Nahdlatul Ulama memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah berharap ada imbalan terhadap elite, baik langsung berupa barang atau tidak langsung berupa jasa atau janji yang nanti ketika terpilih akan diminta ulang. Hal ini sangat relevan dengan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial, yaitu setiap tindakan yang oleh seseorang didasarkan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer, orang menyediakan barang atau jasa, tetapi tidak semua pertukaran sosial dapat diganti dengan uang sebab konpensasi yang diberikan berupa sesuatu yang tidak nyata (Budiyatna, 2015).

Perilaku politik elite Nahdlatul Ulama bukan merupakan realitas yang berdiri sendiri, tidak pula sebagai perilaku yang berada pada ruang hampa. Dengan lain perkataan, perilaku politik elite Nahdlatul Ulama sangat berkaitan dengan stimulus dan pertimbangan subjektif dalam merespon faktor stimulus yang diperolehnya.

Sementara beberapa informan menyatakan bahwa elite Nahdlatul Ulama memberikan dukungan kepada calon kepala daerah karena mendapat konpensasi berupa bantuan mobil operasional. Demikian juga informan yang lain juga mengatakan bahwa elite Nahdlatul Ulama memberikan dukungan kepada calon kepala daerah karena diberi konpensasi berupa pembangunan kantor sekretariat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kota Samarinda.

Hal tersebut juga relevan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Blau, yaitu *pertama*, pelaku tersebut mempunyai tujuan yang hanya dapat dilakukan dengan berinteraksi tanpa ada interaksi dengan orang lain tidak akan mendapat konpensasi, *Kedua*, tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh imbalan, yaitu yang berupa mobil operasional konpensasi atau kantor sekretariat Pengurus atau fasilitas yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh bahwa sikap dan perilaku pragmatis elite Nahdlatul Ulama menjadi faktor sangat berpengaruh terhadap perilaku politik. Bahkan, sikap pragmatis tersebut kemudian disikapi oleh para kandidat kepala daerahpun mengambil sikap yang sama, yakni berpikir pragmatis. Sikap pragmatis tersebut digunakan dalam meraih suara dari para elite

Nahdlatul Ulama dengan cara menebarkan janji-janji yang berupa uang maupun dalam bentuk hadiah lainnya.

Pendidikan politik bagi pemilih (khusus warga Nahdlatul Ulama) masih sangat kurang menyentuh sampai pada kalangan g*rass roots* sehingga makna dari rekrutmen politik lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung belum dipahami secara maksimal. Hal ini berimplikasi pada motivasi warga Nahdlatul Ulama dalam penentuan pilihannya yang tidak didasarkan pada hakikat dari rekrutmen politik lokal itu sendiri. Dengan keterbatasan informasi politik lebih pragmatis dalam merespon perhelatan politik.

Oleh karena itu, pragmatisme yang merajalela di tengah-tengah masyarakat sering kali dimanfaatkan para calon kepala daerah. Pragmatisme yang dimaksud di sini adalah berupa perilaku pemberian suara atas dasar kepentingan sesaat yang dinilai secara rasional menguntungkan. Sebagian dari mereka mempunyai strategi yang menghalalkan segala cara demi memenangkan pemilihan kepala daerah dan memuaskan tingginya nafsu politik. Cara yang dijalankan tentu saja menggunakan kekuatan uang (*money politics*). Sasaran utama strategi ini tentu saja para pemilih lewat perantara elite Nahdlatul Ulama yang kemudian membagi-bagikan rezeki dan hadiah seperti sarung, jilbab, kaus atau sembako.

Yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama faktor utama karena adanya pemberian secara sukarela dari calon kepala daerah, tentu saja memiliki konsekuensi berupa *reward* dalam bentuk pemberian dukungan (suara). Modus operandi *money politics* pun bervariasi, mulai dari bentuk halus berupa sumbangan fasilitas umum, sampai pemberian yang terang-terangan seperti baju kaos dan lain sebagainya, dan yang lebih menarik lagi adalah adanya pemberian uang tunai dalam bentuk uang konsumsi, uang transportasi, uang pengganti kerja sampai pada uang dukungan.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa sikap dan perilaku pragmatis menjadi faktor sangat berpengaruh bagi elite Nahdlatul Ulama dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Pragmatis yang dimaksud berupa perilaku pemberian suara atas dasar kepentingan sesaat yang dinilai secara rasional menguntungkan. Oleh karena itu, menurut peneliti pergeseran perilaku politik elite Nahdlatul Ulama merupakan jalan pintas yang dilakukan elite untuk

mendapatkan keuntungan dari dukungan yang yang diberi kepada calon kepala daerah tersebut.

Oleh karena itu, dalam perspektif teori perilaku sosial *Reinforment* yang dapat diartikan sebagai *reward* (ganjaran) ditentukan oleh hadiah (penguat) dan ongkos (hukuman). Hadiah ditentukan oleh kemampuannya memperkuat perilaku, sedangkan biaya mengurangi kemungkinan perilaku.

Temuan 9. Transaksi ekonomi menjadi dasar terhadap dukungan kepada pasangan calon kepala daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung calon kepala daerah tentu terjadi melalui timbal balik. Dalam artian, elite Nahdlatul Ulama mendukung calon kepala daerah dengan terjadinya transaksi ekonomi. Tentunya ini untuk kerpentingan organisasi.

Temuan 10. Kompensasi ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama.

Sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebuah proses pemilihan kepala daerah, dalam dukung mendukung selalu berdasarkan pada saling membutuhkan yang bersifat menguntungkan. Oleh karena itu, elite Nahdlatul Ulama mendukung calon kepala daerah tentu saja adanya konpensasi.

Berdasarkan temuan 9 dan 10 maka **Proposisi Minor 5 :**

Tindakan politik elite Nahdlatul Ulama di dasarkan pada pertimbangan ekonomi.

6. Terlibat Dalam Power Sharing

Dalam setiap organisasi, kelompok dan lembaga-lembaga terdapat beberapa individu konkret yang membuat berbagai keputusan. Karenanya individu bukanlah subjek pasif yang semata-mata bereaksi terhadap nilai-nilai di luarnya dan kondisi-kondisi struktural yang melingkupinya. Aktor dalam hal ini elite Nahdlatul Ulama juga tidak hanya tanggap terhadap struktur yang telah mapan, tetapi juga melakukan perubahan pada kondisi struktural.

Salah satu wujud kekuatan struktur politik yang menonjol adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan *patronage*, baik

dikalangan penguasa maupun masyarakat, yang didasarkan pada pola hubungan *patron-client*. Interaksi yang terjadi dalam pola hubungan ini sifatnya timbal balik (*reciprocal*) dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung *patronage* dapat terjadi antara calon kepala daerah sebagai *patron* dan elite Nahdlatul Ulama sebagai *client*.

Karena itu, dalam memahami segi kehidupan politik diperlukan dan penting untuk memberikan perhatian khusus pada nilai-nilai, motivasi-motivasi, dan persepsi individual dari aktor-aktor itu. Individu sebagai aktor dalam perilaku politiknya yang dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan itu beroperasi konsekuensi pada struktur keyakinan dan individu. Oleh karena itu, kepentingan sebagai tujuan yang dikejar oleh aktor merupakan faktor yang penting dalam perubahan perilaku politik, individu maupun kelompok, yang selalu melekat dalam proses politik. Kepentingan merupakan kekuatan pendorong yang utama bagi manusia dan seperti tindakan manusia didasarkan atas pemilikan kepentingan (Nashir, 2000 dalam Upe, 2008: 93).

Seiring bergulirnya gelombang demokrasi lokal, muncul fenomena baru berupa kartel-kartel dan sirkulasi elite. Aktor-aktor politik dan aktor-aktor pengusaha atau pemilik modal menjalin taktis dan strategis baik sebelum maupun setelah proses pemilihan kepala daerah dalam bentuk "politik uang". Hal ini ditempuh untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekayaan negara dengan merebut kekuasaan. Praktik demokrasi demikian, (dalam Irham, 2016 : 21) menurut Robinson dan Hadiz terperangkap dalam perkawinan antara kapitalisme pemangsa dan politik demokratik.

Demokrasi lokal hanya bisa dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki jaringan kuat di tingkat elite, baik jaringan birokrasi, pemodal, maupun jaringan kekuatan fisik. Oleh karena itu, aktor dan institusi demokrasi tidak berada pada posisi sendiri-sendiri. Keduanya sama-sama memainkan peran strategis dan penting dalam menciptakan maupun merusak wajah demokratisasi, di mana faktor manusia dan faktor struktur ikut memengaruhi sumber daya politik yang ada.

Demokrasi di tingkat lokal memberi peluang bagi berubahnya konfigurasi elite lokal dan membuka ruang lebar bagi partisipasi warga/rakyat lokal. Pemilihan kepala daerah langsung sejak 2005 telah memberikan indikasi kuat bahwa demokrasi di Indonesia, meskipun mahal, terhindar dari politik kekerasan, kerusuhan, dan konflik sosial yang sering kali dikhawatirkan oleh banyak kalangan (Irham, 2016 : 11). Keran demokratisasi lokal yang mengakhiri kekuasaan rezim otoriter orde baru memberi ruang gerak bangkitnya kesadaran elite Nahdlatul Ulama.

Mencermati data-data wawancara dengan beberapa informan khususnya elite Nahdlatul Ulama yang terlibat langsung dalam memberikan dukungan pada pemilihan kepala daerah langsung kota Samarinda tahun 2015, peneliti memperoleh gambaran mengenai perubahan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama. Para elite Nahdlatul Ulama menentukan pilihannya karena berharap secara nyata dalam mengawal implementasi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini perlu keterlibatan elite dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui sejauhmana perencanaan kebijakan itu berbasis masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Di samping itu, juga para elite dan secara kelembagaan Nahdlatul Ulama berharap terlibat menentukan jabatan-jabatan strategis pemerintah kota Samarinda.

Dalam relasi antara struktur (makro) dengan agen (mikro), agen yang buruk berpotensi membajak struktur, agen praktis cenderung memelihara dan mempertahankan struktur, sedangkan agen yang baik, yaitu aktor-aktor reflektif baik di internal negara maupun eksternal nonnegara, merupakan penggerak perubahan baik dari dalam maupun dari luar (Irham, 2016 : 145).

Artikulasi atau perilaku politik elite Nahdlatul Ulama bersifat pragmatis, yaitu tingkah laku elite Nahdlatul Ulama cenderung mengintegrasikan diri dalam struktur kekuasaan dan kepentingan pemerintah atau politik kekuasaan. Oleh karenanya, idealisme dan kekritisan elite Nahdlatul Ulama terhadap kekuasaan menjadi dan pragmatis karena proses peleburan diri ke dalam wilayah kekuasaan.

Bahwasanya elite Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan dengan struktur Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Giddens memandang pada dasarnya struktur dan individu-aktor berinteraksi dalam proses

produksi dan reproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil (**outcome**) dan struktur, tetapi aktor juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru (Wirawan, 2012 : 294).

Dalam perspektif teori perilaku sosial, perilaku politik aktor bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu tersebut. Tujuan yang diinginkan itu dapat berupa ganjaran intrinsik seperti kasih sayang, kepuasan dan kehormatan atau ganjaran ekstrinsik seperti uang, barang atau jasa.

Temuan 11. Elite Nahdlatul Ulama memperoleh ruang politik yang luas.

Proses politik dalam pemilihan kepala daerah tentu sangat dinamis. Interaksi politik antara calon kepala daerah dengann massa pemilih sangat intens termasuk elite. Dalam hal ini, elite Nahdlatul Ulama memperoleh ruang politik yang sangat luas. Fokus 3 : Orientasi kepada aspek terlibat dalam power sharing

Temuan 12. Elite Nahdlatul Ulama didukung oleh struktur Nahdlatul Ulama.

Faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama dalam mendukung calon kepala daerah, tentu saja melalui proses kelembagaan. Sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh elite Nahdlatul Ulama mendapatkan dukungan oleh struktur organisasi. Hal ini, menjadikan dukungan tersebut sebagai dukungan secara kelembagaan.

Berdasarkan temuan 11 dan 12 maka **Proposisi Minor 6 :**

Dengan didukung struktur Nahdlatul Ulama elite Nahdlatul Ulama memperoleh ruang politik.

Berdasarkan abstraksi proposisi minor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 maka dirumuskan proposisi mayor sebagaimana berikut :

Proposisi Mayor :

Perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 tidak saja diwarnai keputusan, tindakan dan sikap, tetapi juga politik sehingga terkooptasi kepentingan individu dan organisasi.

BAGIAN IX

Konklusi Kajian

Perilaku politik elite Nahdlatul Ulama pada pemilihan kepala daerah kota Samarinda ditunjukkan dari ; (a) Keputusan politik elite Nahdlatul Ulama kota Samarinda ditunjukkan bahwa keputusan yang diambil bersifat kolektif, secara kelembagaan dan organisasi tetap independen, (b) tindakan politik elite Nahdlatul Ulama dilakukan dalam bentuk langsung maupun tidak langsung dan melalui cara-cara konvensional dan non konvensional guna mendapatkan dukungan warga Nahdlatul Ulama, tindakan politik yang dilakukan elite Nahdlatul Ulama secara umum dapat diterima dan memenuhi harapan warga Nahdlatul Ulama, dan (c) sikap politik elite Nahdlatul Ulama mendukung salah satu calon kepala daerah untuk kepentingan organisasi, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan berbasis agama mengawal pemerintah yang sah secara konstitusi.

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik elite Nahdlatul Ulama kota Samarinda pada pemilihan kepala daerah adalah (a) mempunyai nilai dan tujuan tertentu, (b) masih mendahulukan pertimbangan visi, misi dan program kerja serta figur, (c) tindakan elite didasarkan pada transaksi

ekonomi, dikarenakan adanya kompensasi, elite memperoleh ruang politik dan elite didukung struktur Nahdlatul Ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Muhammad, 1996. *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly, 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Raja Grafindo.

Agustinus, Leo, 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asyari, Suaidi, 2009. *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: LkiS.

Anwar, Ali, 2004. *"Avonturisme" NU: Menjejali akar konflik-kepentingan politik kaum Nahdliyyin*. Bandung: Humaniora.

Anam, Choirul, 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala, Jatayu.

Amiruddin, 2014. *Perilaku Anggota DPRD Terhadap Fungsi Pengawasan (Kajian Fenomenologi mengenai Perilaku Anggota DPRD Di Kota Sorong)*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Bottomore.Tom B, 1990. Kelas Elite dan Masyarakat, Dalam Sartono Kartodirdjo (Eds) *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES.

Buchari, Sri Astuti, 2015. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Budiardjo, Miriam, 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Budyatna, Muhammad, 2015. *Komunikasi Antar-Budaya*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Bruinessen, Martin van, 2004. *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru,* Yogyakarta: LkiS.

Basrowi, 2005. *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Coleman, James S, 1994. *Foundations of Social Theory*, The Belknap Press of Harvard University Press.

Daman, Rozikin, 2001. *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media.

Dhofier, Zamakhsari, cet.ke-9, 2011. *Tradisi Pesantren:Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Davis, Kingsley, "The Myth of Functional Analysis as a Special in Sosiology and Antroplofy", *American Sociological Review* 24, Desember 1959.

Dahl, Robert, *On Democracy*, edisi terjemahan Bahasa Indonesia, Perihal Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Depag RI.

Effendi, Bahtiar, 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Effendi, Bahtiar, 2001. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press.

Fachruddin, Fuad, 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta:Pustaka Alvabet.

Feillard, Andree, 2008. *NU vis-a-vis Negara*, Yogyakarta: LkiS.

Giddens, Anthony, 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, USA: University of California Press.

Haidar, M.Ali, 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Halim, Abd, 2014. *Politik Lokal, Pola, Aktor dan Alur Dramatikanya* (*Prespektif Teori Powercube, Modal dan Panggung*), Yogyakarta: LP2B.

Halim, Abd, 2014. *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Perspektif Hermeneutika Gadamer,* Jakarta: LP3ES.

HS,Hairus Salim, dan Muhammad Ridwan (editor), 1999. *Kultur Hibrida: Anak Muda NU Di Jalur Kultural*, Yogyakarta: LKIS.

Huntington. Samuel P, Joan Nelson, 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (diterjemahkan dari judul aslinya *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries* oleh Sahat Simamora), Jakarta: Rineka Cipta.

Hidajah, Siti Hidajah, 2010. *Golongan Putih Dalam Partisipasi Pemilihan Pimpinan Lokal Gubernur dan Wakil Gubernur (Kajian Fenomenologi Komunitas Pemilih Era Pilihan Kepala Daerah Langsung di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Jawa Tengah*). Disertasi, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang..

Hoesein, Zainal Arifin dan Rahman Yasin, 2015. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: LP2AB.

Haryanto, Sindung, 2016. *Spektrum Teori Sosial*: *Dari Klasik Hingga Postmodern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Hariyanto, Nur Budi, 2012. dalam *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, Ciputat: Churia Press.

Ismail, Faisal, 1999. *Gus Durisme dan Politik Kiai*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ibrahim, 1988. *Inovasi Pendidikan*, Jakarta: Dikbud Dirjen Dikti PPLPTK.

Ida, Laode, 2004. *NU Muda: Kaum Progressif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga.

Irham, Muhammad Aqil, 2016. *Demokrasi Muka Dua Membaca Ulang Pilkada di Indonesia,* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Johnson, Doyle Paul, 1990. *Teori Sosiologi*, Jakarta: Gramedia.

Jurdi, Syarifuddin, 2004. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jarry, David dan Julia Jarry, 1991. *Collin Dictionarry of Sociology*, Glasgow: Harper Collins Publishers.

Karim, A.Ghafar, 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKis.

Karsidi, Ravik, 2005. *Sosiologi Pendidikan*, Surakarta: LPP UNS & UNS Press.

Keller, Suzanne, 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit*: *Peranan Elit dalam Masyarakat Modern*. Terjemahan Zahara D. Noer, Jakarta: Rajawali Press.

Kuntowijoyo, 1998. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan.

Kahmad, H.Dadang, 2009. *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Launer, Robert, 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hakim,Lukman, 2004. *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiasitif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*, Surabaya: Pustaka Eureka.

Maliki, Zainuddin, 2004, *Agama Priyayi* (*Makna Agama Di Tengah Elite Penguasa*), Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Maliki, Zainuddin, 2010. *Sosiologi Politik:Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Musa, Ali Masykur, 2011. *Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Marijan, Kacung, 2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Prenamedia.

Marijan, Kacung, 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Surabaya: Erlangga.

Miles, Matthew B, A.Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press.

Maran, Rafael Raga, 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mujani, Saiful, 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Uitama.

Muhtadi, Asep Saeful, 2004. *Komunikasi Politik NU, Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: LP3ES.

Mulkhan, Abdul Munir, 1989. *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam (1965-1987)*, Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad, Firdaus, 2012, *Komunikasi Politik Islam*, Makassar: Alauddin University Press.

Moesa, Ali Maschan, 2007. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS.

Moesa, Ali Maschan, *Refleksi Konferensi Wilayah NU Jatim di Tengah Tarik Ulur Politik*, Surabaya: Jawa Pos 22 Oktober 2002.

Martono, Nanang, 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern*, *Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ma'arif, Ahmad Syafii, 1996. *Islam dan Politik-Tepori Belah Bambu Masa Depan Demokrasi Terpimpin* (1959-1965), Jakarta: Gema Insani Press.

Muzadi, Muhid,1995. *NU dan Figh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM.

Munawir, Syadzali, 1993. *Islam dan Tata Negar: Ajaran,Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Nurtjahjo, Hendra, 2008. *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Heru, 2000. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Poloma, M.Margaret, 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

PB NU, 2015. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU Hasil Muktamar XXX 2015: Jakarta LTN-NU.

Putnam. D. Robert, 2000. "Studi Perbandingan Elite Politik". Dalam Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Patoni, H.Achmad, 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Priyono-B.Herry,2003. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Wahyudi, Chafid, 2013. *Nahdlatul Ulama dan Civil Religion Melacak Akar Civil Religion Dalam Keagamaan NU*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirawan, I.B, 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defenisi Sosial dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Prenadamedia.

Wirutomo, Paulus, 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Weber, Max, 1958. *The Protestant Ethicand The Spirit of Capitalism*, New York: Charles Scribner's Sons.

Upe, Ambo, 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer; Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Dareah Secara Langsung*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Upe, Ambo, 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ummatin, Khoiro, 2002. *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ubaedillah.A dan Abdul Rozak (Peny.), 2006. *Demokrasi,Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang PILKADA Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota, 2015. Jakarta: Permata Press.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul: Kreasi Wacana.

Ritzer, George, 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pres.

Raho, Bernard, SVD, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Rush, Michael dan Phillip Althoff, 1997. *Pengantar Sosiologi Politik* (diterjemahkan dari judul aslinya *Introduction to Political Sociology, oleh* Kartini Kartono) Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Ridwan, 2004. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama STAIN Purwokerto Press.

Tutik, Titik Triwulan dan Jonaedi Efendi, 2008. *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama:Sketsa Politik Kiai dan Perlawanan Kaum Muda NU*, Jakarta: Lintas Pustaka.

Sandi, Jhon Retei Alfri, 2016. *Perilaku Politik Lembaga Adat Dalam Aktualisasi Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah (Kajian di Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT).* Disertasi, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Strauss, Anselm and Corbin, Juliet, 1990, *Basics Of Qualitative Research*: *Grounded Theory Pricedures And Techniques*, Newbury Park, Califirnia: Sage Publications.

Salim, Agus, 2014. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Syam, Nina W, 2012. *Sosiologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Setiawan, Zudi, 2007. *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu.

Sahid, Komarudin, 2011., *Memahami Sosilologi Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo.

Sujuthi, Mahmud, 2001. *Politik Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Jombang: Hubungan Agama, Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press.

Sahid, Gatara, A.A, 2009, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Bandung: C.V. Pustaka Setia.

Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press,

Susan, Novri, 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Prenada Media Group.

Soon, Kong Young, 2008. *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama,* Jakarta: UI-Press.

Shobron, Sudarno, 2003. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sobary, Mohamad, 2010. *NU Dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Syaifullah, 2015. *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sitompul, Einar, 1992. *NU dan Pancasila*, Jakarta: Sinar Harapan.

Suyanto, Bagong dan J.Dwi Narwoko, cet.ke-7 2014. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Setiadi, Melly M dan Kolip, Usman, 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Thaba, Abdul Azis, 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (1966-1994), Jakarta: Gema Insani Press.

Zamroni, 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Zainuddin, A. Rahman, 1992. *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PROFIL PENULIS

Dr. Abubakar Madani, M.Ag.. Saat ini berkarier sebagai staf Pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Samarinda (1999-sekarang). Jenjang pendidikannya sebagai berikut.

1. S1 Aqidah dan Filsafat Islam UIN Palu (1987-1991)
2. S2 Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Surakarta (2001-2003).
3. S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang (2014-2018).

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua PW GP Ansor Kalimantan Timur (2001-2005 dan 2005-2009).

2. Sekretaris PW GP Ansor Kalimantan Timur (2010-2014).
3. Wakil Sekretaris PWNU Kalimantan Timur (2013-2018).
4. Sekretaris PWNU Kalimantan Timur (2018-2023)